

KINERJA

JURNAL BISNIS DAN EKONOMI

**Evaluasi Pemeringkatan *Good Corporate Governance* (GCG):
Pembobotan Dimensi GCG untuk Industri Keuangan dan Nonkeuangan di Indonesia**
Jogiyanto, Efraim dan Sri, S.

**Model *Framing* dan *Belief Adjustment* Dalam Menjelaskan Bias Pengambilan Keputusan
Pengauditan**
I Wayan Suartana

**Karakteristik Nasabah dan Dampaknya Terhadap Penyaluran Kredit Umum Pedesaan
(Kupedes) di Kabupaten Sleman**
Krisna Wijaya dan Roberto Akyuwen

**Pengaruh Otomatisasi Sistem Informasi dan Penguasaan Teknologi Terhadap
Pemberdayaan SDM dan Kesesuaian Tugas-teknologi Sebagai Pemoderasi**
F. Shellyana Junaedi dan Anna Purwaningsih

**Efek Mediasi Kognitif Situasional Pada Pengaruh Kepribadian Disposisional
Terhadap Niat Penggunaan Internet: Studi Empiris Keberterimaan Teknologi Informasi
di Lingkungan Perguruan Tinggi.**
Willy Abdillah

**Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Pedagang Ritel Pasar Tradisional:
Studi Kasus Supermarket "X" Dengan Pasar "Y" di Jl. Sultan Agung, Yogyakarta**
P. Didit Krisnadewara dan Y. Sri Susilo

**Analisis Surplus Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007**
Rudy Badrudin

EVALUASI PEMERINGKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG): PEMBOBOTAN DIMENSI GCG UNTUK INDUSTRI KEUANGAN DAN NONKEUANGAN DI INDONESIA

Jogiyanto, H.M.

Email : jogiyanto.staff.ugm.ac.id

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada

Efraim, F.G., dan Sri, S.

Abstract

This research aims to investigate and evaluate the determination of GCG score by IICG. Results of this research prove that the dimension STRULOLA, STRUMLK, TRANS, and PERLING have a significant influence on performance of the organization. STRULOLA variables have the greatest contribution, followed by the variable TRANS on second sequence to explain the organization's performance measured by ROA. For variable STRUMLK and PERLING have standardized coefficient is low, but relatively the same. Therefore, when evaluating the need to differentiate weight for each of these dimensions. Results of this research also shows that the instruments used to identify the existence and implementation of aspects of the GCG in a company need to be distinguished industry. Because the business risk borne by each industry is different, the instruments should be used for each industry is also different. IICG determine GCG ranking using the assumption that conditions public and non-public companies are the same. Both are certainly different, although it is in the same industry. Public companies have more rules and regulations that must be observed compared with the non-public companies. Provisions for public companies is also accompanied by the penalties. Therefore, public companies tend to be more effort to meet these conditions compared with non-public companies. IICG does not differentiate the two groups of this company.

Keywords: good corporate governance, public company, non-public company

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan peningkatan good corporate governance (GCG) adalah mendorong perusahaan-perusahaan publik melaksanakan corporate governance dengan lebih serius. Peningkatan GCG tidak dimaksudkan untuk menentukan pemenang, namun yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Dipiaza and Eccles, 2002). Kepercayaan publik adalah tujuan utama penerapan GCG dan peningkatan GCG. Perusahaan yang memiliki skor GCG yang tinggi seharusnya sangat dipercaya oleh publik. Penentuan peringkat bukan suatu tugas yang mudah atau hanya sekedar pemberian angka pada perusahaan tertentu. Peningkatan GCG akan memberikan konsekuensi logis dan psikologi. GCG akan mendukung kepercayaan publik akan berimbang pada peningkatan kemampuan menjual produk perusahaan. Konsekuensi secara psikologis bermakna GCG akan memicu dukungan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak lain akan merasa nyaman bertransaksi dengan entitas bisnis yang dapat dipercaya. Jika peningkatan GCG sangat bisa dipercaya, maka pihak lain yang berkepentingan tidak perlu kesulitan mengevaluasi partner bisnisnya. Mereka cukup melihat berapa skor GCG untuk menentukan keputusan bertransaksi atau tidak dengan partner tersebut. Oleh karena itu peningkatan GCG harus didesain dengan konstruksi bangunan teori yang baik dan

benar. Pembobotan untuk masing-masing kriteria sebaiknya mempertimbangkan level kepentingan setiap dimensi GCG tersebut.

Pemeringkatan GCG di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2003. Pemeringkatan GCG perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dilakukan oleh Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG). Penelitian ini dimotivasi pemeringkatan GCG oleh IICG yang mengasumsikan bahwa setiap dimensi GCG memiliki tingkat kepentingan yang sama, sehingga bobot yang dilekatkan pada setiap dimensi GCG juga ditentukan sama. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan daftar dimensi dan item yang dapat dipakai untuk mengevaluasi proses pemeringkatan yang telah dilakukan oleh IICG. Penelitian ini menjadi penting karena pelekatan bobot yang tepat sesuai dengan karakteristik industri di Indonesia belum pernah diteliti dan jika dicermati IICG lupa mempertimbangkan faktor keunikan setiap sektor industri. Selama lima kali pemeringkatan GCG, IICG melekatkan bobot yang serupa dengan pemeringkatan GCG di negara lain. Permasalahan yang lain adalah bahwa besaran bobot setiap dimensi tidak membedakan sektor industri. Selain itu IICG juga tidak membedakan perusahaan publik dan perusahaan nonpublik ketika melakukan pemeringkatan GCG. Penerapan GCG oleh perusahaan publik dan nonpublik dievaluasi menggunakan instrumen yang sama. Tentu saja hasil pemeringkatan ini menjadi kurang tepat bagi perusahaan tertentu.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemeringkatan GCG bahwa tingkat kepentingan masing-masing dimensi GCG adalah berbeda. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa pemeringkatan GCG untuk setiap industri harus berbeda sebab setiap industri memiliki karakteristik GCG yang berbeda pula. Misalnya, perspektif tanggung jawab lingkungan untuk perusahaan dalam industri keuangan dengan industri manufaktur adalah berbeda. Tanggung jawab lingkungan industri keuangan lebih ditunjukkan pada perspektif sosial, sedangkan untuk industri manufaktur lebih menekankan pada perspektif lingkungan hidup. Dengan demikian jika dua industri tersebut dinilai berdasarkan dimensi dan item yang sama, maka hasilnya tidak akan baik bagi perusahaan dalam industri tertentu. Tujuan yang lain dari penelitian ini sebagai berikut ini: a) Menentukan konsep yang mendasari perancangan instrumen GCG di Indonesia, b) Menentukan dimensi-dimensi, elemen-elemen, dan item-item GCG yang seharusnya ada untuk menentukan peringkat GCG di Indonesia, c) Menyusun instrumen untuk melakukan evaluasi keberadaan dan pelaksanaan GCG untuk masing-masing sektor industri berdasarkan informasi yang ditulis dalam laporan tahunan perusahaan sampel, d) Menentukan skor total setiap dimensi GCG, e) Menunjukkan bahwa tingkat kepentingan setiap dimensi GCG berbeda, sehingga bobot yang dilekatkan juga perlu berbeda, f) Menunjukkan bahwa tingkat dimensi GCG setiap industri akan berbeda, sehingga pemeringkatan perlu dilakukan berdasarkan instrumen yang berbeda untuk setiap industri.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Pemeringkatan GCG oleh IICG

Jika kita menelusuri kembali perjalanan program pemeringkatan GCG oleh IICG, maka ada tiga tahapan besar yang telah dilakukan oleh IICG berkaitan dengan pemeringkatan GCG perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pertama langkah awal pemeringkatan GCG dimulai tahun 2003; Kedua, pengembangan kuesioner kriteria evaluasi tahap 1 yang dilakukan mulai tahun 2003; pada tahun 2003 IICG menetapkan tujuh kriteria penting evaluasi GCG. Ketiga, pengembangan kuesioner kriteria evaluasi tahap 2. Tahapan perbaikan ketiga dilakukan oleh IICG pada tahun 2005. Dalam tahun 2005 IICG mengembangkan daftar kriteria evaluasi GCG yang terdiri atas sembilan kriteria penting.

Pada tahun 2002 topik GCG belum menarik untuk diteliti mahasiswa dan dosen di Indonesia. Belum banyak penelitian yang mengambil topik tentang GCG. Dalam Simposium Nasional Akuntan yang kelima (SNA 2001) di Semarang belum ada naskah penelitian mengenai GCG yang dipresentasikan. Pada Simposium Nasional Akuntansi tahun 2003 ada enam naskah yang berkaitan dengan GCG. Sampai sekarang topik GCG selalu mewarnai pelaksanaan SNA setiap tahun. Dari keseluruhan penelitian tentang GCG tersebut belum ada penelitian tentang penentuan validitas bobot skor GCG yang dilekatkan untuk masing-masing dimensi GCG.

Peneliti berpendapat bobot yang dilekatkan untuk masing-masing kriteria utama yang dilakukan oleh IICG sebanding dengan jumlah pertanyaan dan tidak dikembangkan berdasarkan karakteristik konstruk/kriteria GCG. Tentu saja validitas pembobotan dilekatkan untuk masing-masing dimensi yang digunakan oleh IICG masih belum mapan. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini agar menghasilkan bobot yang tepat untuk masing-masing kriteria utama penilaian GCG untuk masing-masing sektor industri.

Indeks GCG yang ditetapkan oleh IICG sendiri dilaksanakan mulai tahun 2003 dengan mengembangkan tujuh kriteria utama yang masing-masing akan dilekati dengan bobot tertentu. Kriteria utama tersebut adalah komitmen terhadap GCG, tata kelola dewan komisaris, komite-komite fungsional, dewan direksi, transparansi, hak pemegang saham, hubungan dengan stakeholders. Walaupun setiap tahunnya ada perubahan tema dalam metoda penilaian pemingkatan, namun pada intinya adalah sama, yaitu ada dimensi utama yang dijadikan patokan untuk menilai pemingkatan tersebut.

Sejak tahun 2003 Indonesian Institute of Corporate Governance membuat indeks penerapan GCG berdasarkan kuesioner. Kuesioner yang dikembangkan IICG terdiri atas 40 pertanyaan yang dibagi dalam tujuh kriteria utama. Bobot setiap dimensi didasarkan pada jumlah pertanyaan dalam kuesioner. Misalnya, bobot yang diberikan untuk setiap kriteria utama relatif sama. Bobot yang besar diberikan pada dimensi dewan komisaris sebesar 25 persen dan ini sesuai dengan jumlah pertanyaan yang lebih besar (sebanyak 20 pertanyaan). Dengan mudah seseorang akan berkesimpulan bahwa kriteria dewan komisaris sangat penting karena diberi bobot 25 persen. Kalau seperti itu kenyataannya tidak ada masalah. Namun bisa saja bobot tersebut dilekatkan karena jumlah pertanyaannya banyak.

Pengembangan dimensi evaluasi GCG oleh IICG hampir serupa dengan kriteria yang ditetapkan oleh Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA). CLSA melakukan pemingkatan dengan menggunakan tujuh kriteria utama, yaitu *management discipline, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, social responsibility*. Dari tujuh kriteria utama ini dibuat instrumen sebanyak 57 pertanyaan yang berhubungan dengan isu-isu penting corporate governance. Kuesioner didesain dengan alternatif jawaban "ya" atau "tidak". CLSA memberikan bobot yang relatif sama besar untuk masing-masing dimensi GCG. Meskipun jumlah pertanyaan yang dibangun dalam kuesioner berbeda namun CLSA mengasumsikan tingkat kepentingan masing-masing kriteria adalah sama. Efektivitas model GCG juga ditentukan oleh kesesuaian model yang dikembangkan dengan lingkungan yang berlaku. Perbedaan dalam praktik GCG antar negara dipengaruhi oleh lingkungan setiap negara (Kim and Hoskisson, 1997). Tidak ada satu model GCG yang dapat diaplikasikan secara efektif untuk semua lingkungan (*no one size fits all*) (OECD, 1998). Perspektif ini penting dalam pemingkatan GCG perusahaan di suatu negara.

Hubungan penerapan prinsip GCG dengan laporan keuangan telah diteliti. Hasil penelitian ini telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan prinsip GCG dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, et al., 1996; Wright, 1996). Chotourou, et al. (2001) menguji apakah praktik GCG mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan perusahaan.

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa penerapan prinsip GCG akan menghambat pemanipulasian laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Ada hubungan positif antara penerapan GCG dengan berkurangnya kecurangan (*fraud*) pelaporan keuangan (Peasnel, et al., 2001). Penelitian yang dilakukan McKinsey, seperti yang dikutip oleh Rafick (2002) dan Dipiazza, et al. (2002) menyatakan bahwa investor di negara-negara maju bersedia memberi premium yang cukup tinggi, mencapai sekitar 28 persen kepada perusahaan yang menerapkan prinsip GCG secara konsisten. Sebagai tambahan ditemukan bukti bahwa saham perusahaan-perusahaan tersebut menikmati valuasi pasar sampai dengan 10%-12%. Survei di enam emerging market menunjukkan penerapan GCG sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Bahkan ada pihak yang menganggap keterbukaan informasi GCG dipandang lebih penting oleh publik daripada informasi keuangan (Dipiazza and Eccles, 2002).

Riyanto (2005) menyatakan bahwa GCG merupakan mekanisme kontrol yang bisa mengawasi dan mengarahkan perilaku manajemen, agar mereka mengelola perusahaan secara transparan dan akuntabel bagi

peningkatan kinerja. GCG meliputi infrastruktur pengelolaan perusahaan, struktur pengelolaan perusahaan, struktur kepemilikan, dan faktor-faktor pendisiplinan pasar. Aspek-aspek yang dikemukakan oleh Riyanto (2005) ini jauh lebih mendalam daripada aspek utama yang dikemukakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance.

Ada sedikit perubahan pola dan cara pemeringkatan GCG oleh IICG pada tahun 2005. IICG menambah dua kriteria utama menjadi sembilan kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah komitmen terhadap tata kelola perusahaan; tata kelola dewan komisaris; komite-komite fungsional; dewan direksi; transparansi; perlakuan terhadap pemegang saham; peran pihak berkepentingan lainnya; integritas; dan independensi.

2.2 Kelemahan Persepsian Pemeringkatan GCG oleh IICG

Ada beberapa kelemahan pendekatan pemeringkatan GCG yang dilakukan oleh IICG: a) kurang jelas bangunan konseptual yang dipergunakan untuk menentukan pemeringkatan. Bangunan konsep harus ada sebelum membangun dimensi dan elemen untuk mengevaluasi GCG suatu perusahaan. Bangunan konsep akan memberikan dasar yang komprehensif untuk mengembangkan instrumen evaluasi GCG. Salah satu bangunan konsep yang dapat digunakan dalam pengembangan instrumen evaluasi GCG ini adalah corporate reporting supply chain. Oleh karena efektivitas penerapan GCG lebih dipengaruhi oleh tekanan dari luar, maka seharusnya instrumen evaluasi mempertimbangkan semua unsur dalam CRSC; b) pembobotan tidak memperhatikan tingkat pentingnya dimensi GCG; semua dimensi diasumsikan memiliki peran relatif sama; c) pemeringkat GCG berasumsi bahwa pelaksanaan GCG dalam setiap industri dan jenis perusahaan tidak berbeda; dan d) instrumen evaluasi penerapan GCG suatu perusahaan seharusnya memasukkan semua unsur yang mendukung penerapan GCG. Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan unsur-unsur instrumen berdasarkan bangunan konsep corporate reporting supply chain (CRSC).

Untuk melakukan pemeringkatan bangun konsep berpengaruh penting. Corporate governance bukan sekedar internal arrangement (Riyanto, 2005) saja, tetapi merupakan external driven process atau institutionalization. Berdasarkan konsep Internal arrangement GCG merupakan usaha pihak internal untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa sangat memperhatikan berbagai faktor pengelolaan yang baik. Berdasarkan pandangan ini GCG merupakan konsep yang ada karena kesadaran dari manajemen untuk menciptakannya, sehingga kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Konsep yang kedua memandang GCG merupakan tata kelola organisasi yang baik yang harus dilaksanakan karena dipaksa oleh pihak eksternal. Ada pemaksaan yang disertai pinalti melalui Undang-Undang dan tekanan dari pihak eksternal.

Pembobotan adalah proses menentukan tingkat kepentingan setiap faktor GCG. Penentuan besarnya bobot dapat ditentukan dengan menggunakan penalaran logis atau dengan melakukan penelitian. Pembobotan akan berpengaruh pada penentuan seberapa besar suatu elemen GCG membentuk skor atau peringkat GCG. Berdasarkan pemikiran logis faktor GCG yang penting adalah faktor yang menurut penalaran logis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemeringkatan GCG. Penalaran merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau asersi (Suwardjono 2005). Berdasarkan penalaran logis, pemeringkatan GCG harus melibatkan seluruh komponen corporate reporting supply chain (CRSC) suatu organisasi yang meliputi, manajemen, dewan komisaris, kantor akuntan publik (KAP) independen, analisis keuangan, penyusun standar akuntansi, pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan konsep ini, kualitas transparansi pelaporan keuangan suatu perusahaan merupakan tanggung jawab renteng semua partisipan dalam CRSC.

2.3 Evaluasi Pemeringkatan GCG Menggunakan Laporan Tahunan

Transparansi berarti adanya keterbukaan dari pihak manajemen perusahaan dalam menyajikan atau memberikan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi nonkeuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan tahunan yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan saja tetapi juga informasi penting lainnya dan hasil diskusi manajemen. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan, namun berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan. Transparansi

adalah tersedianya informasi yang akurat, relevan, dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh dengan kos yang rendah. Ada dua prinsip yang ditekankan dalam transparansi, yaitu: 1) pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya; dan 2) kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi penting secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Transparansi merupakan salah satu pondasi penting dari GCG yang mendorong manajemen perusahaan menyediakan informasi mengenai nilai (value) yang diciptakan dan dapat diperoleh oleh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya dari bisnis perusahaan. Laporan tahunan perusahaan dipergunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengomunikasikan informasi bisnis perusahaan, keuangan dan nonkeuangan kepada investor dan kreditor serta pemakai lainnya yang membutuhkan informasi tersebut (Susanto, 1992). Kualitas keputusan investasi oleh investor dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan (Chang, Most, and Brain, 1983).

Kualitas pengungkapan perusahaan juga berhubungan dengan harga saham, ukuran perusahaan, status terdaftar, profitabilitas, jenis industri, dan jumlah pemegang saham (Copeland and Fredericks, 1968; Cerf, 1961, Copeland and Fredericks, 1968; Singhvi and Desai, 1971, Buzby, 1974; Stanga, 1976). Barrett (1977) melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan dan tingkat kekomprehensifan laporan tahunan di negara-negara US, UK, Jepang, Swedia, Belanda, Jerman Barat, dan Perancis.

Barrett (1977) mengonfirmasi bahwa ada hubungan positif antara tingkat pengungkapan keuangan dan tingkat efisiensi pasar modal nasional. Penelitian mengenai pengungkapan laporan keuangan terkait juga dengan berbagai topik yang lain, seperti pengungkapan sukarela dan social responsibility disclosure (Firth 1980, Verrechia, 1983, Meek and Gray, 1989; Teoh and Thong 1984; dan Ferreri and Parker 1987). Manajemen yang baik dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek transparansi. Pelaporan keuangan yang baik akan tercermin pada tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan (Dipiazza dan Eccles, 2002). Dengan demikian, pengungkapan informasi merupakan salah satu ukuran baik tidaknya suatu manajemen perusahaan.

Apakah pemegang saham menggunakan laporan tahunan? Pertanyaan ini menyangkut dua aspek penelitian. Pertama, berhubungan dengan Efficient Market Hypothesis (EMH) yang menyatakan bahwa laporan tahunan dikeluarkan terlambat untuk digunakan oleh pemegang saham dalam membuat keputusan. Kedua, berhubungan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa investor menggunakan laporan tahunan. Dua aspek penelitian ini tentu saja bertentangan (Hines, 1982). Implikasi dari EMH adalah laporan tahunan tidak dapat digunakan untuk menghasilkan laba abnormal. Implikasi ini didukung oleh dua alasan, yaitu: a) laporan tahunan berisi informasi yang tersedia secara publik; b) isi laporan tahunan sudah disampaikan ke pasar lebih tepat waktu, dan kebanyakan isi laporan tahunan sudah diantisipasi oleh pasar dengan informasi yang berasal dari sumber yang lain (Hines, 1982).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan tahunan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Manajemen akan mengungkapkan semua informasi yang dipandang penting bagi investor dan pihak lain. Dengan demikian laporan tahunan akan berisi semua tindakan manajemen dalam pengelolaan bisnis perusahaan termasuk juga pelaksanaan GCG. Seharusnya laporan tahunan perusahaan berisi aktivitas GCG yang benar-benar dilaksanakan, sehingga laporan tahunan dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi tindakan corporate governance perusahaan.

2.3 Pengaruh Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan

Lei and Teen (2007) menyatakan bahwa untuk menentukan apakah GCG tercermin dalam kinerja perusahaan atau penilaian pasar adalah dengan meregresi Tobin's Q atau ROA pada berbagai dimensi GCG. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja perusahaan dengan GCG. Salah satu cara untuk menentukan besarnya bobot pengaruh masing-masing faktor GCG adalah dengan meregresi berbagai faktor pembentuk skor GCG pada ukuran kinerja perusahaan. Namun perlu diingat belum tentu penerapan GCG langsung mempengaruhi kinerja organisasi dalam jangka pendek. Artinya kinerja organisasi adalah ukuran terbaik dari berbagai ukuran terburuk yang dimiliki untuk menentukan efektivitas penerapan GCG.

Kinerja organisasi merupakan ukuran pencapaian pelaksanaan GCG jangka panjang. Salah satu tujuan penerapan GCG adalah mencapai kinerja yang optimal. Pembobotan setiap faktor GCG seharusnya didasarkan pada level kepentingan masing-masing faktor GCG. Level kepentingan masing-masing faktor ditentukan oleh besarnya dan signifikansi hubungan setiap faktor dengan ukuran kinerja organisasi.

Bhagat dan Black (2002) menemukan bukti perusahaan yang profitabilitasnya rendah merespon dengan meningkatkan jumlah dewan komisaris independennya. Namun, tidak ada bukti bahwa perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak akan menaikkan profitabilitas perusahaan. Aktivitas dewan komisaris yang tinggi berhubungan kuat dengan kinerja operasi perusahaan (Vafeas, 1999).

Penelitian dibidang GCG tidak memberikan hasil yang konklusif. Demsetz and Villalonga (2001) tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara faktor kepemilikan dengan kinerja. Namun Vafeas and Theodoru (1998) menemukan hubungan yang signifikan antara kepemilikan managerial dan komposisi dewan komisaris dengan kinerja perusahaan.

Teori ekonomi menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ungkapan akan semakin rendah asimetri informasi (Glosten and Milgrom, 1985; Diamond and Verrecchia, 1991). Pengungkapan informasi yang lebih banyak akan menyebabkan tingkat akurasi lebih tinggi dan taksiran laba menjadi lebih sedikit macamnya (Lang dan Lundholm, 1996). Botosan (1997) dan Botosan dan Plumlee (2002) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi yang tinggi dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap CEC. Sengupta (1998) menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengungkap informasi lebih banyak akan membayar biaya penerbitan utang yang lebih murah. Konsekuensi ekonomi merupakan tindakan pendisiplinan oleh pasar. Tingkat pengungkapan sukarela berpengaruh negatif terhadap bentang tawar-minta, dan berpengaruh positif terhadap volume perdagangan, serta berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham (Hapsoro, 2005).

Salah satu faktor yang mendorong kinerja perusahaan adalah komposisi kepemilikan institusi. Kepemilikan institusi dapat merupakan institusi asing dan institusi domestik. Kepemilikan mayoritas asing akan lebih diharapkan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil penelitian Gunarsih (2002) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. Namun Hapsoro (2005) tidak mendukung hasil penelitian ini. Penelitian Hapsoro (2005) menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan manajemen, proporsi kepemilikan institusi domestik, proporsi kepemilikan institusi asing berpengaruh terhadap tingkat transparansi perusahaan. Namun untuk proporsi kepemilikan publik secara statistik berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan perusahaan, dan berpengaruh negatif terhadap tingkat ketidaktaatan pengungkapan informasi wajib, serta berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan perusahaan lebih dipicu oleh regulasi pemerintah daripada kesadaran sendiri perusahaan. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung teori institusional yang menyatakan bahwa GCG merupakan hasil tekanan lingkungan yang mendorong organisasi untuk lebih transparan, responsibel, dan bertanggung jawab terhadap tindakan bisnis yang dilaksanakannya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Ada empat tahapan besar pengembangan indeks GCG dalam penelitian ini, yaitu: a) pengembangan dimensi, elemen, dan item indeks GCG, serta instrumen berdasarkan konsep CRSC, b) identifikasi item GCG dan penentuan indeks GCG, c) penentuan efektivitas indeks GCG, dan d) penentuan bobot dimensi GCG.

3.2 Pengembangan Dimensi Utama GCG Indonesia

Tahap pertama adalah tahap pengembangan dimensi utama GCG. Dimensi-dimensi penting ini akan digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen serta item-item penting yang akan dimasukkan ke dalam daftar kriteria GCG. Untuk menentukan dimensi kriteria GCG perlu menentukan konsep yang relatif luas dan benar sehingga dapat diidentifikasi elemen dan item-item yang tepat pula. Dalam penelitian ini penurunan dimensi, elemen dan item-item menggunakan konsep corporate reporting supply chain (CRSC) sebagai konsep berpikir untuk mengembangkan dimensi kriteria GCG.

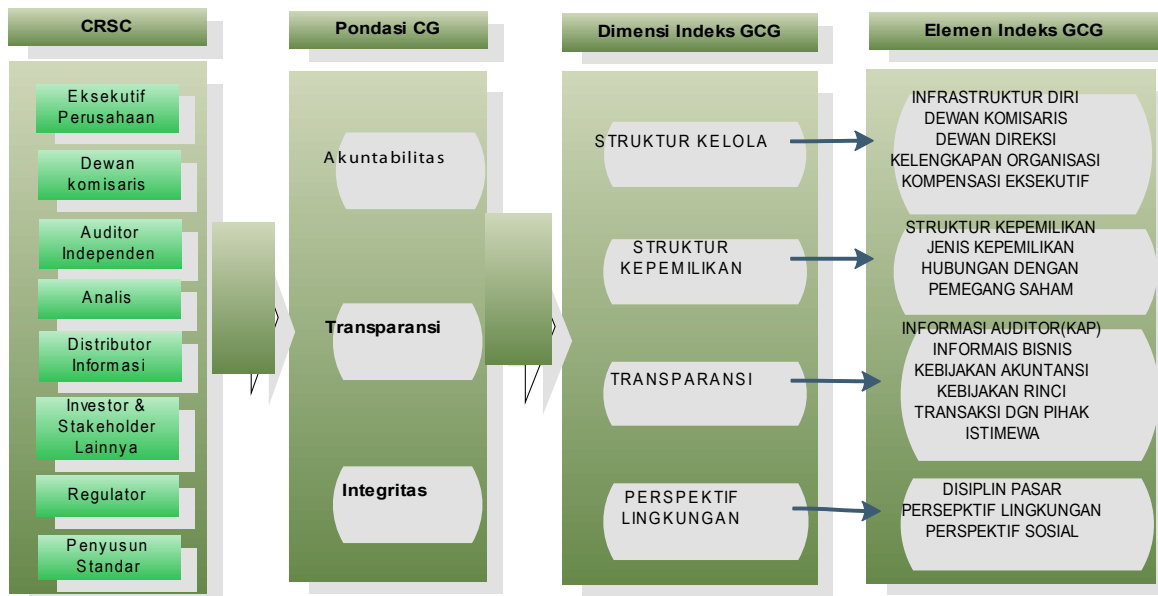
Konsep Corporate Reporting Supply Chain (CRSC) dan GCG. CRSC merupakan penalaran logis atas peningkatan GCG suatu perusahaan. Bisnis perusahaan tidak berdiri sendiri dan terkait dengan lingkungan disekitarnya, bahkan diatur oleh lingkungannya. Bisnis perusahaan berkaitan dengan banyak pihak yang berkepentingan. Ada beberapa pihak yang berkepentingan dengan bisnis suatu perusahaan, seperti investor, bank, konsumen, karyawan, pemasok, dan agen pemerintah. Komunikasi antara bisnis perusahaan dengan pemangku kepentingan lebih banyak dilakukan melalui sistem pelaporan (reporting system) perusahaan. Sebagian besar pemangku kepentingan tersebut berada di luar perusahaan dan membuat keputusan ekonomi menggunakan laporan keuangan. Apakah informasi yang disampaikan perusahaan dapat dipercaya oleh publik? Public trust merupakan faktor penting bagi bisnis. Public trust akan mendukung aliran masuk modal ke dalam bisnis perusahaan. Berdasarkan konsep CRSC, GCG akan efektif jika semua komponen yang terkait dalam rantai pelaporan berfungsi efektif melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Manajemen bukanlah pihak yang secara sadar memiliki integritas yang utuh. Oleh karena itu dibutuhkan pihak lain yang mengawasi operasi manajemen.

Untuk menjamin GCG dilaksanakan secara efektif, maka CRSC perlu dievaluasi. Pengevaluasian dimulai dari manajemen perusahaan yang secara langsung melaksanakan GCG. Manajemen memiliki berbagai komponen yang mendukung pelaksanaan GCG. Komponen CRSC kedua adalah dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan wakil para pemegang saham yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG. Komponen yang lain adalah auditor. Auditor memberikan pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Elemen yang lain dari CRSC adalah regulator. Regulator berfungsi sebagai penyusun regulasi. Contoh regulator adalah BAPEPAM dan BEJ. Elemen regulator ini ditunjukkan dengan pelaksanaan berbagai ketentuan yang telah disahkan oleh regulator oleh manajemen. Konsep corporate reporting supply chain menjelaskan tujuan pelaksanaan GCG adalah kepercayaan. Kesuksesan perusahaan merupakan konsekuensi dari kepercayaan publik (public trust). Untuk bisa dipercaya suatu entitas harus memiliki tiga karakteristik penting, yaitu: a) spirit of transparency, b) culture of accountability, dan c) people of integrity (Dipiazza and Eccles, 2002, p.3-6).

Saat ini pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain meminta perusahaan agar lebih transparan kepada publik. Transparansi diperlukan untuk menciptakan dan melindungi value. Transparansi juga akan mendorong dan meningkatkan proses alokasi modal. Penyediaan informasi secara lebih transparan tidaklah cukup. Transparansi harus diimbangi dengan komitmen perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas pihak-pihak yang terkait dalam CRSC. Pengembangan Indeks peringkat GCG seharusnya juga mempertimbangkan berbagai unsur dalam CRSC. Semua unsur dalam CRSC yang mendukung penerapan GCG yang berkualitas seharusnya dimasukkan dalam instrumen yang dipergunakan untuk mengevaluasi GCG suatu entitas bisnis. Konsep pengembangan kriteria evaluasi GCG ditunjukkan pada Gambar 1.

Tahap pengembangan dimensi adalah tahapan yang berkaitan dengan penentuan konstruk-konstruk penting penerapan GCG yang akan digunakan sebagai kriteria evaluasi GCG. Pengembangan konstruk kriteria GCG dibuat berdasarkan kajian literatur, hasil penelitian GCG, analisis terhadap item GCG, dan konstruk-konstruk GCG telah ada, misalnya yang telah dikembangkan oleh Center of Good Corporate Governance (CGCG) UGM, IICG, dan Standard & Poor's.

Penelitian ini mengevaluasi instrumen yang telah dikembangkan oleh Standard & Poor's. Penelitian ini melakukan penyesuaian dan pengembangan dimensi-dimensi dan item-item yang baru berdasarkan instrumen yang telah dikembangkan oleh Standard & Poor's, selanjutnya disesuaikan dengan kondisi dan sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Evaluasi instrumen juga dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur dan analisis berbagai hasil penelitian tentang GCG. Penelitian ini memilih empat dimensi GCG yang cukup penting dalam penerapan dan pencapaian tujuan GCG. Empat dimensi tersebut adalah struktur pengelolaan, struktur kepemilikan, transparansi, dan perspektif lingkungan perusahaan. Tabel 1 menjelaskan definisi masing-masing dimensi kriteria GCG.



Gambar 1.
Konsep Pengembangan Kriteria Evaluasi GCG (CRSC)

Tabel 1
Definisi Dimensi GCG

Dimensi/Kriteria	Definisi
Struktur Pengelolaan	Berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah dan lembaga pemerintah yang menyangkut pendirian dan pengelolaan suatu perusahaan. Infrastruktur berhubungan dengan ketentuan pendirian perusahaan dan ketentuan perlunya komisaris yang independen diukur dari komposisi boards, komposisi audit committee, internal audit, dan external audit. Penjelasan tentang dewan komisaris, kelengkapan organisasi, dan kompensasi eksekutif dan evaluasi.
Struktur Kepemilikan	Berkaitan dengan karakteristik kepemilikan perusahaan, konsentrasi kepemilikan dan jenis kepemilikan, seperti investor institusional, kepemilikan asing, cross-ownership, dan manager-owners dan transparansi kepemilikan.
Transparansi	Merupakan tingkat keterbukaan informasi perusahaan, transparansi keuangan, akuntansi, dan auditor. Informasi tentang KAP, informasi kebijakan akuntansi, dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Perspektif Lingkungan	Perspektif lingkungan (PL) berhubungan dengan pendisiplinan pasar yang terkait dengan tindakan pendisiplinan oleh pihak luar. Pendisiplinan pasar diukur berbagai transaksi yang mendorong pendisiplinan perusahaan; selain itu PL juga mengukur partisipasi perusahaan dalam mengelola lingkungan; PL juga mengukur dimensi yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, iritasi, atau risiko dalam lingkungan kerja, mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental, mengungkapkan statistik kecelakaan kerja, mengungkapkan pelayanan kesehatan kerja, hal-hal yang manusiawi berkaitan dengan ketenagakerjaan, pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan, membuat produk lebih aman untuk konsumen, melaksanakan penelitian atas tingkat keselamatan produk perusahaan, keterlibatan masyarakat.

Setiap dimensi dibentuk oleh beberapa elemen dan setiap elemen terdiri atas item-item. Elemen atau item diturunkan dari model berpikir yang ditunjukkan dalam gambar 1. Dimensi struktur pengelolaan perusahaan (struktur kelola) dibentuk oleh 5 elemen GCG yaitu infrastruktur diri, infrastruktur dewan komisaris, struktur dewan direksi, struktur kelengkapan organisasi, dan struktur kompensasi eksekutif. Dimensi struktur kepemilikan dibentuk oleh tiga elemen, yaitu struktur kepemilikan, jenis pemilikan, dan hubungan dengan pemegang saham. Dimensi transparansi dibentuk oleh lima elemen, yaitu informasi auditor (KAP), informasi bisnis, kebijakan akuntansi, kebijakan akuntansi rinci, dan transaksi dengan pihak hubungan istimewa. Dimensi perspektif lingkungan dibentuk oleh 3 elemen.

Semua dimensi, elemen, dan item-item GCG dimasukkan dalam daftar kriteria GCG yang akan dipergunakan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari laporan tahun perusahaan-perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian. Hasil pengembangan daftar kriteria GCG terdiri atas 4 dimensi, 16 elemen, dan 139 item. Tabel 2. menunjukkan daftar dimensi, elemen, dan item yang ada dalam daftar kriteria GCG.

Tabel 2
Daftar Dimensi dan Elemen GCG

No.	Dimensi	Elemen	Jumlah
1.	Dimensi Struktur Kelola	Infrastruktur diri	6
		Infrastruktur dewan komisaris	5
		Struktur dewan direksi	9
		Struktur kelengkapan organisasi	18
		Struktur kompensasi eskektif	8
2.	Dimensi Struktur Kepemilikan	Struktur kepemilikan	12
		Jenis pemilikan	8
		Hubungan dengan pemegang saham	5
3.	Dimensi Transparansi	Informasi auditor (KAP)	8
		Informasi bisnis	18
		Kebijakan akuntansi	7
		Kebijakan akuntansi rinci	7
		Transaksi dengan pihak hubungan istimewa	4
4.	Dimensi Perspektif Lingkungan	Disiplin pasar	10
		Perspektif lingkungan	7
		Perspektif sosial	7
Total	4 dimensi	16 elemen	139 item

Sumber: data primer

3.3 Identifikasi Item-Item Dimensi dalam Laporan Tahunan Perusahaan

Tahap kedua adalah tahap identifikasi item-item GCG dan penentuan Indeks GCG. Dalam tahapan ini dilakukan aktivitas mengidentifikasi berbagai item kriteria penerapan GCG dalam laporan tahunan suatu perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan/keterlaksanaan/ keterpenuhian berbagai unsur yang ada dalam daftar kriteri GCG. Pengidentifikasi GCG dilakukan dengan cara memberi nilai "1" untuk unsur yang ada/dilaksanakan/memenuhi kriteri dan "0" untuk unsur yang tidak ada/tidak dilaksanakan/tidak memenuhi kriteria. Hasil identifikasi item-item akan menghasilkan total nilai setiap elemen. Total nilai setiap elemen akan membentuk total nilai atau skor GCG.

Penentuan Indeks GCG. Indeks dimensi GCG ditentukan dengan menjumlahkan indeks setiap elemen untuk masing-masing dimensi terkait. Selanjutnya total skor dimensi dibagi dengan skor total dimensi dikali 100%. Indeks GCG merupakan total indeks keseluruhan dimensi GCG masing-masing perusahaan. Skor dimensi GCG

dihitung sebagai berikut ini:

$$\text{Indeks Dimensi GCG} = \frac{\text{Skor}_{\text{Dimensi}} \text{ Capaian}}{\text{Skor}_{\text{Dimensi}} \text{ Harapan}} \times 100$$

$$\text{Indeks Total GCG} = \sum_{i=1}^n \text{Skor}_{\text{Dimensi}} \text{ GCG}_i$$

3.4 Penentuan Efektivitas Indeks GCG

Efektivitas setiap kriteria yang dipakai dalam evaluasi GCG suatu perusahaan seharusnya diukur berdasarkan kekuatan hubungan antara setiap unsur tersebut dengan suatu besar dependen tertentu, yaitu kinerja organisasi. GCG juga seharusnya mampu mendorong penciptaan kepercayaan publik kepada perusahaan. Kepercayaan publik inilah yang akan mendorong pencapaian kinerja organisasi. Reputasi dan kinerja organisasi merupakan bentuk konsekuensi logis dari kepercayaan publik. Dengan melakukan pengujian secara sistematis dan logis mengenai kekuatan hubungan masing-masing dimensi GCG terhadap kinerja organisasi, maka dihasilkan suatu level kepentingan setiap dimensi GCG. Seharusnya penentuan bobot setiap dimensi GCG dalam pemeringkatan GCG tidak akan berbeda jauh dari hasil pemikiran logis atau pengujian ilmiah yang dilakukan.

Pengujian validitas model indeks untuk setiap kriteria yang dibangun dilakukan dengan meregresi indeks masing-masing kriteria utama pada variabel kinerja organisasi yang diprosikan oleh ukuran ROA. Laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dipengaruhi pula oleh ukuran aset yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Namun, ROA bukan merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengukur efektivitas penerapan GCG. Hal ini disebabkan karena tidak semua unsur GCG berpengaruh secara langsung pada kinerja perusahaan yang diukur dengan laba.

Ada lima model penelitian yang akan diinvestigasi dalam penelitian ini, yaitu: menguji pengaruh indeks dimensi good corporate governance, menguji pengaruh indeks dimensi good corporate governance dan variabel industri terhadap ukuran kinerja (ROA); dan menguji pengaruh indeks dimensi good corporate governance, industri, dan variabel kontrol (ukuran perusahaan dan leverage) terhadap kinerja perusahaan, dan menguji indeks total GCG terhadap ukuran kinerja (ROA). Hubungan statistik ditunjukkan sebagai fungsi regresi linear yang dimodelkan sebagai berikut:

$$\text{KIN} = \alpha_0 + \beta_1 \text{STRULOLA} + \beta_2 \text{STRUMLK} + \beta_3 \text{TRANS} + \beta_5 \text{PERLING} + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{KIN} = \alpha_0 + \beta_1 \text{STRULOLA} + \beta_2 \text{STRUMLK} + \beta_3 \text{TRANS} + \beta_4 \text{PERLING} + \alpha_5 \text{INDUS} + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

$$\text{KIN} = \alpha_0 + \beta_1 \text{STRULOLA} + \beta_2 \text{STRUMLK} + \beta_3 \text{TRANS} + \beta_4 \text{PERLING} + \alpha_7 \text{INDUS} + \alpha_8 \text{UKUR} + \alpha_9 \text{LEVERAGE} + \varepsilon \dots\dots\dots (3)$$

$$\text{KIN} = \alpha_0 + \beta_1 \text{IGCG} + \beta_2 \text{INDUS} + \beta_3 \text{UKUR} + \beta_4 \text{LEVERAGE} + \varepsilon \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{IGCGI} = \alpha_0 + \beta_1 \text{INDUS} + \beta_2 \text{UKUR} + \beta_3 \text{LEVERAGE} + \varepsilon \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

IGCGI : Indeks Good Corporate Governance Indonesia (diukur dari daftar kriteria yang telah dikembangkan dalam penelitian ini)

KIN: Kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA, yaitu Laba Bersih/Aset Total

STRULOLA : Struktur pengelolaan perusahaan

STRUMLK : Struktur kepemilikan
PERLING : Perspektif lingkungan

Variabel Kontrol:

INDUS = Kelompok industri; industri keuangan dan nonkeuangan; dummy variable 1 untuk industri keuangan dan 0 untuk industri nonkeuangan;
UKUR = Ukuran perusahaan yang diukur dengan aset total;
LEVERAGE = Utang total.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Tahapan Pengujian dan Pemaparan Hasil Analisis

Pengujian pertama dilakukan dengan analisis deskriptif. Dalam tahapan ini penelitian akan menunjukkan deskripsi data penelitian setiap tahun tentang karakteristik kriteria pada setiap tahun dalam periode penelitian. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran rinci mengenai data sampel selama periode penelitian. Tahap kedua adalah menentukan koefisien korelasi masing-masing variabel kriteria GCG. Tahapan ini untuk mengetahui apakah variabel tertentu bertindak sebagai komplemen atau proksi kriteria yang lain. Tahapan ketiga adalah pengujian validitas model indeks. Sebelum melakukan pengujian validitas penelitian ini akan menentukan besarnya indeks GCG dengan menjumlah seluruh item. Selanjutnya total indeks untuk setiap perusahaan pada tahun tertentu selama periode penelitian diklasifikasi menurut jumlah indeks yang terjadi. Proses ini perlu dilakukan untuk menghindari bias ukuran kecil sampel penelitian, ketika melakukan pengujian validitas kriteria indeks GCG. Tahapan pengujian model indeks dilakukan dengan menguji variabel-variabel kriteria utama GCG terhadap kinerja organisasi. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS).

4.2 Deskripsi Data dan Sampel

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang mengikuti program peningkatan GCG yang dilaksanakan oleh IICG dari tahun 2002 sampai dengan 2008. Akan tetapi untuk tahun 2006 IICG tidak melakukan peningkatan, sehingga data penelitian berasal dari hasil peningkatan pada tahun 2002 sampai dengan 2008 saja. Perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Tidak semua perusahaan yang mengikuti program peningkatan GCG adalah perusahaan publik. Hal ini perlu ditekankan karena identifikasi item GCG ini dilakukan atas laporan tahunan yang diwajibkan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Daftar perusahaan yang mengikuti program peningkatan oleh IICG diperoleh dari Majalah SWAsembada (No. 4/XX/ 19/2-3/3'04; No. 9/XXI/28/4-4/5'05; No. 26/XXII/11/12-20/12'06; No.1/XXIV/9/1-23/1'08) dan laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di BEI.

Untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat perbedaan hubungan antara dimensi-dimensi GCG dengan kinerja setiap industri, sampel penelitian akan dikelompokkan berdasarkan dua kelompok industri, yaitu kelompok industri keuangan dan kelompok industri nonkeuangan. Tabel 3 menjelaskan komposisi perusahaan-perusahaan yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 3
Sampel Penelitian

Tahun	Total Sampel	Sektor Keuangan	Sektor Nonkeuangan
2002	9	4	5
2003	15	7	8
2004	16	8	8
2005	9	2	7
2007	18	6	12

TOTAL

67

27

40

Sumber: data primer

Pemilihan sampel dilakukan dengan mengeluarkan perusahaan-perusahaan yang bukan perusahaan yang terdaftar di BEI, tidak menerbitkan laporan tahunan, dan data keuangan yang tidak lengkap diperoleh sampel total yang terdiri atas 67 perusahaan yang terdaftar mengikuti kompetisi peringkat GCG oleh IICG sejak tahun 2002 sampai dengan 2007. Sampel terdiri atas 27 perusahaan dari sektor keuangan dan 40 perusahaan dari industri sektor nonkeuangan. Sebagian besar sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang menjadi pemenang sepuluh besar dalam program pemeringkatan IICG tersebut. Dengan memilih sampel ini, hasil penelitian seharusnya menunjukkan kualitas GCG yang tinggi sebab perusahaan-perusahaan yang diteliti adalah perusahaan-perusahaan yang berusaha menerapkan GCG secara baik.

Pada umumnya dimensi-dimensi GCG tidak memiliki hubungan secara langsung dengan ukuran kinerja perusahaan yang diukur dengan ukuran-ukuran kuantitatif, khususnya ukuran-ukuran akuntansi. Penerapan GCG dalam perusahaan tidak berdampak langsung terhadap kinerja perusahaan ketika program GCG tersebut diterapkan, tetapi dampaknya bisa dirasakan setelah diterapkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Sepintas diamati secara implisit tujuan perusahaan-perusahaan peserta program ini tidak untuk menjamin bahwa mereka menerapkan program GCG dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Perusahaan-perusahaan peserta program IICG secara implisit ingin mendapatkan publisitas bahwa mereka mampu melaporkan praktik GCG dalam perusahaan mereka. Pertanyaannya adalah jika struktur GCG tersedia, apakah struktur tersebut berfungsi efektif? Jangan-jangan struktur GCG tersebut hanya ada di atas kertas dan ketika akan mengikuti program pemeringkatan saja. Sangat mungkin terjadi, keikutsertaan sebuah perusahaan dalam program pemeringkatan GCG hanya untuk tujuan jangka pendek yaitu melegitimasi bahwa perusahaan tersebut telah memiliki struktur GCG meskipun belum tentu diaplikasikan secara efektif.

Jika tujuan penelitian adalah menguji pengaruh dimensi-dimensi GCG terhadap kinerja organisasi, kemungkinan tidak ada pengaruh yang signifikan. Jika hasil tabulasi data diamati secara cermat, kebanyakan perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini memiliki skor GCG yang baik. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menguji pengaruh masing-masing dimensi GCG terhadap kinerja organisasi.

Tabel 4
Rata-rata Skor/Indeks Masing-Masing Dimensi GCG

TAHUN	JUMLAH	KEUANGAN	NONKEU.	STRULOLA	STRUMLK	TRANS	PERLING	SKOR
2002	9	4	5	80	87	65	62	293
2003	15	7	8	82	92	67	58	299
2004	16	8	8	88	92	69	63	312
2005	9	2	7	95	97	71	69	333
2007	18	6	12	93	94	72	66	324
TOTAL	67	27	40	88	93	69	63	313

Sumber: data primer

Keterangan:

STRULOLA = struktur pengelolaan; STRUMLK = struktur kepemilikan; TRANS = transparansi; PERLING = perspektif lingkungan

Tabel 4 menunjukkan rata-rata skor/indeks untuk masing-masing dimensi setiap tahun dari 2002 sampai dengan 2007 (kecuali 2006). Indeks masing-masing dimensi GCG dan indeks total GCG meningkat dari tahun ke tahun. Banyak item-item yang informasinya disediakan perusahaan dalam laporan tahunannya. Hal ini disebabkan

karena sampel penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang mengikuti program peningkatan GCG. Selain itu, instrumen atau daftar item GCG untuk penelitian ini disusun berdasarkan informasi terkini, sehingga banyak peserta program peningkatan yang memiliki skor dimensi GCG yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Apakah ada perbedaan skor dimensi GCG untuk masing-masing sektor industri? Untuk itu peneliti mengklasifikasi data penelitian menjadi kelompok industri keuangan dan nonkeuangan. Tabel 8 menunjukkan skor untuk masing-masing dimensi GCG per sektor industri. Sampel penelitian terdiri atas 40 perusahaan dari sektor nonkeuangan dan 27 perusahaan dari sektor keuangan. Rata-rata indeks/skor masing-masing dimensi GCG untuk sektor nonkeuangan per tahun relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor keuangan. Hal ini bisa terjadi karena sektor keuangan merupakan industri dengan regulasi yang ketat, sehingga item-item GCG merupakan aktivitas yang melekat dalam perusahaan di sektor keuangan. Akan tetapi, tetap terjadi peningkatan indeks setiap dimensi dan skor GCG dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, baik untuk sektor keuangan maupun untuk sektor nonkeuangan.

Tabel 5
Rata-rata Skor Masing-Masing Dimensi GCG per Industri per Tahun

TAHUN	INDUS	STRULOLA	STRUMLK	TRANS	PERLING	SKOR
SEKTOR NONKEUANGAN	2002	71	83	63	61	279
	2003	75	91	67	57	291
	2004	93	92	73	64	322
	2005	93	96	71	70	332
	2007	91	95	72	65	322
SEKTOR KEUANGAN	2002	87	90	66	62	304
	2003	91	93	67	58	308
	2004	84	92	65	61	302
	2005	99	100	72	67	337
	2007	97	93	71	68	328

Tabel 6 mendeskripsikan nilai penjualan, utang total, ekuitas total, aset tetap, laba usaha, laba bersih untuk sektor nonkeuangan. Nilai penjualan perusahaan dalam sektor nonkeuangan mengalami penurunan dari tahun 2002 sampai dengan 2004, namun meningkat kembali pada tahun 2005 dan menurun lagi pada tahun 2007. Untuk ROA dan ROE terjadi peningkatan pada tahun 2003 dan 2005. Berbeda dengan kinerja keuangan untuk industri keuangan, kinerja keuangan bergerak naik dan turun dari tahun ke tahun. Untuk ROA dan ROE tetap bergerak naik-turun. Rata-rata aset dan utang perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan industri nonkeuangan. Penurunan kinerja pada sektor keuangan bisa disebabkan karena nilai aset dan utang perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan relatif tinggi.

Tabel 6
Rata-rata Ukuran Kinerja Keuangan per Industri

INDUSTRI	SEKTOR NONKEUANGAN					
	TAHUN	2002	2003	2004	2005	2007
JUMLAH SAMPEL		5	8	8	7	12
PENJUALAN TOTAL		10.331.851	5.433.574	6.772.191	19.907.113	4.517.034
UTANG TOTAL		5.679.487	4.591.283	4.684.477	15.667.810	4.195.130
EKUITAS TOTAL		2.309.098	3.583.688	3.117.797	10.780.625	2.792.843

ASET TOTAL	7.988.585	8.174.972	7.802.273	26.448.435	6.987.973
LABA USAHA	1.210.396	786.908	805.380	4.768.816	1.085.813
LABA BERSIH	1.243.839	1.381.795	833.207	2.625.128	720.475
LAMA TERDAFTAR_BEI	14	9	7	12	10
RETURN ON ASSET	18,2	8,6	6,0	9,5	8,6
RETURN ON EQUITY	48,2	19,4	15,9	21,6	17,9

INDUSTRI	SEKTOR KEUANGAN				
	2002	2003	2004	2005	2007
JUMLAH SAMPEL	4	7	8	2	6
PENJUALAN TOTAL	7.857.852	9.143.967	8.576.344	13.850.857	10.120.213
UTANG TOTAL	54.013.476	74.434.029	73.466.338	138.891.349	94.661.291
EKUITAS TOTAL	4.981.497	6.686.891	8.362.677	13.590.256	10.023.551
ASET TOTAL	58.994.973	81.120.920	81.829.014	152.481.605	104.684.842
LABA USAHA	1.259.282	1.582.622	2.855.513	957.097	1.646.934
LABA BERSIH	1.208.917	1.260.273	2.085.732	575.461	1.163.065
LAMA TERDAFTAR_BEI	8	8	10	9	13
RETURN ON ASSET	3,1	1,7	2,6	0,8	2,2
RETURN ON EQUITY	21,6	18,1	27,0	8,2	12,0

Sumber: Data Primer diolah

4.3 Pemingkatan Perusahaan

Penelitian ini mencoba membuat pemeringkatan sederhana dengan membagi indeks ke dalam tiga kelompok tingkat kepercayaan. Klasifikasi keterpercayaan GCG perusahaan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu cukup terpercaya (CT), terpercaya (T), dan sangat terpercaya (ST). Perusahaan diklasifikasi CT jika indeks GCG kurang dari nilai rata-rata indeks GCG dikurangi 0,5 deviasi standar atau sebesar 296. Perusahaan akan diklasifikasi T jika indeks GCG-nya di antara nilai rata-rata indeks GCG dikurangi 0,5 deviasi standar atau 296 dan nilai rata-rata indeks GCG ditambah 0,5 deviasi standar atau 330. Perusahaan akan diklasifikasi ST jika indeks GCG-nya berada di atas nilai rata-rata indeks GCG ditambah 0,5 deviasi standar atau sebesar 330 poin.

Tabel 10.a. menjelaskan jumlah perusahaan yang masuk dalam setiap kategori GCG, cukup terpercaya (CT), terpercaya (T), dan sangat terpercaya (ST). Perusahaan yang masuk dalam kategori CT jumlahnya menurun dari tahun 2002 sampai 2007; untuk klasifikasi T dan ST terjadi sebaliknya, jumlahnya justru semakin meningkat. Hal ini menunjukkan semakin banyak perusahaan yang menyadari dan berusaha memenuhi kriteria GCG mulai tahun 2005. Jika diteliti lebih lanjut komposisi CT, T, dan ST untuk masing-masing sektor industri dapat ditunjukkan dalam Tabel 10.a. Perusahaan dalam industri keuangan dan nonkeuangan semakin sedikit yang masuk dalam klasifikasi CT dan klasifikasi T. Perusahaan-perusahaan yang ada diklasifikasi CT dan T semakin lama bergeser masuk dalam klasifikasi ST. Namun perlu diingat bahwa komposisi perusahaan yang mengikuti program IICG ini tidak selalu konsisten.

Tabel 7
Klasifikasi Skor GCG Total (CT, T, dan ST)

INDUSTRI	2002		2003		2004		2005		2007	
	K	NK	K	NK	K	NK	K	NK	K	NK
CUKUP TERPERCAYA (CT)	2	3	2	4	1	1	-	1	0	2
TERPERCAYA (T)	2	-	5	3	3	3	-	-	2	3
SANGAT TERPERCAYA (ST)	1	1	-	1	4	4	2	6	4	7
JUMLAH PER SEKTOR	5	4	7	8	8	8	2	7	6	12
TOTAL	9		15		16		9		18	

Keterangan: K = Keuangan; NK = Nonkeuangan

Tabel 11 menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan yang masuk ke dalam klasifikasi sangat terpercaya semakin besar, sedangkan perusahaan yang masuk dalam klasifikasi cukup terpercaya dan terpercaya jumlahnya semakin menurun.

Tabel 8
Jumlah Perusahaan per Klasifikasi/tahun

TAHUN	CUKUP		SANGAT	TOTAL
	TERPERCAYA	TERPERCAYA	TERPERCAYA	
2002	5	2	2	9
2003	6	8	1	15
2004	2	6	8	16
2005	1	0	8	9
2007	2	5	11	18
TOTAL	16	21	30	67

Tabel 9 menjelaskan karakteristik kinerja keuangan perusahaan-perusahaan sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan yang masuk kategori CT memiliki kinerja yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori T dan ST. Perusahaan klasifikasi ST memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dalam klasifikasi T. Namun, untuk rasio ROA dan ROE, perusahaan-perusahaan dalam klasifikasi T lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dalam klasifikasi ST. Perusahaan dalam klasifikasi ST adalah perusahaan dengan aset besar, sehingga ukuran kinerja ROA dan ROE juga menjadi rendah.

Tabel 10 menjelaskan rata-rata skor/indeks dimensi GCG untuk kategori CT, T, dan ST. Perusahaan-perusahaan dalam kategori CT memiliki rata-rata skor/indeks dimensi GCG yang paling rendah dibandingkan dengan skor GCG untuk perusahaan-perusahaan dalam kategori T dan ST. Komposisi skor masing-masing kategori sangat bervariasi. Untuk kategori CT, dimensi INFRAS memiliki skor tertinggi dan diikuti oleh dimensi transparansi, perspektif lingkungan, dan struktur kelola. Untuk kategori ST, dimensi INFRAS memiliki skor tertinggi, diikuti oleh dimensi struktur kelola dan dimensi perspektif sosial. Untuk kategori T, dimensi INFRAS memiliki skor tertinggi, diikuti oleh dimensi perspektif sosial dan struktur kelola. Untuk ketiga kategori, skor dimensi perspektif lingkungan memiliki skor paling rendah di antara berbagai dimensi yang ada.

Tabel 9
Rata-rata Kinerja Keuangan Untuk Kategori CT, T, dan ST

KINERJA KEUANGAN	CUKUP		
	TERPERCAYA	TERPERCAYA	SANGAT TERPERCAYA
PENJUALAN	4.185.856	12.950.607	9.939.009
UTANG TOTAL	26.558.516	20.572.771	58.231.331
EKUITAS TOTAL	2.868.886	6.496.039	8.290.849
ASET TOTAL	29.427.402	27.068.810	66.522.180
LABA USAHA	681.630	1.796.660	2.638.334
LABA BERSIH	610.009	1.842.425	1.599.156
RETURN ON ASSET	6,06	6,45	6,39
RETURN ON EQUITY	22,00	20,86	18,70
LAMA TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	10,21	10,58	9,20

Tabel 10 menjelaskan skor masing dimensi GCG untuk setiap kategori status GCG (CT, T, dan ST). Berdasarkan tabel tersebut, dimensi GCG yang relatif kurang baik adalah dimensi perspektif lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan peserta kompetisi GCG masih kurang memperhatikan keberadaan dimensi GCG ini. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah kos aktivitas dalam dimensi GCG ini yang relatif mahal untuk dilaksanakan. Apabila tabel 12 diperhatikan kembali, maka perusahaan-perusahaan yang memiliki indeks dimensi perspektif lingkungan dan indeks GCG yang tinggi adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki aset relatif besar.

Tabel 10
Rata-rata Skor Masing-Masing Dimensi GCG untuk Kategori CT, T, dan ST

DIMENSI GCG	CUKUP TERPERCAYA	TERPERCAYA	SANGAT TERPERCAYA
STRUKTUR KELOLA	70	90	96
STRUKTUR MILIK	84	91	99
TRANSPARANSI	60	69	74
PERSPEKTIF LINGKUNGAN	49	64	71
SKOR	264	314	340

4.4 Pengujian Efektivitas Indeks GCG

Pengujian efektivitas indeks GCG dilakukan dengan menginvestigasi hubungan antara variabel dependen dengan berbagai variabel bebas dan variabel kontrol. Dalam model 1-4, dependen variabelnya adalah ROA; sedangkan dalam model 5, variabel dependennya adalah IGCG. Pengujian dilakukan dengan menggunakan persamaan 1-5 di atas. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Berdasarkan teori, seharusnya dimensi-dimensi GCG berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Berbagai dimensi GCG mendukung terciptanya kepercayaan (trust) kepada perusahaan. Berbagai dimensi GCG akan mendukung peningkatan akuntabilitas, responsibilitas semua pihak terkait dalam CRSC. Selain itu berbagai dimensi GCG akan mendukung semangat transparansi yang tinggi, integritas yang tinggi, dan perlakuan yang seimbang antara pemegang saham. Dengan demikian, berbagai komponen GCG akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik. Namun bisa juga berbagai dimensi GCG tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sebagai akibat meningkatnya kepercayaan publik.

Uji Asumsi Klasik. Sebelum melakukan analisis regresi dengan OLS, maka perlu melakukan uji asumsi klasik. Gauss-Markov telah membuktikan bahwa penduga b_0 dan b_1 mempunyai sifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimate), atau mempunyai sifat yang linear, tidak bias, dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003, p. 79). Berdasarkan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi setiap variabel bebas tidak lebih besar dari 0,8, sehingga dapat diasumsikan tidak ada variabel yang bersifat multikolinearitas. Tabel berikut ini menunjukkan korelasi antara variabel-variabel yang akan dipergunakan dalam model penelitian.

Tabel 11
Korelasi antar Variabel

	ROA	STRULOLA	STRUMLK	TRANS	PER_LING
ROA	1.000000				
STRULOLA	0.147833	1.000000			
STRUMLK	-0.070910	-0.292501	1.000000		
TRANS	0.241944	-0.711031	0.424449	1.000000	
PER_LING	0.182476	-0.622852	0.402030	0.642188	1.000000

Sumber: Olahan Data Primer

Keterangan:

STRULOLA = struktur pengelolaan; STRUMLK = struktur kepemilikan; TRANS = transparansi; PERLING = perspektif lingkungan

Berdasarkan White-Test nilai $Obs \cdot R\text{-Squared}$ sebesar 20,58 dan tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Hasil uji menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test, nilai $Obs \cdot R\text{-Squared}$ sebesar 1,078 dan tidak signifikan. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa tidak terjadi peristiwa autokorelasi. Uji linearitas menggunakan metode Ramsey-RESET Test menunjukkan bahwa F-Statistic sebesar 9,731 dan signifikan pada level kurang dari 1 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi linearitas. Selain itu, hasil uji normalitas menggunakan indikator Uji Jarque-Berra menunjukkan bahwa koefisien JB signifikan pada level kurang dari 1 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai residu tidak berdistribusi normal. Tujuan penelitian ini hanya ingin menunjukkan bahwa tingkat kepentingan masing-masing dimensi adalah berbeda dan bukan untuk menghasilkan model yang akan dipakai memprediksi kinerja organisasi, maka kondisi tersebut di atas masih bisa diterima untuk tujuan penelitian ini.

4.5 Hasil Regresi Dimensi GCG terhadap Kinerja Organisasi

Pengujian menggunakan Model 1 dilakukan untuk menguji pengaruh dimensi GCG (STRULOLA, STRMLK, TRANS, dan PERLING) terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Setelah variabel STRULOLA dan STRUMLK ditransformasi menjadi variabel resiprokal hasil regresi menggunakan OLS menunjukkan bahwa semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat kurang dari 1 persen. Meskipun adjusted R^2 -nya relatif baik sebesar 33,42 persen, namun menurut peneliti model ini kurang baik karena nilai residu yang tidak linear dan tidak berdistribusi normal.

Pengujian menggunakan Model 2, bertujuan menguji apakah faktor industri memberikan perbedaan pengaruh dimensi GCG terhadap kinerja organisasi. Hasil regresi menunjukkan semua variabel (STRULOLA, TRANS, PERLING, dan INDUS) kecuali STRUMLK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi pada tingkat kurang dari 1 persen. Variabel industri (INDUS) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini bermakna, bahwa ada pengaruh berbeda dimensi GCG pada industri berbeda terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian peningkatan GCG dengan menggunakan instrumen yang sama akan menghasilkan peringkat GCG yang menyesatkan. Sebaiknya instrumen berbeda dipakai untuk memeringkat industri yang berbeda. Model 2 berhasil menjelaskan kinerja organisasi dengan Adjust R^2 sebesar 40,68 persen.

Pengujian menggunakan Model 3 dilakukan sama dengan Model 2 ditambah dua variabel kontrol UKURAN perusahaan (aset) dan LEVERAGE (utang). Hasil regresi menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh signifikan pada tingkat kurang dari 1 persen terhadap kinerja organisasi. Namun variabel INDUS tidak berpengaruh signifikan, mungkin karena variabel ini sudah diwakili oleh ukuran perusahaan dan leverage. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel UKURAN berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi, sedangkan LEVERAGE berpengaruh negatif terhadap kinerja organisasi. Akan tetapi koefisien regresi ke dua variabel tersebut relatif kecil. Hasil regresi ini memberikan makna bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan mendorong perusahaan tersebut menyediakan komponen yang diatur dalam GCG. Dugaan bahwa semakin besar utang akan semakin besar pula aspek pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap manajemen organisasi, ternyata menunjukkan bukti yang berkebalikan, semakin besar utang justru semakin rendah kinerja organisasi yang diukur dengan ROA. Jika data utang ini diuji menggunakan data time-series mungkin bisa dilihat bahwa utang akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena jika kebijakan utang perusahaan sukses, maka financial leverage index-nya akan semakin tinggi dalam jangka panjang. Model 3 berhasil menjelaskan kinerja organisasi dengan adjusted R^2 sebesar 45,91 persen.

Pengujian menggunakan Model 4 mencoba menginvestigasi pengaruh variabel indeks GCG total (IGCG) dan tiga variabel kontrol INDUS, UKURAN, dan LEVERAGE. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien IGCG tidak berpengaruh signifikan, variabel INDUS berpengaruh signifikan pada level kurang dari 5 persen, sedangkan untuk variabel UKURAN dan LEVERAGE berpengaruh signifikan pada level kurang dari 1 persen. Penelitian ini

bertujuan ingin mengevaluasi penerangan GCG yang dilakukan oleh IICG pada level dimensi GCG sehingga ketidaksignifikansian variabel IGCG kurang berdampak. Model 4 berhasil menjelaskan kinerja organisasi dengan adjusted R² sebesar 25,13 persen

Model 5 mencoba menguji pengaruh variabel UKURAN, LEVERAGE dan INDUS terhadap kinerja organisasi (ROA). Hasilnya variabel INDUS tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel UKURAN dan LEVERAGE memiliki pengaruh signifikan pada tingkat kurang dari 5 persen dengan arah pengaruh yang tetap sama, namun koefisien regresi yang dihasilkan sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dimensi GCG pun variabel UKURAN dan LEVERAGE berpengaruh signifikan terhadap ROA. Model 5 berhasil menjelaskan kinerja organisasi dengan adjusted R² sebesar 8,11 persen. Tabel 12 berisi ringkasan analisis regresi lima model pengujian.

Tabel 12
Analisis Regresi kinerja dan dimensi GCG (ROA sebagai variabel dependen untuk model 1-4; IGCG sebagai variabel dependen untuk model 5)

IV / DV	MODEL1	MODEL2	MODEL 3	MODEL4	MODEL5
	ROA	ROA	ROA	ROA	IGCG
INTERSEP	-9602 (-5,531)***	-7789 (-4,447)***	-7655 (-4,565)***	267,84 (0,377)	304 (48,43)***
STRULOLA	190985 (5,027)***	158383 (4,218)***	148878 (4,132)***	-	-
STRUMLK	187685 (2,728)***	168169 (2,576)**	188755 (3,01)***	-	-
TRANS	67 (4,465)***	53 (3,559)***	48 (3,363)***	-	-
PERLING	20 (2,248)***	19 (2,252)***	18 (2,167)**	-	-
INDUS	-	-444 (-2,93)***	-210,58 (-1,155)	-452 (-2,196)**	-4.406 (-0,419)
UKUR	-	-	4,41E-05 (2,673)***	5,28E-05 (2,767)***	1,94E-06 (2,053)**
LEVERAGE	-	-	-4,98E-05 (-2,729)***	-5,88E-05 (-2,789)***	-1,98E-06 (-1,896)**
IGCG	-	-	-	-1,273 (-0,516)	-
R ²	37,46%	45,18%	51,65%	37,4%	12,29%
ADJUSTED-R ²	33,42%	40,68%	45,91%	25,13%	8,11%

Keterangan:

STRULOLA = struktur pengelolaan; STRUMLK = struktur kepemilikan; TRANS = transparansi; PERLING = perspektif lingkungan; INDUS = industri; UKUR = ukuran perusahaan; IGCG = indeks GCG; ROA = return on asset; ***signifikan pada tingkat 1 persen; **signifikan pada tingkat kurang dari 5 persen; *signifikan pada tingkat kurang dari 10 persen

4.6 Penentuan Bobot Dimensi GCG

Oleh karena hasil analisis regresi kurang baik untuk melakukan prediksi, maka pembobotan sulit untuk dilakukan karena ada variabel tertentu yang jika diinterpretasikan tetap memiliki makna negatif. Namun demikian hasil penelitian ini tetap memberikan kontribusi untuk tujuan pemberian bobot setiap dimensi GCG. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat kepentingan antara dimensi GCG yang satu dengan dimensi GCG yang lain. Hal ini berarti bahwa kontribusi setiap dimensi GCG terhadap penciptaan kinerja organisasi berbeda.

Jika diharuskan menentukan besarnya bobot untuk masing-masing dimensi GCG, maka hasil penelitian ini sudah bisa menjawab.

Sesuai dengan tujuannya, penelitian ini berusaha mengevaluasi pembobotan dimensi GCG yang dibuat oleh IICG ketika melakukan pemeringkatan GCG perusahaan publik. Ada tiga hal penting yang kurang tepat yang dilakukan oleh IICG ketika memeringkat GCG, yaitu: a) memberikan bobot relatif sama atas dimensi GCG yang berbeda, b) menggunakan instrumen yang sama untuk perusahaan dalam industri berbeda, dan c) memberikan bobot yang sama dan instrumen yang sama untuk perusahaan publik dan perusahaan nonpublik.

Hasil regresi menggunakan metode OLS bisa memberikan alternatif jawaban atas pertanyaan manakah dimensi GCG yang harus diberi bobot lebih besar, namun penelitian ini belum menjawab pertanyaan berapakah bobot untuk masing-masing dimensi GCG yang tepat. Dengan menggunakan *standardized coefficient* atau *beta* yang dihasil dari regresi dengan metode OLS dapat dijawab pertanyaan manakah dimensi GCG yang harus diberi bobot lebih besar atau lebih kecil.

Standardized coefficient adalah estimasi koefisien regresi yang diperoleh dari standarisasi data aslinya. Koefisien ini berfungsi menjelaskan kontribusi masing-masing variabel bebas untuk menerangkan variabel terikat. Jika koefisien *Beta* suatu variabel bebas lebih besar daripada variabel bebas yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel bebas tersebut lebih besar dibandingkan dengan variabel bebas yang lain dalam untuk menjelaskan variabel terikat (Nachrowi dan Usman, p. 132-133, 2006). Hasil regresi menunjukkan besarnya *standardized coefficient* untuk masing-masing dimensi GCG ditunjukkan pada tabel 13.

Tabel 13
Hasil Regresi dengan Variabel Dependen ROA

VARIABEL	UNSTANDARDIZED COEFFICIENT	STANDARDIZED COEFFICIENT
	B (T)	BETA
INTERSEP	-96,42 (-5,59)***	-
STRULOLA	1920 (5,068)***	0,760***
STRUMLK	1864 (2,730)***	0,305***
TRANS	0,681 (4,541)***	0,710***
PERLING	0,201 (2,260)**	0,311**

Keterangan:

STRULOLA = struktur pengelolaan; STRUMLK = struktur kepemilikan; TRANS = transparansi; PERLING = perspektif lingkungan; ***signifikan pada tingkat 1 persen; **signifikan pada tingkat kurang dari 5 persen; *signifikan pada tingkat kurang dari 10 persen

Berdasarkan tabel 13 dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel STRULOLA paling besar menjelaskan kinerja organisasi yang diukur dengan ROA yaitu sebesar 0,76. Pada tingkat kedua variabel TRANS (transparansi) memberikan kontribusi sebesar 0,71 menjelaskan kinerja organisasi. Pada tingkat ketiga variabel PERLING dan variabel STRUMLK memiliki persentase kontribusi untuk menjelaskan kinerja organisasi sebesar 0,30 s.d. 0,31. Berdasarkan nilai *beta* tersebut dapat ditentukan bobot setiap variabel. Pembobotan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan dengan memberikan bobot yang lebih besar untuk variabel STRULOLA dibandingkan dengan tiga variabel yang lain. Untuk variabel TRANS diberi bobot yang mendekati variabel STRULOLA. Akan tetapi untuk variabel STRUMLK dan PERLING diberi bobot relatif sama tidak menjadi masalah. Bobot setiap dimensi juga ditentukan dengan mempertimbangkan koefisien terstandar dengan cara sebagai

berikut ini.

Tabel 14
Perhitungan Bobot Dimensi

DIMENSI	PERHITUNGAN	BOBOT
STRULOLA	$0,76/(0,76+0,305+0,71+0,311)$	0.364 ATAU 36,4 PERSEN
STRUMLK	$0,305/(0,76+0,305+0,71+0,311)$	0.146 ATAU 14,6 PERSEN
TRANS	$0,71/(0,76+0,305+0,71+0,311)$	0.340 ATAU 34 PERSEN
PERLING	$0,311/(0,76+0,305+0,71+0,311)$	0.150 ATAU 15 PERSEN

Keterangan:

STRULOLA = struktur pengelolaan; STRUMLK = struktur kepemilikan; TRANS = transparansi; PERLING = perspektif lingkungan

Dengan demikian bobot untuk dimensi STRULOLA sebesar 36,4 persen, dimensi STRUMLK diberi bobot sebesar 14,6 persen, dimensi TRANS diberi bobot sebesar 34 persen, sedang dimensi PERLING diberi bobot sebesar 15 persen. Namun perlu dicatat bahwa bobot masing dimensi GCG dapat berbeda sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan untuk mengembangkan bobot tersebut. Cacatan penting yang perlu diperhatikan dari penelitian ini adalah setiap dimensi memiliki level kepentingan yang berbeda sehingga perlu diberi bobot yang berbeda pula.

5. PENUTUP

Penelitian ini dilandasi oleh model pemeringkatan GCG yang dilakukan oleh IICG sejak tahun 2003 sampai dengan 2008. Ada tiga hal penting yang menjadi kritik peneliti atas pola pemeringkatan oleh IICG, yaitu: a) memberikan bobot relatif sama atas dimensi GCG yang berbeda, b) menggunakan instrumen yang sama untuk perusahaan dalam industri berbeda, dan c) memberikan bobot yang sama dan instrumen yang sama untuk perusahaan publik dan perusahaan nonpublik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa masing-masing dimensi GCG akan memberikan kontribusi berbeda dalam menjelaskan kinerja organisasi. Tujuan berikutnya adalah menunjukkan bahwa penerapan GCG masing-masing industri akan berbeda, sehingga perlu mempertimbangkan faktor industri ini ketika melakukan pemeringkatan GCG.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dimensi STRULOLA, STRUMLK, TRANS, dan PERLING memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel STRULOLA memiliki kontribusi yang paling besar, kemudian diikuti oleh variabel TRANS pada urutan kedua untuk menjelaskan kinerja organisasi yang diukur dengan ROA. Untuk variabel STRUMLK dan PERLING memiliki standardized coefficient paling rendah, namun relatif sama. Oleh karena itu, ketika melakukan pemeringkatan perlu membedakan bobot yang dilekatkan untuk masing-masing dimensi tersebut. Untuk itu masing-masing variabel harus diberi bobot yang tidak sama.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa instrumen yang dipakai untuk mengidentifikasi keberadaan dan penerapan aspek GCG dalam suatu perusahaan perlu dibedakan industrinya. Oleh karena risiko bisnis yang ditanggung oleh setiap industri berbeda, maka sebaiknya instrumen yang dipakai untuk masing-masing industri juga berbeda. Jika GCG suatu perusahaan diukur dengan instrumen untuk industri lain, maka bisa dipastikan skor yang dihasilkannya akan rendah pula. Secara logis perusahaan dalam industri manufaktur lebih memperhatikan aspek perbaikan lingkungan hidup, namun perusahaan dalam industri keuangan mungkin akan lebih tepat memperhatikan aspek tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

IICG melakukan pemeringkatan dengan menyamakan kondisi perusahaan publik dan perusahaan nonpublik. Keduanya sudah pasti berbeda meskipun berada dalam industri yang sama. Perusahaan publik lebih banyak memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi dibandingkan dengan perusahaan nonpublik. Ketentuan-ketentuan untuk perusahaan publik juga disertai dengan sanksi dan pinalti. Oleh karena itu, perusahaan publik

cenderung lebih berusaha keras untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan nonpublik. IICG tidak membedakan kedua kelompok perusahaan ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan adalah data perusahaan-perusahaan yang mengikuti program pemeringkatan GCG oleh IICG. Dengan demikian kebanyakan perusahaan-perusahaan ini memiliki kecenderungan untuk memenuhi kriteria GCG yang ditetapkan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini kurang dapat digeneralisasi sebab tidak menggunakan seluruh populasi perusahaan publik yang ada di BEJ. Kedua, hasil penelitian tidak dapat dipergunakan untuk prediksi kondisi GCG di Indonesia sebab tidak seluruh perusahaan sampel mengikuti program pemeringkatan secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Ketiga, dimensi GCG yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan sendiri berdasarkan logika kebutuhan GCG, namun belum diuji secara empiris.

Meskipun ada beberapa kelemahan yang tidak bisa dihindari, namun penelitian ini memberikan kontribusi yang terkait dengan tiga hal, pertama, pemeringkatan GCG harus memberikan bobot yang berbeda atas dimensi GCG yang berbeda. Besarnya kecil bobot yang diberikan ditentukan oleh tingkat kepentingan dimensi tersebut dalam model. Kedua, pemeringkatan GCG harus menggunakan instrumen atau daftar cek yang berbeda untuk industri yang berbeda. Risiko bisnis masing-masing industri akan berbeda, sehingga aspek penting GCG masing-masing industri juga berbeda. Dengan demikian jika dibuat peringkat, maka peringkat yang dihasilkan akan adil sebab membedakan karakteristik industri. Ketiga, pemeringkatan perusahaan publik dan nonpublik juga harus dipisahkan. Perusahaan publik sangat diregulasi oleh ketentuan publik sehingga pasti lebih baik memenuhi ketentuan GCG dibandingkan dengan perusahaan bukan publik. Jika bobot dimensi penting tidak dibedakan dan daftar item GCG tidak dibedakan untuk setiap industri, maka sebenarnya tidak dapat dilakukan pemeringkatan sebab peringkat yang dihasilkan akan merugikan perusahaan dan atau industri tertentu.

Penelitian masa depan dapat dilakukan dengan menggunakan data panel sehingga dapat dihasilkan suatu penjelasan yang tepat mengenai hubungan antara berbagai dimensi GCG dengan kinerja organisasi. GCG merupakan usaha untuk mendapatkan kepercayaan publik dan usaha ini bukan merupakan usaha jangka pendek. Dengan demikian pengujian terhadap hubungan ini sebaiknya dilakukan dalam periode relatif panjang dengan menggunakan data pool. Kedua, mungkin perlu evaluasi berbagai dimensi yang digunakan dalam model penelitian ini. Ada beberapa elemen yang mungkin memang belum ada atau biasa ada dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barrett, Edgar M., (1977), "Financial Reporting Practices: Disclosure and Comprehensiveness in an International Setting", *Journal of Accounting Research*, pp.10-26.
- Beasley, Mark S., (1996), "An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud", *The Accounting Review*, Vol.17., No.4, Oktober, pp.443-465.
- Botosan, Christine A., (1997), "Disclosure Level and the Cost of Equity Capital", *The Accounting Review*, Vol.72, No.3, pp.323-349.
- Buzby, Stephen L., (1974), "Selected Items of Information and Their Disclosure in Annual Reports", *The Accounting Review*, pp. 423-435.
- Cerf, Alan R., (1961), *Corporate Reporting and Investment Decision*. Berkeley, CA: The University of California Press.
- Copeland, Ronald M. and Fredericks, William M., (1968), "Extent of Disclosure", *Journal of Accounting Research*, pp.106-113.

- Chang, Lucia S., Most, Kenneth S., and Brain, Carlos W. (1983), "The Utility of Annual Reports: An International Study", *Journal of International Business*, pp.63-84.
- Chotourou, S.M., Jean Bedard. and Lucie Courteau., (2001), "Corporate Governance and Earnings Management", Working Paper. Universite Laval, Quebec City, Canada. April.
- Diamond, D., and Verrechia, R., (1991), "Disclosure, Liquidity, and the Cost of Equity Capital", *The Journal of Finance*, pp.1325-1360.
- Dipiazza, Samuel A. and Eccles, Robert G., (2002), *Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Firth, Michael., (1979), "The Impact of Size, Stock Market Listing, and Auditors, on Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports", *Accounting and Business Research*, pp.273-280.
- Glosten, L., and Milgrom, P., (1985), "Bid Ask and Transaction Prices in a Specialist Market With Heterogeneously Informed Traders", *Journal of Financial Economics*, pp.71-100.
- Gujarati, Damodar N., (2003), *Basic Econometrics*. Fourth edition. New York: McGraw Hill.
- Gunarsih, Tri., (2002), "Struktur Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan: Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Strategi Diversifikasi terhadap Kinerja Perusahaan", Disertasi, Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Hapsoro, Dody., (2005), "Mekanisme Corporate Governance, Transparansi, dan Konsekuensi Ekonomik: Studi Empiris di Pasar Modal". Disertasi, Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan).
- Hartono, Jogiyanto, Efraim F. Giri, Efraim, dan Sri Suryaningsum., "Model untuk pengindeksan dan pemeringkatan GCG. CGCG", Disertasi, UGM tidak dipublikasikan.
- Hines, R.D., (1982), "The Usefulness of Annual Reports: the Anomaly between the Efficient Markets Hypothesis and Shareholders Surveys", *Accounting and Business Research*, pp.296-340.
- Kamal, M., (2008), "Corporate Governance in Indonesia State-Owned Enterprises: Is it on The Right Track?", Working Papers. Macquarie School of Law, Macquarie University, NSW 2109-Australia.
- Majalah SWA Sembada, (2001), No. 19/XVII/20 September- 30 Oktober.
- .. (2002), No. 23/XVII/5-17 November.
- .. (2004), No. 04/XX/19 Februari-3 Maret.
- .. (2005), No. 09/XXI/28 April -4 Mei.
- .. (2006) No. 26/XXII/11-20 Desember.
- .. (2008), No. 01/XXIV/9 – 23 Januari.
- Mayangsari, Sekar, dan Murtanto, (2002), "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pembentukan Komite Audit", *Proceeding SNA*.
- Meek, G. K., and Gray, S. J., (1989), "Globalization of Stock Markets and Foreign Listing Requirements: Voluntary Disclosures, by Continental European Companies Listed on the London Stock Exchange", *Journal of International Business Studies*, pp.581-584.

- Nachrowi, D. Nand Usman H., (2006), Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-Universitas Indonesia.
- Organization for Economic Cooperation and Development., (1998), OECD Principles of Corporate Governance. The OECD Paris.
- Peasnell, K.V, P.F. Pope. and S.Young., (2001), "Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals", Accounting and Business Research, Vol. 30. pp.41-63.
- Riyanto, Bambang., (2005), Corporate Governance: Isu Utama Penelitian. Kompas, No.2.
- Singhvi, Surendra S. and Desai, Harsha B., (1971), "An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure", The Accounting Review, pp. 129-138.
- Stanga, Keith G., (1976), "Disclosure in Published Annual Reports", Financial Management, pp. 42-52.
- Susanto, Djoko., (1992), "An Empirical Investigation of The Extent of Corporate Disclosure in Annual Reports of Companies Listed on The Jakarta Stock Exchange", Dissertation unpublished. University of Arkansas.
- Suwardjono, (2005), Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan. Ketiga, ed. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Teoh, Hai-Yap and Thong, Gregory, (1984), "Another Look at Corporate Social Responsibility and Reporting: An Empirical Study in a Developing Country", Accounting, Organizations, and Society, Vol. 6, No.4, pp. 355-362.
- Utama, Sidharta dan Afriani, Cynthia. "Praktik Corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan: Studi Empiris di BEJ". Usahawan. LPPM UI.
- Verrechia, Robert E., (1983), "Discretionary Disclosure", Journal of Accounting and Economics, Vol. 5, pp. 355-362.

MODEL FRAMING DAN BELIEF ADJUSTMENT DALAM MENJELASKAN BIAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGAUDITAN

I Wayan Suartana

Email: suark15@yahoo.com

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana-Denpasar

Abstract

This study examined framing and presentation mode effects in auditor substantive testing decisions. Auditor presented with the routine task of judging in the appropriate level of substantive testing based on their evaluation of an internal controls systems. Subject were instructed either to evaluate the risk of the related internal controls systems. After considering seven specific pieces of information about the internal controls in the inventory systems, they then made a judgment about the internal control systems and revised their substantive testing decision. The premise of the study is that subjects asked to evaluate risk would find negative aspects of the control systems to be salient, whereas subjects asked to evaluate strength would find positive aspects of the systems to be more salient. As a result, auditors assessing risk, rather than strength, would plan more substantive testing. This result indicated that framing effects and recency effects could occur among experienced auditors performing a familiar task with routine consequences.

Keywords: Framing, Belief Adjustment Model, Auditing, Inventory

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, fungsi audit sangat esensial. Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan atau organisasi. Untuk itulah proses audit mesti dilakukan secara hati-hati dan konsisten dengan kaidah-kaidah profesi. Proses audit melalui prosedur yang berjenjang, dan setiap tahapan akan melibatkan judgment auditor atas suatu kejadian atau fakta. Auditor diharapkan memiliki judgment yang berkualitas¹. Menurut Kida (1984) auditor membuat judgment dalam mengevaluasi pengendalian intern, menilai risiko audit, merancang dan mengimplementasikan penyampelan dan menilai serta melaporkan aspek-aspek ketidakpastian. Auditor secara eksplisit maupun implisit memformulasikan suatu hipotesis terkait dengan tugas-tugas judgment mereka. Setelah hipotesis itu dibingkai, kemudian mereka mencari data untuk menguji hipotesis-hipotesis (dugaan-dugaan) yang diformulasikan.

Faktor pertama yang diuji adalah framing (Kahneman dan Tversky, 1984; Tversky dan Kahneman, 1986). Dua frame yang umumnya digunakan untuk melihat karakter struktur pengendalian intern (SPI) suatu perusahaan adalah "kekuatan" dan "risiko". Kekuatan mencerminkan kuat-lemahnya SPI, sedangkan risiko menunjukkan berisiko tidaknya SPI perusahaan. Karena keputusan auditor mengenai jumlah yang tepat dari uji substantif adalah suatu fungsi dari evaluasi atas SPI, maka perbedaan antara dua karakter tersebut diyakini memiliki dampak yang berarti terhadap keefektifan dan efisiensi dalam audit.

¹ Judgment mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini, atau sikap (Bazerman, 1994). Kualitas judgment adalah suatu fungsi dari kapasitas, effort, data internal dan eksternal (Kennedy, 1993). Kualitas judgment independen terhadap outcome; sebagai contoh, dalam suatu lingkungan yang tidak pasti suatu outcome yang buruk mungkin dihasilkan dari suatu proses yang "baik" dalam arti semua informasi telah secara tepat dipertimbangkan

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan akhir auditor mengenai keluasan uji substantif adalah format (respon mode) dari informasi yang disajikan. Esensi dari pernyataan ini merupakan tesis model belief adjustment yang dikembangkan oleh Hogart dan Einhorn (1992). Model belief adjustment memprediksi bahwa informasi yang dievaluasi secara sekuensial akan menghasilkan judgment yang berbeda dibandingkan informasi yang disajikan secara simultan. Sejumlah studi tentang aspek keperilakuan dalam pengauditan (Asare 1992; Ashton dan Ashton 1988; Messier 1992, Tubbs 1990) menunjukkan bahwa variabel-variabel tugas seperti misalnya urutan bukti dan format penyajian bisa mempengaruhi proses perbaikan (revisi) belief seorang auditor. Model belief adjustment mengasumsikan bahwa belief seseorang diperbaiki oleh suatu penjangkaran yang sekuensial dan proses adjustment dalam jangka atau opini awal mereka terhadap sepotong bukti pertama, dan kemudian beliefnya disesuaikan. Menurut Messier dkk. (1994) model belief adjustment menjadi penting bagi dunia pengauditan karena dua alasan utama. Pertama, hakekat dari pengauditan, auditor kemungkinan akan lebih sensitif terhadap tipe bukti tertentu. Auditor memusatkan perhatian pada kesalahan laporan keuangan yang tidak bisa dideteksi, sehingga akan menempatkan bobot yang lebih besar pada bukti-bukti yang bersifat negatif. Kedua, faktor urutan bukti dan bentuk penyajian akan mempengaruhi perencanaan, keefektifan dan efisiensi dalam audit. Apakah urutan bukti dan cara penyajian yang dihadapi oleh auditor mempengaruhi judgment yang mereka buat dalam rangkaian tugas audit, dan akhirnya mempengaruhi keputusan mereka, terlepas dari apa isi bukti-bukti tersebut?. Karena pengauditan pada umumnya memiliki karakteristik sebagai suatu proses evaluasi bukti yang berurutan, pembentukan judgment dan pembuatan keputusan, maka pertanyaan tersebut memiliki implikasi kebijakan yang penting. Akuntan harus mengevaluasi proses pembuktiannya yang sekarang dijalankan dan kemudian ditelaah untuk memastikan apakah kebijakan dan keputusan yang telah dibuat sudah tepat.

1.2 Tujuan Penelitian

Studi ini menguji secara empiris framing dan belief adjustment auditor melalui investigasi eksperimen, auditor secara hipotetik melakukan evaluasi atas struktur pengendalian intern persediaan dan membuat keputusan berkenaan dengan keluasan/kedalaman uji substantif yang akan dilakukan.

1.3 Kontribusi Penelitian

Studi ini mengkonfirmasi dan memperluas hasil-hasil penelitian sebelumnya terutama yang dilakukan oleh Emby (1994). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam pengujian model belief adjustment. Penelitian ini melakukan secara lebih eksplisit. Kontribusi yang diharapkan adalah ingin menemukan fenomena-fenomena yang muncul dalam judgment dan pengambilan keputusan dalam pengauditan.

2. LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pengaruh Framing

Beberapa studi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di bidang akuntansi berasumsi bahwa pengambil keputusan adalah seorang yang rasional (Gudono dan Hartadi, 1998). Akan tetapi kenyataannya asumsi tersebut seringkali tidak konsisten. Faktor yang dianggap menyebabkan terjadinya bias adalah pembingkai informasi (framing) yang diambil oleh pengambil keputusan. Framing adalah sebuah fenomena yang mengindikasikan pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Pengaruh framing diidentifikasi oleh Tversky dan Kahneman (1986) dengan menyatakan bahwa judgment dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Persepsi dari situasi judgment bisa dimanipulasi oleh kata-kata dalam suatu pertanyaan. Penelitian mengenai framing dalam konteks pengauditan salah satunya dilakukan oleh Asare (1992) yaitu mengkaji mengenai judgment going concern perusahaan.

Dalam mengevaluasi status bisnis klien, auditor mengadopsi hipotesis frame yaitu gagal atau berlanjut terus². Pengaruh framing dari suatu perubahan kata dalam dalam deskripsi SPI persediaan mempengaruhi keputusan akhir auditor berkenaan dengan uji substantif yang dilakukan. Frame yang diadopsi menggunakan terminologi “kekuatan” dan “risiko” untuk menilai SPI persediaan. Penjelasan atas frame yang digunakan didasarkan atas teori prospek dari Kahneman dan Tversky (1979). Frame “risiko” menempatkan auditor dalam domain loss sementara “kekuatan” dalam domain gain. Teori prospek memberikan penjelasan bahwa frame tergantung pada masalah, norma, kebiasaan dan karakteristik pengambil keputusan. Bentuk fungsi nilai dari teori prospek yaitu cekung untuk gain dan cembung untuk loss. Ketika kurva semakin curam untuk loss dibandingkan gain, frame risiko akan menghasilkan persepsi auditor tentang uji substantif yang semakin mendalam. Berdasarkan hal ini, patut diduga framing memiliki pengaruh terhadap keputusan akhir auditor tentang kedalaman uji substantif yang dilakukan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis:

- H1: Ada korelasi positif (negatif) antara judgment auditor tentang risiko (kekuatan) dari struktur pengendalian intern dan keputusan akhir tentang kedalaman uji substantif yang dilakukan.
- H2: Auditor yang menerima versi “risiko” dari deskripsi detail struktur pengendalian intern persediaan akan memilih uji substantif dengan level yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang menerima versi “kekuatan”.

2.2 Model Belief Adjustment

Model belief adjustment (Hogarth dan Einhorn, 1992), dengan menggunakan pendekatan penjangkaran dan penyesuaian (*general anchoring and adjustment approach*), menggambarkan penyesuaian keyakinan individu karena adanya bukti baru. Model ini memprediksi bahwa cara orang memperbaiki keyakinannya yang sekarang (jangkar) dipengaruhi oleh beberapa faktor bukti. Sifat-sifat bukti yang dipertimbangkan dalam model adalah: (1) arah (sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan sekarang), (2) kekuatan (lemah atau kuat), dan (3) jenis (negatif, positif, atau campuran). Di samping arah, kekuatan dan jenis bukti, Hogarth dan Einhorn (1992) juga mempertimbangkan urutan (positif setelah itu negatif, negatif positif atau campuran positif dan negatif) dan cara/format/mode (penyampaian informasi secara sekuensial/berurutan atau secara simultan) dalam penyajian bukti. Dalam bentuk sekuensial/berurutan (*Step-by-Step*; SbS), individu-individu memperbaharui keyakinannya setelah mereka diberikan tiap-tiap potongan bukti dalam serangkaian penyampaian informasi yang terpisah-pisah. Dalam bentuk simultan (*End-of-Sequence*; EoS) individu-individu memperbaharui keyakinannya begitu semua informasi tersaji dalam bentuk yang telah terkumpul. Ketika informasi disajikan dalam bentuk SbS, orang biasanya menggunakan strategi pengolahan SbS. Di sini mereka menyesuaikan keyakinannya secara incremental (semakin bertambah) begitu diberikan tiap-tiap potongan bukti. Pengolahan EoS berarti bahwa jangkar awal (penetapan awal) disesuaikan dengan penyajian bukti-bukti secara agregatif. Penyajian dalam bentuk EoS seringkali menghasilkan strategi pengolahan EoS, khususnya bila jumlah item informasi sedikit dan tidak terlalu kompleks.

Namun, rangkaian-rangkaian item informasi yang relatif kompleks dan/atau panjang yang disampaikan dalam bentuk EoS mungkin tidak tertampung oleh kapasitas kognitif banyak individu; oleh karena itu orang sering secara khusus menggunakan strategi pengolahan SbS saat dihadapkan dengan kondisi kognitif seperti itu. Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa individu-individu membuat perbaikan keyakinan yang lebih besar bila informasi diberikan dalam format SbS, dibandingkan dengan format EoS (Ashton dan

² Asare (1992) memperluas penelitiannya Kida (1984) yang mengindikasikan 20 item pertanyaan untuk konfirmasi apakah perusahaan gagal atau berlanjut terus. Auditor akan memusatkan perhatian pada kewajaran laporan keuangan untuk mengambil posisi atau frame apakah terjadi kesalahan material atau tidak. McMillan dan White (1993) menginvestigasi bagaimana belief adjustment seorang auditor dan pencarian bukti dipengaruhi oleh frame yang dihipotesiskan dan bias konfirmasi serta skeptisme profesional auditor.

Ashton, 1988). Penyebabnya adalah karena penyajian potongan-potongan bukti yang lebih sering (SbS) memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan penjangkaran (penetapan) dan penyesuaian, dan individu-individu sering melakukan penyesuaian berlebihan (over-adjust) ke arah item-item informasi tersebut.

Potensi recency yang lebih besar hadir pada strategi pengolahan SbS, karena dalam EoS bukti positif dan negatif disaring sebelum diintegrasikan dengan keyakinan sebelumnya. Penyaringan bukti campuran mengurangi dampak dari masing-masing potongan bukti positif dan negatif secara individual. Untuk menjelaskan kapan penjangkaran (netting) terjadi, seseorang harus membedakan antara bentuk respon (response mode) dengan strategi pengolahan (processing strategy). Bentuk respon adalah cara untuk memperoleh penilaian, yaitu suatu penilaian ditentukan setiap kali diberikan potongan-potongan bukti atau satu respon final ditentukan setelah diperoleh semua potongan bukti. Bentuk pengolahan adalah proses internal (mental) dari perbaikan keyakinan. Bentuk respon SbS membutuhkan strategi pengolahan SbS. Bentuk respon EoS memungkinkan dilakukannya strategi pengolahan EoS maupun SbS. Yang pertama mempunyai persyaratan yang lebih kognitif karena mengharuskan penilai mengumpulkan bukti dulu sebelum mengintegrasikannya dengan keyakinan sebelumnya. Jika tugas tersebut bersifat kompleks, individu-individu cenderung menggunakan strategi pengolahan SbS yang memerlukan tuntutan minimal pada memori dan muatan pengolahan informasi, sehingga meningkatkan kemampuannya untuk menangani tuntutan-tuntutan kognitif dari tugas-tugas tersebut. Suatu tugas membutuhkan respon mode SbS, kemudian individu menggunakan dengan proses SbS atau EoS, itu semua tergantung dari memory dan muatan informasi yang ada pada tugas tersebut. Jika suatu tugas meliputi suatu serial yang pendek dan sederhana³, proses EoS bisa digunakan. Berikut disajikan tabel model belief adjustment Hogarth dan Einhorn (1992), dengan daerah yang diarsir merupakan konsekuensi yang diprediksi berdasarkan kompleksitas tugas, respon mode, panjang-pendeknya informasi dan apakah informasi itu bercampur atau konsisten. Kombinasi dari keempat karakteristik ini akan menghasilkan dua efek yaitu primacy dan recency.

Bentuk aljabar dari model untuk pemrosesan SbS menyarankan bahwa individu akan merevisi beliefnya mereka dalam suatu hipotesis setelah penerimaan bukti baru seperti yang ditunjukkan berikut:

$$S_k = S_{k-1} + \alpha S_{k-1} [s(x_k) - R] \text{ dengan } s(x_k) \leq R \quad (1)$$

$$S_k = S_{k-1} + \beta (1 - S_{k-1}) [s(x_k) - R] \text{ dengan } s(x_k) > R \quad (2)$$

Keterangan:

S_k : level dari belief setelah potongan bukti k, $0 \leq S_k \leq 1$,

S_{k-1} : prior degree of belief (S_0 merupakan intial degree of belief)

α : sensitivitas bukti negatif

β : sensitivitas bukti positif

$s(x_k)$: evaluasi subyektif dari potongan bukti, dan

R : poin referensi.

³ Asare dan Messeir (1991) melakukan telaah tentang penelitian model belief adjustment yang diuji dalam setting pengauditan. Tugas-tugas yang dievaluasi antara 2 sampai 12 potongan-potongan bukti dipertimbangkan sebagai tugas yang "pendek". Sedangkan tugas-tugas yang lebih dari 17 potongan bukti digolongkan sebagai tugas yang "panjang".

Tabel 1
Model Belief Adjustment

	Sederhana		Kompleks	
	Simultan (EoS)	Sekuensial (SbS)	Simultan (EoS)	Sekuensial (SbS)
Informasi bercampur:				
Pendek	Primacy	Recency	Recency	Recency
Panjang	Primacy	Primacy	Primacy	Primacy
Informasi konsisten:				
Pendek	Primacy	-	-	-
Panjang	Primacy	Primacy	Primacy	Primacy

*Penelitian ini hanya mengobservasi karakteristik tugas yang sederhana dan informasi pendek.

Suatu karakteristik tugas bisa mempengaruhi apakah primacy, recency atau tidak ada order effect yang muncul dalam updating belief adalah tergantung tipe dari bukti yang dievaluasi. Bukti bisa menjadi konsisten (seluruhnya positif atau seluruhnya negatif) atau tidak konsisten (positif dan negatif).

Untuk tugas-tugas estimasi SbS dengan seri pendek, model selalu memprediksi recency. Lebih lanjut, ketika k=2, ukuran dari pengaruh recency adalah proporsional untuk perbedaan antara nilai subyektif dari dua stimuli. Untuk tugas-tugas evaluasi SbS dengan bukti serial yang pendek, model memprediksi bahwa ukuran dari recency effect akan meningkatkan fungsi kekuatan nilai-nilai subyektif dari potongan-potongan bukti dan sensitivitas bukti ke depan.

Secara berlawanan, untuk bukti yang dievaluasi secara simultan (EoS), model (1) dan (2) berubah menjadi:

$$S_k = S_0 + W_k[s(x_1, \dots, x_k) - R] \dots\dots\dots (3)$$

Dimana, $s(x_1, \dots, x_k)$ adalah fungsi tertentu, seperti misalnya rata-rata yang dibobotkan, dari nilai-nilai k item bukti yang mengikuti jangkar awal (S_0).

Dalam eksperimen ini, cara penyajian (respon mode) apakah sekuensial atau simultan diharapkan akan berpengaruh terhadap judgment akhir auditor untuk audit persediaan. Disamping itu diharapkan pula terjadi interaksi antara framing dengan respon mode yang digunakan. Sehingga dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis:
H3 : Ada pengaruh cara penyajian terhadap keputusan akhir auditor tentang uji substantive yang dilakukan
H4 : Ada interaksi antara cara penyajian dengan framing pada keputusan akhir auditor tentang uji substantif yang dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Subyek Penelitian dan Rancangan Eksperimen

Subyek yang digunakan dalam eksperimen ini adalah para auditor di Kota Denpasar yang berasal dari tiga KAP dan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana yang merangkap sebagai auditor. Pihak KAP membantu dengan menyediakan fasilitas ruangan dan mewajibkan stafnya untuk mengikuti eksperimen. Rancangan eksperimen menggunakan 2x2 factorial design between subjects⁴. Faktor pertama (framing) terkait dengan konteks informasi yang disajikan untuk subyek. Tujuan dari perlakuan ini adalah untuk menguji pengaruh

⁴ Desain between subjects digunakan dengan beberapa alasan: (1) supaya konsisten dengan penelitian sebelumnya, dan (2) untuk menghindari demand effects yaitu subyek tahu ekspektasi peneliti.

dari perbedaan yang menekankan/tidak menekankan aspek tertentu dalam masalah judgment. Dalam eksperimen ini menggunakan kasus pengendalian intern persediaan yang diidentifikasi untuk setiap kondisi eksperimen. Kasus hipotetik yang digunakan sebagai instrumen penelitian diperoleh dari penelitiannya Emby (1994).

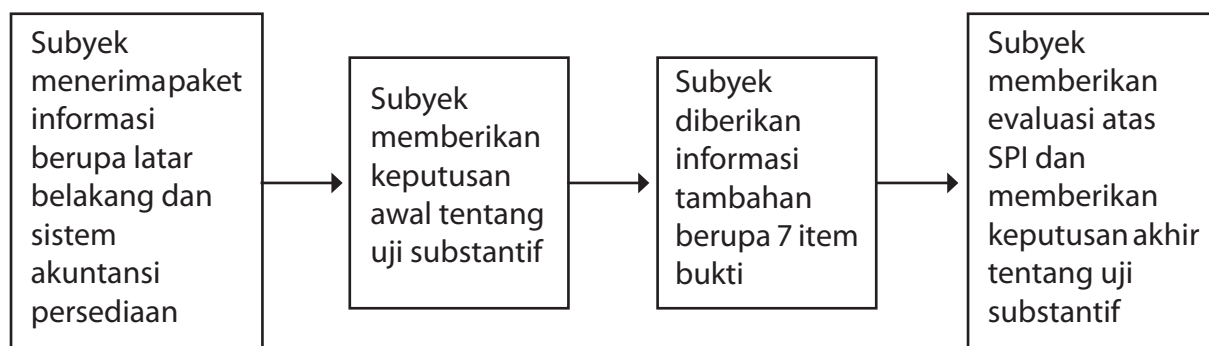
Untuk versi pertama setiap auditor diinstruksikan untuk mempertimbangkan pengaruh dari bukti tambahan terhadap risiko struktur pengendalian intern. Versi kedua subyek diinstruksikan untuk mempertimbangkan pengaruh dari bukti tambahan terhadap kekuatan struktur pengendalian intern.

Faktor kedua adalah cara (response mode) informasi yang disajikan kepada subyek. Untuk kondisi pertama adalah simultan yaitu subyek membaca bukti tambahan sebanyak 7 item yang keseluruhannya disajikan dalam satu halaman. Kondisi kedua subyek diberikan bukti tambahan sebanyak 7 item secara sekuensial.

Pada kondisi kedua ini satu halaman kertas berisikan satu item bukti tambahan, sehingga setiap subyek secara bergantian mendapatkan tujuh item bukti tambahan dengan tujuh halaman kertas yang diberikan secara bertahap dan tidak ada kesempatan untuk melihat dan membaca bukti yang sudah lewat⁵.

Narasi awal sama untuk seluruh subyek yaitu berisikan deskripsi umum klien dan gambaran umum tentang sistem persediaan klien. Pada akhir narasi subyek diberikan pertanyaan tentang jumlah yang tepat untuk uji substantif sistem persediaan. Skala yang digunakan dari 1 "sangat minimal" sampai dengan 7 "sangat mendalam". Setelah keputusan awal berkenaan dengan jumlah yang tepat untuk uji substantif, berikutnya subyek menerima informasi tambahan tentang pengendalian sistem persediaan. Subyek menelaah informasi (bukti) tambahan tersebut, kemudian mengevaluasi struktur pengendalian intern⁶ dan memberikan keputusan akhir tentang jumlah yang tepat untuk uji substantif sistem persediaan dengan skala yang sama seperti keputusan awal.

Ringkasan model tugas eksperimental disajikan dalam gambar 1.



Gambar 1
Ringkasan Model Tugas Eksperimental

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Demografis Subyek

Tabel 2 menyajikan data demografis subyek yang berisikan jenis kelamin, pengalaman dan posisi dalam KAP. Ada 49 auditor yang berpartisipasi dalam eksperimen.

⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Kennedy (1993) menggunakan overhead projector untuk menjamin bahwa seluruh subyek membaca item-item dalam suatu urutan yang dimaksudkan

⁶ Untuk kondisi "kekuatan" diekspresikan pada skala yang dijangkarkan dengan 1 "sangat lemah" dan 7 "sangat kuat", sedangkan dalam kondisi "risiko" dijangkarkan dengan 1 "berisiko rendah" dan 7 "berisiko tinggi".

Tabel 2.
Data Demografis Subyek

Keterangan	Jumlah
Laki-Laki	36
Perempuan	13
Pengalaman:	
• Dibawah 5 tahun	30
• 5 sampai dengan 10 tahun	12
• Diatas 10 tahun	7
Posisi:	
• Staf	27
• Senior	17
• Manajer	1
• Partner	4

Sumber: Olahan Data Primer

4.2 Statistik Deskriptif dan Korelasi

Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif dan Korelasi

Kondisi Perlakuan	Statistis	Judgmen SPI	Keputusan Awal Uji Substantif	Keputusan Akhir Uji Substantif
Risiko/Sekuensial n = 12	• Mean	5,58 ^a	5,16	6,17*
	• Deviasi Standar	1,38	0,83	1,03
				0,455**
Risiko/Simultan n = 11	• Mean	4,63	4,54	5,09*
	• Deviasi Standar	1,28	0,68	1,04
Kekuatan/Sekuensial n = 15	• Mean	2,66	3,20	4,93*
	• Deviasi Standar	1,04	1,01	3,55
				-0,421***
Kekuatan/Simultan n = 11	• Mean	3,54	2,36	5,48*
	• Deviasi Standar	2,06	1,36	4,32

Sumber: Olahan Data Primer

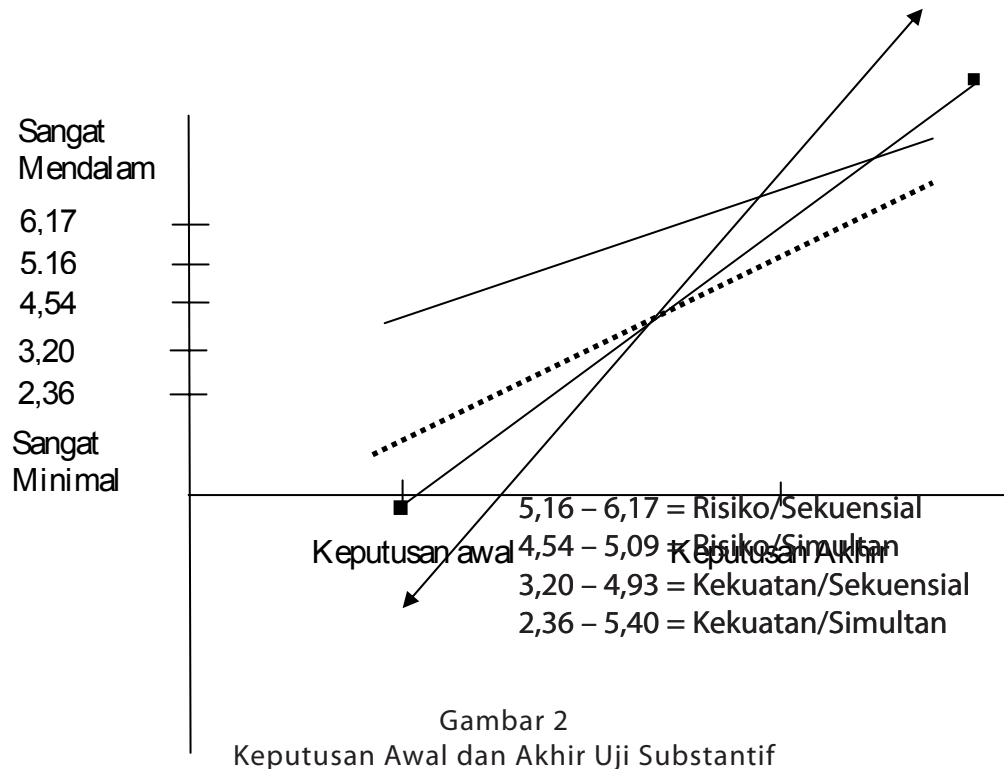
^a Judgmen SPI diperoleh melalui skala “berisiko rendah-berisiko tinggi” untuk kondisi “risiko” dan “sangat lemah-sangat kuat” untuk kondisi “kekuatan”

* Mean meningkat secara signifikan pada level 0,01

** Korelasi antara framing “risiko” dengan keputusan akhir signifikan pada level 0,05

*** Korelasi antara framing “kekuatan” dan keputusan akhir signifikan pada level 0,005

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif yang berisikan informasi tentang perilaku data khususnya tentang mean, deviasi standar dan korelasi untuk keputusan awal dan keputusan akhir tentang uji substantif. Uji t-tes menunjukkan peningkatan keempat kondisi perlakuan dari keputusan awal menuju keputusan akhir secara statistis signifikan



4.3 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan dengan korelasi Pearson untuk melihat kekuatan hubungan antara struktur pengendalian intern dengan uji substantif yang dilakukan seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3 mengindikasikan bahwa ada korelasi positif ($r = 0,455$) antara framing "risiko" judgment struktur pengendalian intern dengan keputusan akhir uji substantif yang dilakukan, artinya semakin tinggi risiko struktur pengendalian intern persediaan maka uji substantif yang dilakukan semakin mendalam/luas. Sebaliknya framing "kekuatan" menunjukkan ada korelasi negatif yang signifikan ($r = -0,421$) dengan keputusan akhir uji substantif, artinya semakin kuat struktur pengendalian intern persediaan maka semakin minimal uji substantif yang dilakukan⁷.

Untuk menguji hipotesis 2, 3 dan 4 menggunakan analysis of covariance (ANCOVA). Tabel 5 menyajikan hasil ANCOVA dengan keputusan awal diperlakukan sebagai covariate⁸.

⁷ Hasil ini konsisten studi-studi yang mengkaji hubungan antara struktur pengendalian intern dengan uji substantif.

⁸ Covariate menyediakan suatu penyesuaian untuk perbedaan awal diantara kelompok. Penyesuaian ini menghasilkan ketepatan estimasi treatment effect. Keputusan awal dijadikan covariate, karena dalam kondisi ini semua subyek menerima perlakuan yang sama atau bisa juga disebut pretest. Dalam eksperimen baik true maupun kuasi, estimasi ANOVA dan ANCOVA menghasilkan ketepatan yang berbeda. Ini terjadi karena ANCOVA dapat mengurangi size dari error variance (Cook dan Campbell, 1979).

Tabel 5
Hasil ANCOVA
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: JUDAKHIR

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	39.783 ^a	4	9.946	5.328	.001
Intercept	66.002	1	66.002	35.357	.000
COVARIAT	.101	1	.101	.054	.817
FRAMING	9.379	1	9.379	5.024	.030
MODE	15.146	1	15.146	8.114	.007
FRAMING*MODE	.274	1	.274	.147	.703
Error	82.135	44	1.897		
Total	1327.000	49			
Corrected Total	121.918	48			

Sumber: Olahan Data Statistik

^aR Squared = .326 (Adjusted a. R Squared = .265)

Tabel 5 menyajikan hasil ANCOVA yang menunjukkan pengaruh framing terhadap keputusan akhir (JUDAKHIR) signifikan pada level 0,05 seperti yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 5,024 dan angka signifikansi sebesar 0,030. Ini berarti hipotesis 1 didukung secara statistik yaitu auditor yang menerima versi "risiko" dari deskripsi detail SPI persediaan akan memilih uji substantif dengan level yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang menerima versi "kekuatan".

Untuk uji hipotesis 2 seperti yang ditunjukkan pada tabel 5 yaitu pengaruh MODE (cara penyajian informasi/bukti) terhadap keputusan akhir (JUDAKHIR) menghasilkan nilai F sebesar 8,114 dan angka signifikansi 0,007. Ini mengindikasikan bahwa pengaruh MODE terhadap keputusan akhir (JUDAKHIR) signifikan, yang berarti mendukung hipotesis 2. Temuan ini mendukung model belief adjustment yaitu apabila auditor disajikan informasi/bukti dengan cara yang berbeda maka akan menghasilkan keputusan akhir yang berbeda⁹.

Hipotesis 4 memprediksi ada interaksi antara FRAMING dan MODE untuk keputusan uji substantif. Dari tabel 5 hasil ANCOVA menunjukkan hipotesis 4 tidak didukung secara statistik yang tercermin dari nilai F sebesar 0,147 dan angka signifikansi sebesar 0,703. Pengujian mean rating keputusan akhir dari empat kondisi eksperimental yang ada menunjukkan tidak adanya differential effect. Artinya cara penyajian secara sekuensial atau simultan tidak diperkuat atau dipengaruhi oleh framing yang diadopsi. Atau dengan kata lain, pengaruh framing terhadap cara penyajian informasi/bukti sekuensial maupun simultan adalah tidak berbeda. Hasil ini tidak konsisten dengan temuan Emby (1994).

5. PENUTUP

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penelitian berhasil mendukung hipotesis 1, 2 dan 3. Hipotesis 4 tidak didukung secara statistik. Hasil uji hipotesis 1 semakin memperkuat tesis bahwa terdapat korelasi antara struktur pengendalian intern (SPI) dengan uji substantif yang akan dilakukan. Semakin lemah SPI maka semakin mendalam uji substantif yang akan dilakukan. Hasil uji hipotesis 2 menyarankan semakin meningkatkan konsistensi dalam

⁹ Studi-studi yang hanya menggunakan bentuk respon sekuensial menemukan pengaruh-pengaruh recency yang signifikan (Ashton dan Ashton [1988], Butt dan Campbell [1989], Pei, Reed, dan Koch [1992], dan Asare [1992]). Sebaliknya, Messier dan Tubbs (1992) hanya menggunakan bentuk respon simultan dan tidak menemukan adanya pengaruh-pengaruh recency. Demikian pula, Tubbs, Messier dan Knechel (1990) menemukan recency dalam bentuk respon sekuensial akan tetapi dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan, mereka menemukan recency dalam kedua bentuk respon baik sekuensial maupun simultan.

pengujian dari konversi judgment tentang pengendalian intern. Sedangkan hasil uji hipotesis 3 merekomendasikan bahwa keputusan yang diambil auditor dalam menentukan kedalaman uji substantif juga dipengaruhi oleh cara penyajian informasi/bukti sebelumnya. Hal ini konsisten dengan model belief adjustment. Auditor harus menyadari bahwa cara penyajian apakah dengan sekuensial atau simultan sama pentingnya dengan isi yang disajikan. Kesadaran atas pengaruh cara penyajian mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang, sehingga memungkinkan auditor bisa mengadopsi teknik-teknik pengolahan informasi yang berbeda. Teknik-teknik tersebut bisa membantu auditor untuk memperbaiki pengaruh primacy atau recency yang mungkin terjadi. Karena pada dasarnya primacy atau recency merupakan bias dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, menyangkut generalisasi temuan (validitas eksternal) yang rendah. Karena subyek yang berpartisipasi hanya berasal dari kota kecil dengan ukuran KAP yang relatif kecil, sehingga jumlah subyeknya kecil. Disamping itu kasus yang diangkat hanya masalah persediaan. Untuk penelitian yang akan datang dimungkinkan menggunakan ukuran KAP yang lebih besar dan KAP yang berafiliasi internasional. Keterbatasan kedua adalah kontrol terhadap pengadministrasian eksperimen, satu KAP yang menjadi tempat eksperimen karyawannya sudah tahu akan dijadikan subyek penelitian, karena diberitahu oleh pimpinannya satu hari sebelum eksperimen.

Untuk penelitian yang akan datang, peneliti yang lain bisa melakukan ekstensi dengan melakukan investigasi untuk mengurangi bias judgment auditor karena pengaruh framing, primacy/recency dan cara penyajian bukti. Beberapa peneliti telah mencoba untuk mengurangi bias yang muncul seperti yang dilakukan oleh Kennedy (1993) dengan akuntabilitas, Messier dan Tubbs (1994) melalui proses review terhadap pekerjaan bawahan selama proses audit dan Cushing dan Ahlawat (1996) melalui proses pendokumentasian bukti-bukti audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlawat, Sunita. (1999), "Order Effects and Memory for Evidence in Individual versus Group Decision Making in Auditing", *Journal of Behavioral Decision Making*, Vol.12., No.1, pp.71- 88.
- Asare, Stephen K.(1992), "The Auditor's Going Concern Decision: Interaction of Task Variables and the Sequential Processing of Evidence", *The Accounting Review*, April, pp.379-93.
- _____, dan Messier. (1991), "A Review of Audit Research Using the Belief Adjustment Model". In *Auditing: Advances in Behavioral Research*, ed L. Ponemon and D. Gabhart, pp.75-92. Ney York.
- Ashton, A.H. and Ashton, R.H. (1988), "Sequential Belief Revision in Auditing", *The Accounting Review*, Vol. 63., No.4, pp.623-641.
- Bazerman, Max H. (1994), *Judgment in Managerial Decision Making*, John Wiley & Sons. Butt, J dan T.L. Campbell. 1989. "The Effects of Information Order and Hypothesis-Testing Strategies on Auditor Judgments". *Accounting, Organizations and Society*, Desember, pp.471-479.
- Cook, Thomas D. and Donald T. Campbell. (1979). *Quasi-Experimentation, Design & Analysis Issues for Field Settings*. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Cushing, Barry and Sunita S. Ahlawat. (1996), "Mitigation of Recency Bias in Audit Judgment: The Effect of Documentation". *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol.5., No.2.
- Emby, Craig. (1994), "Framing and Presentation Mode Effects in Professional Judgment: Auditors Internal Control Judgments and Substantive Testing Decisions", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol.13, pp.102-115.

- Gudono dan Hartadi. (1998), "Apakah Teori Prospek Tepat untuk Kasus Indonesia?: Sebuah Replikasi Penelitian Tversky dan Kahneman". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.1, No.1, hal.29-42.
- Halim, Abdul. 1995. *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. UPP AMP YKPN.
- Hartono, Jogiyanto. (1997). *The Effects of Timing and Order of Earnings and Initiating Dividend Changes on Stock Returns: A Test of Belief-Adjustment Theory*. Disertasi Temple University.
- Hogart, R.M, and Einhorn, H.J. (1992). "Order Effects in Belief Updating: The Belief Adjustment Model". *Cognitive Psychology*, Vol.24, pp.1-55.
- Kahneman, D., and A. Tversky. (1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decisions Under Risk", *Econometrica*, Vol.3, pp.263-291.
- Kennedy, J. (1993). "Debiasing Audit Judgment with Accountability: A Framework and Experimental Results". *Journal of Accounting Research*, Vol.31., No.2, pp.231-245.
- Kida, Thomas. (1984). "The Impact of Hypothesis-Testing Strategies on Auditors's Use of Judgment Data". *Journal of Accounting Research*, Vol.2., No.1..Spring.
- Knechel, W.R. and Messier, W.F. (1990). "Sequential Auditor Decision Making: Information Search and Evidence Evaluation", *Contemporary Accounting Research*, Vol.6., No.2, pp.386-406.
- Messier, W. (1992). "The Sequencing of Audit Evidence: Its Impact on the Extent of Audit Testing and Report Formulation", *Accounting and Business Research*, Spring, pp.143-150.
- McMillan, Jeffrey J. and Richard A. White. (1993). "Auditors' Belief Revisions and Evidence Search: The Effect of Hypothesis Frame, Confirmation Bias, and Professional Skepticism", *The Accounting Review*, Vol.68., No.3, pp. 443-465.
- _____ and Richard M. Tubbs. (1994), "Recency Effects in Belief Revision: The Impact of Audit Experience and the Review Process", *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol.13., No.1, pp.57-72.
- Pei, B.K.; S.A. Reed; and B.S. Koch. (1992), "Auditor Belief Revisions in a Performance Auditing Setting: An Application of the Belief-Adjustment Model". *Accounting, Organizations and Society*, Pebruari, pp.169-183.
- Trotman, K.T. and A. Wright. (1992), "Recency Effects: Task complexity, Decision Mode, and Task-Specific Experience, Working Paper, University of New South Wales.
- Tversky, A., and Kahneman. (1986), "Rational Choice and the Framing Decisions", *Journal of Business*, Vol.10, pp. 251-278.
- Tubbs, R.M., Messier, W.F. and Knechel, W.R. (1990), "Recency Effects in Auditor' Belief Revision Process", *The Accounting Review*, Vol.65., No.2, pp.452-460.

KARAKTERISTIK NASABAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENYALURAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) DI KABUPATEN SLEMAN

Krisna Wijaya
PT. Bank Danamon, Tbk.

Roberto Akyuwen
Email: robertoakyuwen@yahoo.com

Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan

Abstract

Rural community, especially micro business actors, often faced difficulties in accessing credit from various banks. The main reason is an imperfect or asymmetric information of credit applicants which create high risk for banks to meet credit demands. To reduce or eliminate the risks and to secure profits, many banks have then enacted complex requirements and procedures, including collateral, which is difficult to be fulfilled by micro business actors. This situation has become a feature of a relationship between banks and micro business actors in rural areas in different countries. The interest rate which is theoretically the main determined factor of money supply and demand has become insignificant factor in the context of microfinance implementation in rural areas. BRI as the most important institution in rural microfinance in Indonesia has had a long experienced in deal with above phenomenon through a product credit named Rural Creditor Kupedes. Success stories about Kupedes have been studied by many domestic and international researches in various aspects. Different to those studies, this research is aimed to analyze Kupedes debtor characteristics in Kabupaten Sleman, Jogjakarta Province, and its impacts on the quantity of credit fund received by those customers.

Keywords: micro business actors, microfinance, Rural Credit, debtor characteristics.

1. PENDAHULUAN

Salah satu pelaku penting dalam pembangunan ekonomi adalah bank melalui intermediasi keuangan. Peran bank di Indonesia dimulai sejak beroperasinya Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 16 Desember 1895 yang dilandasi keprihatinan R. Aria Wiriatmadja melihat kesulitan “wong cilik” menghadapi lintah darat di pedesaan. BRI hingga saat ini senantiasa berpihak kepada rakyat kecil melalui perluasan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bahkan memfasilitasi simpan pinjam berskala “gurem”.

Kegiatan BRI sejalan dengan langkah pemerintah memberdayakan masyarakat di pedesaan. Produk kredit yang dikeluarkan BRI meliputi Kredit Bimas (1969-1984), Kredit Mini dan Kredit Midi (1980), dan Kupedes (1984 hingga sekarang). Untuk menangani produk tersebut, dibentuk BRI Unit Desa pada tahun 1964 dan dipertahankan hingga tahun 1984 dengan prestasi terbaik menopang Program Bimas melalui penyaluran kredit kepada petani padi, sehingga swasembada beras dapat dicapai pada tahun 1984.

Pada tahun 1985, BRI Unit Desa berganti nama menjadi BRI Unit mengikuti transformasi dari menangani kredit yang bersumber dari pemerintah menjadi berorientasi pasar. Kredit Bimas digantikan oleh Kredit Usaha Tani (KUT) yang disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Kantor BRI di pedesaan tidak hanya menangani aktivitas agraris, namun disesuaikan dengan potensi ekonomi wilayah. Kredit Mini dan Kredit Midi dihentikan dan digantikan oleh Kupedes dan Simpanan Pedesaan (Simpedes).

Kupedes merupakan skema kredit bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat perbankan. Penggunaan dana terutama untuk modal kerja dan investasi dengan prosedur sederhana, namun tetap berhati-hati. Non-performing loan (NPL) Kupedes secara nasional selama periode 1997-2008 tercatat hanya 1,38 persen per tahun.

Keberhasilan Kupedes mengundang banyak penelitian akademis menggunakan BRI Unit Desa. Yaron, Charitonenko, dan Benjamin (2000) menyimpulkan BRI Unit Desa merupakan representasi pembiayaan perdesaan yang efisien. Peneliti lain adalah Maurer dalam CGAP (2004), Patten dan Rosengard (1991), Rukma (2002), Seibel dan Schmidt (2000), Yaron (1992) dalam Chaves dan Gonzalez-Vega (1993).

Penelitian-penelitian tersebut mengkaji dampak kebijakan kredit BRI, namun karakteristik nasabah yang mempengaruhi komitmen belum dianalisis secara komprehensif. Padahal, Bloemer, Oederken-Schroder, dan Martens (2003: 16) mengungkapkan komitmen merupakan penentu terpenting loyalitas nasabah bank. Bentuk komitmen dapat dilihat dari pujian, perhatian terhadap produk bank, tidak sensitif terhadap bunga, dan keluhan.

Dibalik keberhasilan, beragam persoalan muncul dalam pelaksanaan Kupedes. Persoalan pertama adalah lebih tingginya dana yang disimpan dibandingkan kredit yang disalurkan. Selama tahun 1997-2008, rata-rata loan to deposit ratio (LDR) di seluruh BRI Unit secara nasional hanya 59,01 persen.

Persoalan kedua terkait peningkatan Kupedes untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT) yang konsumtif. Peningkatan ini menurunkan alokasi untuk sektor produktif, namun tidak hanya terjadi di Indonesia, seperti ditemukan Harmanta dan Ekananda (2005). Gejala serupa terjadi pula di Korea Selatan, Malaysia dan Thailand (Enya, 2004 dan Ghost dan Ghost, 1999), bahkan di negara maju, seperti Jerman (Nehls dan Schmidt, 2003) dan Amerika Serikat (Clair dan Tucker, 1993).

Aspek lain adalah tingkat bunga Kupedes, di mana terjadi peningkatan dari 12 persen untuk modal kerja dan 18 persen untuk investasi menjadi 24 persen per tahun untuk keduanya. Bunga saat ini berkisar 1,25-2,5 persen per bulan (flat). Tingkat bunga tinggi menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan BRI kepada pelaku usaha mikro. BRI dipandang lebih mementingkan profit dengan menyedot dana masyarakat kecil. Nasabah dimanfaatkan komitmen dan loyalitasnya, sehingga tidak sensitif terhadap bunga.

Penelitian mengenai Kupedes sangat menarik dan penting. Penelitian ini dilakukan di BRI Unit yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman. Secara administratif, BRI Unit tersebut berada di bawah kendali Kantor Cabang BRI Sleman dan Kantor Wilayah BRI Yogyakarta.

Tabel 1
Jumlah BRI Unit, Simpedes, Kupedes, dan LDR
Kantor Cabang BRI se-Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2008

Kantor Cabang BRI	Jumlah BRI Unit	Simpedes (Rp Juta)	Kupedes (Rp Juta)	LDR (%)
Katamso	24	241.139	167.063	69,00
Sleman	28	439.316	206.414	47,00
Bantul	22	299.489	194.168	65,00
Wonosari	19	128.794	126.863	99,00
Wates	21	197.790	110.621	56,00
Total	114	1.306.528	805.129	62,00

Sumber: Kantor Wilayah BRI Yogyakarta.

Keterangan: Termasuk KUR Rp 108,59 milyar dan total nasabah 38.783 orang.

Pengaruh karakteristik nasabah terhadap penawaran dan permintaan kredit telah diteliti Grant dan Vella (2004) di Amerika Serikat. Variabel yang diamati terdiri dari jenis kelamin, pendidikan, usia, dan pendapatan, serta dianalisis menggunakan semi-parametric multiple index dan least square procedure. Ditemukan bahwa rumah tangga tunggal yang dipimpin laki-laki menerima kredit lebih banyak dibanding yang dipimpin perempuan.

Penawaran kredit meningkat seiring tingginya pendidikan, usia, dan pendapatan nasabah. Sebaliknya, permintaan kredit menurun dengan bertambahnya usia dan pendapatan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh karakteristik nasabah terhadap dana Kupedes yang disalurkan. Pemilihan Sleman sebagai lokasi penelitian dilandasi oleh:

1. Kantor Cabang Sleman memiliki nilai historis sebagai Kantor Cabang pertama yang menjadi tempat pencahangan BRI Unit Desa menjadi BRI Unit pada tahun 1968;
2. jumlah BRI Unit di Kantor Cabang Sleman (28 BRI Unit) adalah terbanyak jika dibandingkan dengan Kantor Cabang BRI lainnya di Provinsi D. I. Yogyakarta;
3. nasabah Kupedes dan Simpedes di Kantor Cabang BRI Sleman adalah tertinggi; dan
4. jumlah Kupedes yang pada tahun 2007 mencapai Rp 168,73 dan Simpedes Rp 395,65 milyar adalah tertinggi.
5. LDR di BRI Cabang Sleman merupakan yang terendah (43 persen).

Fakta tersebut menggambarkan disintermediasi di BRI Cabang Sleman. Gejala yang sering pula disebut *credit crunch* perlu dicermati dalam mempertahankan keberlanjutan produk kredit. Beberapa peneliti yang mengkaji disintermediasi adalah Agung, dkk (2001), Clair dan Tucker (1993), Enya, Kohsaka, dan Pobre (2004), Gosh dan Gosh (1999), Harmanta dan Ekananda (2005), dan Nehls dan Schmidt (2003).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pasar kredit pedesaan di negara berkembang menurut Hoff dan Stiglitz (1990) dalam Nguyen (2007: 2) tidak sempurna dan terfragmentasi. Segmen peminjam berbeda memiliki akses yang berbeda pula terhadap jenis pinjaman. Beberapa peminjam merasa terabaikan atau mendapatkan pinjaman lebih kecil, sehingga mencari rentenir, meskipun lebih mahal. Aleem (1990) dalam Nguyen (2007: 2) melaporkan rentenir di Pakistan mengenakan bunga 80 persen per tahun dengan deviasi 40 persen.

Kebanyakan usaha mikro di pedesaan sulit mengakses kredit melalui skema formal. Penyebabnya tidak hanya karena skema yang tidak sesuai, tetapi juga persyaratan. Lembaga kredit formal umumnya mengajukan syarat agunan berupa tanah, aset tetap, jaminan instansi pemerintah, atau regulasi lain yang sulit dipenuhi petani miskin.

Pembiayaan informal menetapkan syarat jauh lebih mudah. Pemberi pinjaman dan peminjam tinggal di kawasan yang sama, sehingga saling mengenali. Kreditur tidak mensyaratkan agunan dan dorongan mengembalikan pinjaman semata-mata dilandasi saling percaya. Strategi mendekati unit kerja kepada nasabah telah lama ditempuh BRI melalui BRI Unit yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia.

Gerakan keuangan mikro berupaya menemukan cara menjangkau penduduk miskin secara efisien. Terdapat peningkatan cerita sukses dan lembaga keuangan mikro (LKM) dilaporkan menjangkau lebih dari 80 juta penduduk miskin. Studi di Vietnam membuktikan kredit formal berpengaruh positif terhadap konsumsi peminjam, sedangkan dampak kredit informal bervariasi (Nguyen, 2007: 13).

Yaron (1992) dalam Chaves dan Gonzalez-Vega (1993) menemukan BRI Unit Desa dan BKK mencapai indeks ketergantungan terhadap subsidi dan indikator lain lebih baik dibandingkan Grameen Bank di Bangladesh dan Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) di Thailand. Pattendan Rosengard (1991) menemukan rasio kehilangan pinjaman jangka panjang BRI Unit Desa dan BKK hanya 1,35 persen dan 1,98 persen, di samping sangat menguntungkan.

Menurut Yaron (1992) dalam Chaves dan Gonzalez-Vega (1993: 3) terdapat 2 kriteria keberhasilan pembiayaan pedesaan. Kriteria pertama adalah *self-sustainability*, di mana lembaga pembiayaan mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi semua *opportunity cost*. Kriteria kedua adalah jumlah nasabah dan kualitas pelayanan. BRI telah mencapai kesuksesan dalam kedua kriteria ini.

Rancangan kelembagaan serta kebijakan yang sesuai membuat lembaga pembiayaan di pedesaan mencapai keberlanjutan dan jangkauan yang luas (Yaron, Benjamin, dan Charitonenko, 1998: 147). Meskipun difokuskan pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan serta mengurangi kemiskinan, namun tantangan

yang dihadapi. Pembiayaan dilakukan secara efisien dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung, memperbaiki kerangka kerja hukum dan peraturan, serta mengatasi kegagalan pasar.

Menurut Seibel dan Schmidt (2000: 1), kasus BRI merupakan bukti bahwa bank dapat ditransformasikan menjadi lembaga yang sangat menguntungkan dan mandiri. BRI memasarkan produk tabungan dan kredit mikro kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan bunga pasar. Pinjaman eksternal digantikan tabungan sebagai sumber pembiayaan, biaya operasi ditutup melalui margin bunga, dan ekspansi dibiayai melalui keuntungan.

Maurer dalam CGAP (2004: 95) menegaskan BRI Unit merupakan LKM paling besar dan berhasil di dunia. Sejumlah 3.855 BRI Unit yang merupakan outlet kecil dengan rata-rata 4 karyawan tersebar di seluruh Indonesia dan melayani 25 juta penabung dan 3,7 juta peminjam. BRI Unit menerapkan pendekatan menguntungkan dan berkelanjutan yang didasari mobilisasi tabungan lokal tanpa subsidi. Faktor yang mendorong reformasi BRI Unit adalah kepemimpinan efektif, komitmen kuat, dan dukungan politik. Kelembagaan BRI Unit merupakan sistem yang mengkombinasikan standarisasi dan fleksibilitas.

Penyaluran kredit sering menunjukkan fenomena credit crunch. Ghosh dan Ghosh (1999) meneliti credit crunch di Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand pada tahun 1997-1998. Model penawaran kredit bank (C_t^s) diasumsikan tergantung pada tingkat bunga riil (r_t), tingkat output (y_t), dan kapasitas penyaluran kredit riil (I_t).

$$C_t^s = \beta_0^s + \beta_1^s (r_t - r_t^d) + \beta_2^s I_t + \beta_3^s y_t + \epsilon_t^s \dots\dots\dots (1)$$

Adapun model permintaan (C_t^d) adalah:

$$C_t^d = \beta_0^d + \beta_1^d r_t + \beta_2^d y_t + \beta_3^d y_t^{gap} + \beta_4^d s_t^p + \beta_5^d \pi_t + \epsilon_t^d \dots\dots\dots (2)$$

di mana s_t^p adalah harga saham dan π_t adalah inflasi.

Berbeda dengan Ghosh dan Ghosh (1999), model yang digunakan Enya, Kohsaka, dan Pobre (2004: 4-5) adalah:

$$LD_t = \alpha_1 + \alpha_2 i_t + \alpha_3 X_t^D + \epsilon_t^D \dots\dots\dots (3)$$

$$LS_t = \beta_1 + \beta_2 i_t + \beta_3 X_t^S + \epsilon_t^S \dots\dots\dots (4)$$

di mana LD_t adalah permintaan kredit, LS_t adalah penawaran kredit, i_t adalah tingkat penyaluran kredit, serta X_t^D dan X_t^S adalah sekumpulan variabel independen. Variabel independen yang mempengaruhi permintaan kredit terdiri dari indeks produksi industri (IP), deviasi IP dari tren jangka panjang, inflasi (π), dan variabel boneka. Variabel yang mempengaruhi penawaran kredit ditambah dengan selisih antara pinjaman dengan aset bebas resiko (R), kapasitas penyaluran pinjaman (LC), dan aset bebas (GSEC).

Fungsi penawaran dan permintaan juga digunakan Harmanta dan Ekananda (2005) untuk menganalisis fungsi perbankan pasca krisis 1997.

$$L_t^S = \alpha_0 + \alpha_1 KAPBU_t + \alpha_2 RCRBU_t + \alpha_3 RSBI_t + \alpha_4 NPL_t + \alpha_5 DUMMY_t + \epsilon_t \dots\dots\dots (5)$$

$$L_t^D = \beta_0 + \beta_1 PDBRIIL_t + \beta_2 SPRDBU_t + \beta_3 KURS_t + \beta_4 IHSG_t + \beta_5 INFLMTM_t + \epsilon_t \dots\dots\dots (6)$$

di mana $L_t^S = CRBU$ adalah kredit yang disalurkan bank umum, KAPBU adalah kapasitas kredit, RCRBU adalah bunga; RSBI adalah SBI, NPL adalah non performing loan, DUMMY bernilai 0 untuk Januari 1993-1997 dan 1 untuk Juli 1997-Desember 2003, $L_t^D = CRBU$ adalah kredit yang diminta, PDBRIIL adalah PDB, SPRDBU adalah

selisih bunga kredit dikurangi deposito, KURS adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar, IHSG adalah indeks harga saham gabungan, dan INFLMTM adalah laju inflasi bulanan.

2.1 Lembaga Keuangan Bank dan Penyaluran Kredit

Lembaga keuangan menjadi perantara pihak yang kelebihan dan kekurangan dana dengan profit optimal pada selisih terbesar antara penerimaan bunga dan biaya. Fungsi ini menjadikan bank sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, menurut Fry (1995: 320), kinerja bank di negara berkembang perlu dikritisi. Fry (1995: 428) menemukan India, Indonesia, dan Korea Selatan memberlakukan suku bunga berdasarkan kriteria nonrisk dan noncost, yaitu mempertimbangkan margin, agunan, jumlah pinjaman, jangka waktu, sumber dana, kelompok peminjam, sektor, dan wilayah.

Bank menyalurkan pinjaman dengan fokus pada pasar yang dikenal. Pertumbuhan pinjaman dibatasi untuk menjaga likuiditas, sehingga sebagian bank mengurangi peran sebagai penyedia dana investasi dan menjual surat berharga untuk mendapatkan fee. Bank lain memandang pinjaman sebagai jalur utama untuk menjaga keberlanjutan, sehingga aktif mencari nasabah baru dan usaha komersial. Investasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peminjam, sehingga menguntungkan (MacDonald dan Koch, 2006: 344).

Tujuan bank menyalurkan pinjaman adalah menghasilkan profit dengan resiko minimal, sehingga banya bank menargetkan pasar tertentu, di mana karyawannya memiliki keahlian dan pengalaman. Alternatif yang tersedia berkisar antara keseimbangan volume dan kualitas pinjaman yang disesuaikan dengan likuiditas, kendala modal, dan rate of return. Proses kredit sangat tergantung pada sistem yang memungkinkan petugas kredit mengevaluasi trade-off di antara resiko dan tingkat pengembalian.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro

Keuangan mikro dapat mengurangi kemiskinan dan mempercepat perubahan sosial. Karakteristik LKM berbeda dengan lembaga keuangan skala besar/komersial, namun belum didiskusikan secara tuntas, khususnya dalam hal interaksi dengan nasabah (de Aghion dan Morduch, 2005: 3). Program keuangan mikro telah menciptakan peluang bagi penduduk di sepanjang Sungai Amazon, di tengah kota Los Angeles, hingga Bosnia. Banyak program telah dilaksanakan dengan baik di Bolivia, Bangladesh, Indonesia, Meksiko, Cina, dan India. Pada akhir 2002, 67,6 juta nasabah yang dilayani 2.572 LKM di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 41,6 juta masih tergolong penduduk miskin.

Menurut de Aghion dan Morduch (2005: 5), keuangan mikro sangat mengejutkan. Salah satu pelajaran pengantarekonomi adalah *diminishing marginal returns to capital* yang menyatakan perusahaan dengan modal kecil menghasilkan pengembalian investasi lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar. Perusahaan mikro dan kecil seharusnya mampu membayar bunga lebih tinggi dibandingkan perusahaan menengah atau besar. Dana seharusnya mengalir dari pemilik deposito yang kaya kepada perusahaan mikro dan kecil.

Prinsip *diminishing returns* diturunkan dari fungsi produksi konkaf. Berarti lebih banyak output apabila melakukan investasi lebih besar. Tetapi, setiap tambahan unit modal akan menghasilkan tambahan keuntungan yang semakin mengecil. Tambahan pendapatan sangat penting, karena menentukan kemampuan peminjam membayar kembali dana.

Jika *diminishing marginal returns to capital* benar, maka investor lebih baik mengarahkan dana ke negara miskin, di mana modal relatif langka, daripada berinvestasi di New York, London, dan Tokyo. Uang seharusnya mengalir dari bumi utara ke selatan, karena investor mencari profit. Lucas Jr. (1990) menemukan peminjam di India mampu membayar 58 kali lebih banyak dibandingkan di Amerika Serikat. Temuan Lucas tidak terjadi dalam realitas, sehingga menimbulkan pertanyaan: Mengapa investasi justru mengalir dari negara miskin menuju negara kaya? Mengapa perusahaan besar lebih mudah untuk memperoleh pembiayaan bank dibandingkan usaha kecil?

Ledgerwood (1999: 34) menegaskan LKM melayani pasar yang belum tersentuh dengan mengisi kesenjangan pembiayaan dan mengintegrasikan kelompok yang belum terlayani ke dalam pasar. Studi Bank Dunia tahun 1996 menemukan 3 tujuan LKM, yaitu:

1. menciptakan pekerjaan dan pendapatan melalui perluasan usaha mikro;
2. meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan; serta
3. mengurangi ketergantungan rumah tangga terhadap pertanian melalui diversifikasi aktivitas yang menghasilkan pendapatan.

Banyak organisasi mendorong pertumbuhan LKM, meskipun hasilnya sering mengecewakan. Pemberi pinjaman dipandang melakukan eksploitasi, karena kondisi peminjam sangat miskin dan tidak memiliki alternatif lain mendapatkan modal, selain menerima bunga tinggi. Hardy, Holden, dan Prokopenko (2002) menganalisis pengembangan LKM di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Benua Afrika diwakili Ethiopia dan Zambia, Asia diwakili Indonesia, dan Amerika Selatan diwakili Peru dan Chili.

Sistem BRI Unit dipandang berhasil, karena beroperasi sebagai pusat profit dan memiliki otonomi (Chaves dan Gonzalez-Vega, 1993; Hardy, Holden, dan Prokopenko, 2002; Robinson, 1992; Seibel dan Schmidt, 2000; dan Yaron, Charitonenko, dan Benjamin, 2000). Mantri menegakkan kontrak dan memantau perilaku peminjam yang diharuskan mendapat referensi dari orang yang dipercaya dalam komunitas lokal. Pinjaman diberikan tanpa agunan dengan asumsi reputasi berperan melawan kegagalan pengembalian pinjaman. Nasabah didorong mengembalikan pinjaman secara berkala dan mendapat insentif berupa pengurangan tingkat bunga bagi pengembalian yang lancar.

2.3 Disintermediasi Fungsi Bank

Pembiayaan investasi di negara berkembang didominasi kredit bank, sehingga penurunan ekonomi sering dikaitkan dengan melambatnya penyaluran kredit. Meskipun kondisi ekonomi makro Indonesia membaik, namun kredit belum menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Fungsi intermediasi belum pulih, baik untuk pembiayaan usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro.

Penurunan kredit mempunyai implikasi terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Apabila bank menunda kredit, maka peningkatan likuiditas guna menstimulasi permintaan agregat tidak efektif menaikkan permintaan kredit. Sebaliknya, jika rendahnya kredit disebabkan sektor usaha mengurangi permintaan, maka ekspansi fiskal dapat meningkatkan permintaan agregat. Terjadinya credit crunch akibat keengganan bank menyalurkan kredit dapat menyebabkan kebijakan moneter tidak tertransmisi kepada sektor riil.

2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini sebagai berikut

- H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H2 : Usia berpengaruh positif terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H3 : Jenis kelamin berpengaruh terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H4 : Status nasabah berpengaruh terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H5 : Jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H6 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H7 : Dana Kupedes berpengaruh positif terhadap pendapatan nasabah.
- H8 : Agunan berpengaruh terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H9 : Lama waktu nasabah berhubungan dengan BRI berpengaruh positif terhadap dana Kupedes yang diterima.
- H10 : Jarak tempat tinggal berpengaruh negatif terhadap dana Kupedes yang diterima.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, focused group discussion (FGD), dan survei. Wawancara dilakukan dengan pengambil keputusan mengenai Kupedes, sedangkan FGD dilaksanakan 2 kali di Kantor Wilayah BRI Yogyakarta. Peserta setiap kali FGD berkisar

40 orang, terdiri dari pimpinan dan karyawan Kantor Cabang BRI Sleman, BRI Unit, nasabah, dan akademisi. Adapun responden survei adalah karyawan BRI Unit dan nasabah Kupedes di 17 Kecamatan. Pokok-pokok pertanyaan meliputi menyangkut karakteristik nasabah meliputi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan, jabatan, pendapatan, dana yang diterima, agunan, periode kredit, dan jarak tempat tinggal. Di samping itu, ditanyakan pula jumlah dana Kupedes yang diterima. **Data sekunder** diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D. I. Yogyakarta, Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, Kantor Cabang BRI Sleman, dan BRI Unit.

3.2 Pengambilan Sampel

Kantor Cabang BRI Sleman memiliki 27 BRI Unit di 17 Kecamatan dengan nasabah Kupedes 13.291 orang yang dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kupedes K3, menerima kredit maksimum Rp 3.000.000 dan tidak memerlukan jaminan tambahan dalam pengajuan kredit. Kredit digunakan sebagai modal kerja dan investasi.
2. Kupedes Umum, dengan pinjaman lebih dari Rp 3.000.000 dan membutuhkan agunan tambahan. Kredit juga digunakan untuk modal kerja dan investasi.
3. Kupedes GBT, sulit dibedakan di antara modal kerja, investasi, atau konsumtif.

Pada setiap Kecamatan dipilih 1 BRI Unit, sehingga seluruhnya terdapat 17 BRI Unit. Dari setiap BRI Unit ditetapkan sampel 10 persen dari setiap klasifikasi nasabah Kupedes dan dipilih secara acak. Penetapan nasabah secara proporsional sangat penting, mengingat penelitian ini juga melakukan telaahan kualitatif secara mendalam.

3.3 Model dan Cara Analisis

Analisis data dilakukan dengan regresi cross-section untuk mengestimasi pengaruh variabel karakteristik nasabah terhadap dana Kupedes yang disalurkan kepada nasabah.

$$v_i = \alpha_0 + \alpha_1 E_i + \alpha_2 A_i + \alpha_3 S_i + \alpha_4 M_i + \alpha_5 F_i + \alpha_6 I_i + \alpha_7 C_i + \alpha_8 R_i + \alpha_9 D_i + \epsilon_i \dots\dots\dots (7)$$

di mana v_i adalah dana yang disalurkan kepada responden (Rp), E_i adalah pendidikan nasabah dengan dummy variable, A_i adalah usia (tahun), S_i adalah jenis kelamin dummy variable, M_i adalah status perkawinan dengan dummy variable, F_i adalah jumlah anggota keluarga (orang), I_i adalah pendapatan per bulan (Rp), C_i adalah kepemilikan agunan dengan dummy variable, R_i adalah lama berhubungan dengan BRI (tahun), D_i jarak tempat tinggal (km), α_0 adalah konstanta, α_{1-9} adalah koefisien pengaruh variabel independen, dan ϵ_i adalah error term. Estimasi model dilakukan dengan ordinary least squares (OLS).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden

Nasabah Kupedes di BRI Cabang Sleman mencapai 13.291 orang. Dari populasi penelitian ini diambil sampel 1.329 orang atau 10 persen dengan memperhatikan proporsi di setiap BRI Unit. Setelah dilakukan survei, diperoleh hasil kuesioner yang layak diolah dari 1.248 responden atau 9,39 persen dari populasi. Jumlah sampel terbanyak diperoleh dari BRI Unit Berbah, yaitu 98 orang atau 7,85 persen, kemudian BRI Unit Moyudan 94 orang atau 7,53 persen. Adapun sampel paling sedikit diperoleh dari BRI Unit Cangkringan, yaitu 41 responden atau 3,29 persen.

Persentase sampel terhadap populasi yang tertinggi adalah di BRI Unit Godean I mencapai 13,23 persen, meskipun sampel di BRI Unit ini (88 orang) bukan yang terbanyak. Persentase sampel terbesar kedua dijumpai di BRI Unit Kalasan, yaitu 13,54 persen, kemudian BRI Unit Sleman 12,16 persen. BRI Unit lain yang memiliki sampel lebih dari 10 persen adalah BRI Unit Gamping (11,68 persen), Moyudan (11,66 persen), Pakem (11,05 persen), Prambanan (10,18 persen), dan Mlati (10,11 persen).

Dalam survei didapatkan 818 responden nasabah Kupedes Umum atau 65,54 persen dari total nasabah

yang disurvei. Proporsi terbesar kedua Kupedes GBT dengan responden 285 orang atau 22,84 persen. Adapun nasabah Kupedes K3 145 orang atau 11,62 persen.

Responden laki-laki mencapai 62,66 persen atau 782 orang, sedangkan perempuan 466 orang atau 37,34 persen. Rata-rata usia 50,17 tahun dengan responden tertua di BRI Unit Ngaglik, yaitu rata-rata 55,39 tahun. Rata-rata usia termuda terdapat di BRI Unit Cangkringan, yaitu 44,8 tahun. Usia tertua (86 tahun) ditemukan pada responden Kupedes GBT laki-laki di BRI Unit Berbah. Sebaliknya, responden termuda (22 tahun) ditemukan pada 3 responden, yaitu di BRI Unit Ngemplak I, Tempel II, dan Sleman. Responden terbanyak berada pada kisaran usia 40-49 tahun, yaitu 324 orang atau 25,96 persen.

Tabel 2
Populasi dan Sampel Nasabah Kupedes

No.	BRI Unit	Populasi (Orang) (%)	Sampel (Orang) (%)	Persentase (%)
1.	BRI Unit Minggir II	856 6,44	70 5,61	8,18
2.	BRI Unit Ngemplak I	695 5,23	56 4,49	8,06
3.	BRI Unit Cangkringan	871 6,55	41 3,29	4,71
4.	BRI Unit Pakem	552 4,15	61 4,89	11,05
5.	BRI Unit Berbah	1.051 7,91	98 7,85	9,32
6.	BRI Unit Mlati	732 5,51	74 5,93	10,11
7.	BRI Unit Sayegan	953 7,17	80 6,41	8,39
8.	BRI Unit Godean I	650 4,89	88 7,05	13,54
9.	BRI Unit Ngaglik	869 6,54	56 4,49	6,44
10.	BRI Unit Moyudan	806 6,06	94 7,53	11,66
11.	BRI Unit Prambanan	933 7,02	95 7,61	10,18
12.	BRI Unit Kalasan	688 5,18	91 7,29	13,23
13.	BRI Unit Ambarukmo	793 5,97	55 4,41	6,94
14.	BRI Unit Tempel II	747 5,62	57 4,57	7,63
15.	BRI Unit Sleman	684 4,39	71 5,69	12,16
16.	BRI Unit Gamping	702 5,28	82 6,57	11,68
17.	BRI Unit Turi	809 6,09	79 6,33	9,77
	Jumlah	13.291 100,00	1.248 100,00	9,39

Sumber: Hasil analisis data primer.

Tingkat pendidikan responden yang dominan adalah SMA atau sederajat yang dimiliki 512 responden atau 41,03 persen. Urutan kedua tamatan SD atau sederajat yang dijumpai pada 301 responden atau 24,12 persen. Urutan selanjutnya tamat SMP atau sederajat, yaitu 225 orang atau 18,03 persen. Tingkat pendidikan tertinggi, yaitu tamatan Diploma/Sarjana dimiliki 166 responden atau 13,31 persen, sedangkan responden yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD sebanyak 44 orang atau 3,53 persen.

Dari total 1.248 responden, terdapat 1.223 nasabah Kupedes atau 98 persen telah menikah. Responden yang belum menikah hanya 25 orang atau 2 persen. Status telah menikah memudahkan pengikatan kredit yang membutuhkan tanda tangan suami dan isteri.

Jumlah anggota keluarga rata-rata 4,04 orang per responden. Nasabah Kupedes di BRI Unit Ngemplak I memiliki anggota keluarga terbanyak, yaitu rata-rata 5,21 orang untuk setiap responden, sedangkan nasabah di BRI Unit lain rata-rata memiliki anggota keluarga kurang dari 5 orang. Jumlah anggota keluarga per responden paling sedikit, yaitu 3,28 orang dijumpai di BRI Unit Moyudan.

Wiraswasta merupakan jenis pekerjaan paling banyak ditekuni responden, yaitu 636 nasabah atau 50,96 persen. Pensiunan menempati urutan selanjutnya 225 orang atau 18,03 persen, kemudian diikuti petani 138 nasabah atau 11,06 persen. Jenis pekerjaan lain, seperti ibu rumah tangga, peternak, anggota TNI/Polri, aparat Desa/Kelurahan/ Kecamatan, buruh, supir, penambang pasir, tukang, dan dukun bayi mempunyai proporsi relatif kecil.

Pendapatan rata-rata responden Rp 1.416.251 per bulan dengan kisaran dari terendah Rp 250.000 per bulan hingga tertinggi Rp 15.000.000 per bulan. Pendapatan terendah dimiliki 2 responden, yaitu 1 orang di BRI Unit Godean I dan 1 orang di BRI Unit Prambanan. Rata-rata pendapatan tertinggi dimiliki responden di BRI Unit Ambarukmo, yaitu Rp 2.186.818 per bulan. Pendapatan terendah dimiliki responden di BRI Unit Ngaglik, yaitu Rp 1.055.696 per bulan.

Rata-rata Kupedes diberikan Rp 11.824.502 per nasabah dengan BRI Unit yang menyalurkan pinjaman tertinggi adalah BRI Unit Prambanan dengan rata-rata pinjaman Rp 17.578.947 per nasabah. Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan pinjaman terendah yang diberikan di BRI Unit Gamping, yaitu Rp 8.868.902 untuk setiap nasabah.

Sebagian besar responden memperoleh Kupedes hingga Rp 3.000.000, yaitu 296 orang atau 23,72 persen dari total responden. Urutan kedua adalah antara Rp 3.000.001-Rp 6.000.000 yang didapatkan 277 nasabah atau 22,20 persen. Urutan selanjutnya berkisar dari Rp 9.000.0001-Rp 12.000.000 yang didapatkan oleh 207 nasabah atau 16,59 persen. Kisaran fasilitas Kupedes lainnya relatif lebih kecil.

Sebagian besar responden menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan, yaitu 808 nasabah atau 64,74. Jenis agunan lain adalah SK Pensiun yang digunakan 200 nasabah atau 16,03 persen. SK Pensiun bersama SK Pegawai (16 nasabah atau 1,28 persen) menjadi ciri nasabah Kupedes GBT. BPKB merupakan agunan yang digunakan 136 nasabah, selain terdapat 42 nasabah atau 3,37 persen menggunakan Surat Tanah (Letter C) dan 2 nasabah atau 0,16 persen menggunakan alat rumah tangga. Adapun nasabah yang mendapat Kupedes tanpa agunan 44 nasabah atau 3,53 persen.

Rata-rata jangka waktu pinjaman responden adalah 2,32 tahun atau berkisar 28 bulan. Jangka pinjaman paling pendek, yaitu 3 bulan, diberikan kepada seorang nasabah Kupedes K3 laki-laki berusia 45 tahun dan berpendidikan SMA. Nasabah petani tersebut mendapatkan Kupedes Rp 3.000.000 dengan agunan sertifikat tanah. Adapun jangka waktu pinjaman yang paling lama adalah 5 tahun yang dijalani oleh banyak responden.

Jangka pengembalian Kupedes terbanyak adalah antara 13-24 bulan, yaitu 572 nasabah atau 45,83 persen. Jangka waktu kedua 25-36 bulan yang dijalani 286 nasabah atau 22,92 persen. Jumlah ini lebih banyak dibanding jangka 1-12 bulan yang diberikan kepada 268 nasabah atau 21,47 persen. Dua jangka waktu terakhir antara 49-60 bulan dan antara 37-48 bulan dijalani 72 responden atau 5,77 persen dan 50 responden atau 4,01 persen.

Rata-rata nasabah telah berhubungan 10,03 tahun dengan BRI Unit. Nasabah terlama di BRI Unit Tempel II, di mana rata-rata telah berhubungan selama 14,96 tahun. Hubungan paling singkat dijumpai di BRI Unit Cangkringan, yaitu rata-rata 5,56 tahun.

Rata-rata jarak tempat tinggal nasabah relatif dekat dengan Kantor BRI Unit, yaitu 3,12 km. Jarak terjauh 5,03 km dimiliki nasabah Kupedes di BRI Unit Turi. Adapun rata-rata jarak terdekat dijumpai pada nasabah Kupedes di BRI Unit Minggir II, yaitu 2 km.

4.2 Pengaruh Karakteristik Nasabah terhadap Dana Kupedes

4.2.1 Tingkat Pendidikan

Karakteristik adalah kondisi diri nasabah atau calon nasabah dan menjadi penentu bagi Mantri dalam menentukan dana Kupedes yang layak diterima. Semakin baik karakteristik nasabah, maka semakin besar pula dana yang layak diberikan. Namun, tidak semua karakteristik berpengaruh signifikan terhadap fasilitas Kupedes.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap fasilitas Kupedes yang diterima. Semakin tinggi tingkat pendidikan nasabah, maka semakin besar pula Kupedes yang diterima nasabah yang bersangkutan.

$$v_i = 7.860.732 + 1.071.002 E_i + 51.830,9 A_i + 6,745556 I_i + 3.586.593 C_i + 132905,9 R_i - 295524,7 D_i + \epsilon_i \quad (8)$$

Pengaruh tingkat pendidikan yang positif terhadap Kupedes sejalan dengan hasil penelitian Rahman et al. (2009: 189). Dalam penelitian tersebut disimpulkan usia dan tingkat pendidikan berdampak signifikan dan positif terhadap kondisi kesejahteraan rumah tangga peminjam dalam program kredit mikro. Hal ini dimungkinkan, karena pendidikan menjadi faktor penentu yang penting terhadap tingkat pendapatan seseorang.

4.2.2 Usia

Sama halnya pendidikan, usia nasabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kupedes, namun pengaruh pendidikan lebih kuat dibandingkan usia. Tanda positif variabel usia mengindikasikan besarnya Kupedes searah dengan usia nasabah. Semakin matang usia nasabah, terdapat kecenderungan dana Kupedes yang diterima semakin besar. Nilai koefisien sebesar 51.830,92 mempunyai makna setiap tambahan rata-rata 1 tahun usia nasabah, terdapat peningkatan fasilitas Kupedes rata-rata Rp 51.830,92, dengan asumsi variabel-variabel lainnya tidak mengalami perubahan.

Dalam penelitiannya, Seyma et al. (2009: 189) menemukan selain pendidikan, usia memiliki korelasi positif terhadap peluang mendapatkan kredit mikro. Usia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan, meskipun pendapatan seseorang juga menurun setelah melalui usia produktif. Penelitian lain yang juga menyimpulkan adanya pengaruh usia terhadap penawaran dan permintaan kredit telah dilakukan oleh Grant dan Vella (2004: 21).

4.2.3 Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan variabel penting dalam penilaian kelayakan seseorang untuk mendapatkan Kupedes, karena menunjukkan kapasitas mengembalikan dana. Pernyataan ini dibuktikan dengan signifikannya pengaruh pendapatan terhadap besarnya dana Kupedes. Pengaruh pendapatan bahkan paling signifikan dibanding variabel lainnya.

Nilai koefisien 6,745556 memiliki dua makna. Pertama, dana Kupedes yang diberikan searah dengan pendapatan nasabah. Semakin tinggi pendapatan nasabah, maka semakin besar pula Kupedes yang diterima. Kedua, setiap peningkatan pendapatan nasabah rata-rata sebesar Rp 1, terdapat peningkatan dana Kupedes yang disalurkan rata-rata Rp 6,745556. Persamaan regresi tunggal atau regresi sederhana yang dihasilkan adalah:

$$I_i = 757.277,2 + 0,055152 v_i + \epsilon_i \quad (9)$$

Setiap peningkatan Kupedes rata-rata Rp 1 akan meningkatkan pendapatan nasabah rata-rata Rp 0,055152. Berarti Kupedes belum mampu mendorong peningkatan pendapatan nasabah pada tingkat lebih tinggi dibandingkan jumlah dana yang dipinjam.

Pengaruh Kupedes terhadap pendapatan menurut Mathew (2006: 1) mencerminkan berhasil tidaknya program keuangan mikro untuk memperbaiki status ekonomi dan sosial masyarakat. Status ekonomi penerima kredit dinilai dalam bentuk pendapatan yang meningkat jika dibandingkan sebelum mendapatkan kredit. Chavan dan Ramakumar (2002: 962) menuliskan bahwa kredit mikro dapat menghasilkan perubahan yang positif terhadap tingkat pendapatan nasabah, meskipun perubahannya marjinal. Rahman et al. (2009: 190) menyatakan program kredit mikro di Bangladesh efektif meningkatkan pendapatan nasabah, sekalipun kredit mikro hanya diakses kalangan berpendapatan baik.

4.2.4 Penggunaan Agunan

Berdasarkan hasil estimasi, agunan berpengaruh signifikan dan positif terhadap fasilitas Kupedes. Faktor agunan merupakan komponen 5C yang umumnya terakhir dianalisis dalam menilai kelayakan calon nasabah. Fungsi agunan merupakan second way out (SWO) apabila first way out (FWO) berupa arus kas dipandang masih belum memadai sebagai akibat fluktuasi oleh berbagai sebab. Salah satunya faktor eksternal, seperti kelesuan perekonomian yang dapat menurunkan omzet bisnis. Kreditur maupun debitur mengharapkan pengembalian pinjaman lancar, sehingga tidak diperlukan eksekusi agunan.

Sebagian besar responden tergolong mampu menyediakan agunan. Penyediaan agunan dalam konteks tersebut tidak terlepas dari pertimbangan FWO dan bukan pertimbangan utama. Dalam banyak kasus, justru ditemukan adanya anggota masyarakat yang secara sadar memberikan agunan dengan alasan keamanan dan ketenangan, karena aset berharga yang dimiliki tersimpan rapih di Kantor BRI Unit. Rasa aman timbul sebagai hasil dari peluang menghindari gangguan di luar kendali manusia, seperti bencana alam dan kemungkinan kejahatan, misalnya pencurian.

Dalam Kupedes, tidak dipungkiri agunan memberikan keyakinan kepada Mantri BRI Unit, yaitu turunnya resiko kredit macet. Upaya meminimalkan resiko bahkan menjadi mazhab di kalangan Mantri, sehingga cenderung lebih mudah menyetujui penyaluran dana kepada calon nasabah yang memiliki rumah sendiri. Temuan yang serupa dihasilkan pula dalam penelitian Grant dan Vella (2004: 21) mengenai permintaan dan penawaran kredit kepada rumah tangga di Amerika Serikat.

4.2.5 Lama Waktu Berhubungan Dengan BRI

Hasil estimasi menunjukkan lama waktu nasabah berhubungan dengan BRI Unit berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kupedes. BRI Unit cenderung menyalurkan dana lebih besar kepada nasabah yang lama berhubungan, baik sebagai nasabah Kupedes maupun Simpedes. Nilai koefisien 132.095,9 mempunyai makna dengan asumsi variabel lain tetap, setiap tambahan lama waktu berhubungan rata-rata 1 tahun akan mendorong peningkatan pemberian fasilitas Kupedes kepada nasabah rata-rata Rp 132.095,9.

Lama waktu berhubungan meningkatkan pemahaman Mantri terhadap karakter nasabah, sehingga kepercayaan lebih tinggi. Bastelaer (2000: 1) mengemukakan bahwa pendekatan kepada kalangan miskin menghasilkan kinerja impresif, meskipun terdapat ketidakpastian informasi. Keberhasilan dicapai dari social capital, sehingga transaksi kredit tetap berlangsung, meskipun banyak nasabah tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai. Untuk kasus di Indonesia, Grootaert (1999: 1) menjelaskan bahwa rumah tangga miskin dengan modal sosial tinggi memiliki akses yang lebih baik kepada kredit.

Dalam tugas sehari-hari, jajaran BRI menyatu dengan komunitas. Strategi ini telah lama ditempuh dan menjadi ciri BRI Unit dalam berbisnis di perdesaan. Sudah merupakan kelaziman bahwa pimpinan dan Mantri BRI Unit menghadiri undangan pernikahan, sunatan, pengajian, melayat kematian, dan kegiatan informal lainnya. Dalam kasus tertentu, terdapat kedekatan di antara karyawan BRI Unit dengan komunitas, sehingga masyarakat memberikan apresiasi dan status sosial yang tinggi. Penyebutan Kepala Unit tidak populer, karena masyarakat lebih praktis menyebut "Direktur". Kehadiran karyawan BRI Unit pada suatu acara sosial sering mendatangkan kebanggaan bagi pihak penyelenggara.

4.2.6 Jarak Tempat Tinggal

Upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui BRI Unit dijalankan secara konsisten. Hasil penelitian membuktikan jarak tempat tinggal merupakan variabel yang berpengaruh signifikan. Pelayanan BRI dikatakan konsisten, karena semakin dekat jarak tempat tinggal nasabah dari Kantor BRI Unit, semakin besar pula dana Kupedes yang diterima. Hal ini dilihat dari tanda koefisien yang negatif, yaitu -295.524,7. Setiap lebih dekat rata-rata 1 km akan meningkatkan Kupedes yang diterima rata-rata Rp 295.524,7. Hasil ini berlaku dengan asumsi variabel-variabel lainnya tidak mengalami perubahan.

4.2.7. Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Jumlah Anggota Keluarga

Selain ke-6 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap Kupedes, terdapat 3 variabel lain yang tidak signifikan. Ketiga variabel adalah jenis kelamin, status perkawinan, dan jumlah anggota keluarga nasabah Kupedes. Tidak signifikannya jenis kelamin dan status perkawinan berbeda dengan penelitian keuangan mikro lainnya yang pada umumnya menemukan kredit mikro lebih banyak disalurkan kepada perempuan dan individu yang telah menikah. Perempuan dipandang lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagai peminjam demikian pula halnya dengan individu yang telah berumah tangga.

Penelitian Grant dan Vella (2004: 21) menyimpulkan kepala rumah tangga perempuan mendapatkan kredit lebih banyak dibandingkan rumah tangga yang dipimpin laki-laki. Kondisi berbeda dengan penelitian ini adalah karena kebanyakan kredit mikro memang sejak awal dirancang bagi pemberdayaan perempuan, sedangkan Kupedes terbuka bagi semua jenis kelamin. Di samping itu, terdapat ketentuan dalam perjanjian kredit yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban renteng oleh suami dan isteri.

5. PENUTUP

Penyaluran Kupedes Sleman selama kurun 1990-2008 senantiasa meningkat, kecuali tahun 1998. Namun, kredit yang disalurkan masih lebih rendah dibanding simpanan, sehingga LDR rata-rata kurang dari 50 persen. Potensi dana belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sektor riil berskala mikro dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terdapat peningkatan Kupedes GBT yang pesat sebagai upaya BRI Unit mencapai target laba dan Mantri memenuhi target kinerja. Meskipun menguntungkan, namun Kupedes GBT tanpa batasan tertentu mengurangi makna Kupedes sebagai instrumen penggerak perekonomian di perdesaan.

Pendidikan, usia, tingkat pendapatan, penggunaan agunan, dan lama waktu nasabah berhubungan dengan BRI berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kupedes yang disalurkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya. Jarak tempat tinggal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kupedes. Semakin dekat tempat tinggal nasabah dengan BRI Unit meningkatkan permintaan Kupedes. Jenis kelamin, status perkawinan, dan jumlah anggota keluarga tidak berpengaruh terhadap Kupedes. Temuan ini berbeda dengan penelitian kredit mikro lain, di mana wanita merupakan target utama kredit mikro. Perbedaan disebabkan Kupedes tidak dikhususkan untuk wanita, tetapi kepada jenis usaha. Penelitian lain juga menemukan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit mikro.

Peringkat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penyaluran Kupedes adalah tingkat pendapatan, pendidikan nasabah, lama berhubungan, dan penggunaan agunan.

Setiap tambahan 1 tahun usia nasabah meningkatkan Kupedes yang diterima Rp 51.830,92. Demikian pula setiap tambahan lama waktu berhubungan selama 1 tahun, mendapatkan tambahan dana Kupedes rata-rata Rp 132.095,9. Sebaliknya, semakin dekat jarak tempat tinggal nasabah dengan Kantor BRI Unit, yaitu lebih dekat 1 km, terdapat peningkatan Kupedes yang diterima rata-rata Rp 295.524,7.

Kepekaan Kupedes terhadap karakteristik nasabah juga disebabkan faktor modal sosial dalam bentuk nilai, norma, budaya, dan keeratn hubungan di antara komunitas. Modal sosial yang terbangun mampu dimanfaatkan Mantri, sehingga kepercayaan yang menjadi kunci keberhasilan kredit mikro semakin meningkat. Kepercayaan akan mengatasi kendala asymmetric information dan adverse selection, sehingga terjadi perbaikan akses bagi

pelaku usaha mikro di pedesaan terhadap pembiayaan bank.

Sekalipun penyaluran Kupedes berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan nasabah, namun tambahan pendapatan relatif kecil. Setiap tambahan Rp 1 Kupedes hanya meningkatkan pendapatan rata-rata Rp 0,055152. Sebaliknya, membaiknya pendapatan nasabah Rp 1 membuka peluang untuk mendapatkan tambahan Kupedes rata-rata Rp 6,745556. Penelitian terdahulu menunjukkan pengaruh kredit lebih besar terhadap peningkatan pendapatan. Perbedaan disebabkan penggunaan metodologi yang berbeda, di mana penelitian terdahulu menggunakan sampel calon nasabah sebagai pembandingan (*control group*), sedangkan responden pada penelitian ini adalah nasabah yang telah cukup lama menikmati fasilitas Kupedes dari BRI Unit.

Penelitian ini memiliki kelemahan atau keterbatasan, sehingga dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan pertama adalah lingkup wilayah yang hanya mencakup Kabupaten Sleman, sehingga temuan tidak dapat digeneralisir. Tidak digunakannya bunga sebagai salah satu variabel independen menjadi keterbatasan kedua. Selanjutnya, pengumpulan data melalui survei kuesioner yang disertai wawancara dan FGD memberikan peluang bias subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduruhaman, (2003), "The Role of Financial Development in Promoting Economic Growth: Empirical Evidence of Indonesian Economy". *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Vol. 6, No. 2.
- Agung, Juda, et al., (2001), *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis: Fakta, Penyebab, dan Implikasi Kebijakan*. Jakarta: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.
- Ahlin, Christian and Jiang Neville, (2005), "Can Micro-Credit Bring Development?" Working Paper No. 05-W19. Vanderbilt University.
- Alamsyah, Halim, et al., (2003), "Banking Disintermediation and Its Implication for Monetary Policy: The Case of Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Hal. 499-518.
- Allen, Franklin and Anthony M. Santomero, (1996), *The Theory of Financial Intermediation*. Financial Institutions Forum, The Wharton School, University of Pennsylvania.
- Amaral, Pedro S. and Erwan Quintin, (2005), *Financial Intermediation and Economic Development: A Quantitative Assessment*. The Federal Reserve Bank of Dallas.
- Anonim, (2004), *Scaling Up Poverty Reduction: Case Studies in Microfinance*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), The World Bank, Washington, D.C.
- Astiyah, Siti and Jardine A. Husman, (2006), "Fungsi Intermediasi dalam Efisiensi Perbankan di Indonesia: Derivasi Fungsi Profit". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Hal. 529-544.
- Aziz, Jahangir and Christoph Duenwald, (2002), "Growth: Financial Intermediation Nexus in China". Working Paper No. WP/02/194. Asia Pacific Department, IMF.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, (2006), *Kabupaten Sleman Dalam Angka 2005*.
- Bank Indonesia, (2006), *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 4, No. 5, April.
- _____, (2006), *Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 4, No. 12, November.
- Bastelaer, Thierry Van, (2000), *Imperfect Information, Social Capital, and The Poor's Access to Credit*. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS), University of Maryland.

- Bloemer, Josee, et al., (2003), *The Psychology behind Commitment and Loyalty: An Empirical Study in a Bank Setting*. University of Nijmegen.
- Burton, Maureen and Ray Lombra, (2006), *The Financial System and the Economy: Principles of Money and Banking*. Mason: Thomson South-Western.
- Calza, A., et al., (2001), "Modelling the Demand for Loans to the Private Sector in the Euro Area". Working Paper No. 55. European Central Bank, Frankfurt.
- Carroll, Christopher D., et al., (2000), "Saving and Growth with Habit Formation". *American Economic Review*, June.
- Charitonenko, Stephanie and Ismah Afwan, (2003), *Commercialization of Microfinance: Indonesia*. Asian Development Banks.
- Chavan, Pallavi and R. Ramakumar, (2002), "Micro Credit and Rural Poverty: An Analysis of Empirical Evidence". *Economic and Political Weekly*, March.
- Chaves, Rodrigo A. and Claudio Gonzalez-Vega, (1993), "The Design of Successful Rural Financial Intermediaries: Evidence from Indonesia". *Economics and Sociology Occasional Paper No. 2059*. Rural Finance Program, Department of Agricultural Economics and Rural Sociology, The Ohio State University, Columbus.
- Clair, Robert T. and Paula Tucker, (1993), "Six Causes of the Credit Crunch (Or, Why Is It So Hard to Get a Loan?)". *Economic Review*, Third Quarter, pp. 1-20.
- Claus, Iris, (2005), "The Effects of Bank Lending in an Open Economy". CAMA Working Paper No. 4, The Australian National University, Canberra.
- Davis, E. Phillip and Yu-Wei Hu, (2004), *Saving, Funding and Economic Growth*. Draft Chapter for the *Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income*. Oxford University Press.
- De Aghion, Baetrix Armendariz and Jonathan Morduch, (2005), *The Economics of Microfinance*. Cambridge: The MIT Press.
- Debray, Genevieve Boyreau, (2003), "Financial Intermediation and Growth: Chinese Style". Policy Research Working Paper No. 3027. The World Bank Research Development Group.
- Deidda, Luca and Bassam Fattouh, (2002), *Concentration in the Banking Industry and Economic Growth*. Centro Ricerche Economiche Nord Sud.
- Deidda, Luca and Bassam Fattouh, (2005), *Banks, Financial Markets and Growth*. Centre for Financial and Management Studies.
- Demirguc-Kunt, Asli and Ross Levine (Editor), (2001), *Financial Structure and Economic Growth: A Cross-Country Comparison of Banks, Markets, and Development*. Cambridge; The MIT Press.
- Djiwandono, Soedradjad, (1998), *Monetary Policy and the Banking System in Indonesia: Some Lessons*. The India-ASEAN Eminent Persons Lecture, New Delhi.
- Drake, Deborah and Elisabeth Rhyne (Editor), (2002), *The Commercialization of Microfinance*. Bloomfield: Kumarian Press, Inc.

- Enya, Masahiro, et al., (2004), "Credit Crunch in East Asia: A Retrospective". Discussion Paper 04-04. Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University, Osaka.
- Fry, Maxwell J., (1995), *Money, Interest, and Banking in Economic Development*, Second Edition. The John Hopkins University Press, Baltimore.
- Ghosh, Swati R. and Atish R. Ghosh, (1999), "East Asia in the Aftermath: Was There a Credit Crunch?" IMF Working Paper WP/99/38. Policy Development and Review Department, IMF.
- Goodwin-Groen, Ruth, (2006), *Where are They Now? Following the Progress of Seven Microfinance Deposit-Taking Institutions from 1996-2003*. CGAP.
- Graff, Michael, (1999), "Financial Development and Economic Growth – A New Empirical Analysis". Dresden Discussion Papers in Economics, No. 5/99.
- Grant, Charles and Francis Vella, (2004), *Credit Supply and Demand among US Households*. European University Institute.
- Grootaert, Christian, (1999), "Social Capital, Household Welfare, and Poverty in Indonesia". Policy Research Working Paper 2144. The World Bank.
- Hadad, Muliaman D., et al., (2004), *Model dan Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia*. Joint Research Bank Indonesia dan Universitas Padjajaran. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta.
- Hanson, James A., (2003), "Banking in Developing Countries in the 1990s". World Bank Policy Research Working Paper 3168. Washington, DC.
- Hardy, Daniel C., et al., (2002), "Microfinance Institutions and Public Policy". IMF Working Paper No. WP/02/159. Monetary and Exchange Affairs Department, IMF.
- Harmanta dan Mahyus Ekananda, (2005), "Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium". Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Juni, Halaman 52-78. Bank Indonesia, Jakarta.
- Howells, Peter and Keith Bain, (1998), *The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text*. Essex: Addison Wesley Longman Ltd.
- Khan, Arshad, et al., (2007), "Financial Development and Economic Growth: The Case of Pakistan". The Pakistan Development Review, Vol. 44, No. 4, pp. 819-837.
- Koetter, Michael and Michael Wedow, (2006), *Finance and Growth in a Bank-Based Economy: Is it Quantity or Quality that Matters?* Deutsche Bundesbank.
- Kusmuljono, B. S., (2007), "Sistem Pengembangan Usaha Pertanian Berbasis Lingkungan Didukung Lembaga Keuangan Mikro". Disertasi, tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Ledgerwood, Joanna, (1999), *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. The World Bank, Washington, D.C.
- Levine, Ross, (2002), "Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is Better?" William Davidson Working Paper No. 442.

- Liang, Zhicheng, (2007), *Banking Sector Development and Economic Growth in China: Why Does the Quality of Legal Institutions Matter?* Makalah pada International Conference on Opening and Innovation on Financial Emerging Markets, Beijing.
- MacDonald, S. Scott and Koch, Timothy W., (2006) *Management of Banking*, Sixth Edition. Mason: Thomson South-Western.
- Mathew, R. Priya, (2006), *The Effects of Microfinance Program Participation on Income and Income Equality: Evidence from Ghana*. Washington University, St. Louis.
- Narayan, Deepa, (2000), *Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us?* Oxford University Press for the World Bank, Washington, D.C.
- Nehls, Hiltrud and Torsten Schmidt, (2003), "Credit Crunch in Germany?" Discussion Paper No. 6, RWI, Essen.
- Nguyen, Cuong N., (2007), "Determinants of Credit Participation and Its Impact on Households Consumption: Evidence from Rural Vietnam". Discussion Paper. Centre for Economic Reform and Transformation (CERT), School of Management and Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh.
- Paxson, Christina, (1995), "Saving and Growth: Evidence from Micro Data". NBER Working Paper 5301. National Bureau of Economic Research, Cambridge.
- Qayyum Abdul, (2002), "Demand for Bank Lending by the Private Business Sector in Pakistan". *The Pakistan Development Review*, 41: 2, Hal. 149-159.
- Rahman, Sayma, et al., (2009), "Impact of Microcredit Programs on Higher Income Borrowers: Evidence from Bangladesh". *International Business and Economics Research*, 8: 2.
- Robinson, Marguerite S., (1992), "Rural Financial Intermediation: Lessons from Indonesia, Part One The Bank Rakyat Indonesia: Rural Banking, 1970-1991". Development Discussion Paper No. 434. Harvard Institute for International Development, Harvard University.
- Rukma, Arwandrija, (2002), "Indonesian Rural Finance Before, During, and After the Crisis". Development Discussion Paper No. 582. Harvard Institute for International Development, Cambridge.
- Salam, Abdul, (2007), "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sustainability Koperasi Simpan Pinjam sebagai Lembaga Keuangan Mikro bagi Masyarakat". Disertasi, tidak dipublikasikan. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Scholten, Bertand Dick Van Wensveen, (2003), *The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (Not) Explain*. SUERF, The European Money and Finance Forum.
- Seibel, Hans Dieter and Petra Schmidt, (2000), *How an Agricultural Development Bank Revolutionized Rural Finance: The Case Bank Rakyat Indonesia*. Development Research Center, University of Cologne.
- Suzuki, Tomoya, (2004), *Credit Channel of Monetary Policy in Japan: Resolving the Supply versus Demand Puzzle*. Griffith University, Gold Coast.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, (2003), *Economic Development*, Eighth Edition. Addison-Wesley, Boston.
- Yaron, Jacob, et al., (1998), "Promoting Efficient Rural Financial Intermediation". *The World Bank Research Observer*, Vol. 13, No. 2, Hal. 147-170.
- Yaron, Jacob, et al., (2000), *Efficient Rural Financial Intermediation: The Case of BRI Unit Desain Indonesia*. Office of Development Studies, Bureau of Development Policy, United Nations Development Programme.

PENGARUH OTOMATISASI SISTEM INFORMASI DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI TERHADAP PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESESUAIAN TUGAS-TEKNOLOGI SEBAGAI PEMODERASI

F. Shellyana Junaedi

Email: shellyana@mail.uajy.ac.id

Anna Purwaningsih

Email: annapurwa@mail.uajy.ac.id

Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of system automatization and technology efficacy on empowerment of employee or manager staff. This study also purposes to investigate task-technology fit as a moderating variable in the relationship between system automatization and technology efficacy on empowering employee. The sample is collected by questionnaire from employee who uses computer to work, and has more than one year's experience in work. The result has shown that man's employee is more affected by system automatization than mowen's employee to increase empowerment. Empowering of employee has more significant effect from employee who has high education and high income than employee who has low education and low income. But, task technology fit did not prove the role as a moderating variable in the relationship between system automatization and technology efficacy on employee empowerment.

Keywords: system automatization, technology efficacy, task technology fit and employee empowering.

1. PENDAHULUAN

Inovasi adalah suatu kumpulan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada untuk memenuhi kebutuhan tertentu (Warren, 1984). Inovasi memerlukan faktor-faktor terpilih dari pengetahuan yang ada dan memadukannya dalam suatu cara yang unik untuk memperoleh keuntungan di seluruh produk dan proses yang ada. Inovasi dapat meliputi inovasi teknologi, inovasi organisasi serta inovasi pemasaran yang akhir-akhir ini banyak diterapkan di berbagai perusahaan sebagai salah satu keunggulan kompetitif mereka.

Dampak dari inovasi terutama inovasi teknologi adalah terciptanya otomatisasi di berbagai kegiatan organisasi. Otomatisasi memberikan perbaikan kualitas jangka panjang dan kesinambungan produk dengan mempertimbangkan adanya pembaharuan terhadap teknik-teknik penyelesaian pekerjaan. Lewis (1984) mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan otomatisasi harus selalu melatih kembali karyawannya karena otomatisasi merupakan proses yang berkesinambungan. Penguasaan teknologi bagi karyawan sangat diperlukan untuk tercapainya keberhasilan otomatisasi (inovasi teknologi) di organisasi.

Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kebutuhan untuk tercapainya kinerja organisasi yang optimal, perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan strategi inovasi yang handal. Komputerisasi merupakan salah satu strategi bagi perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi melalui penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam jangka panjang. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya di segala bidang agar tetap survive di organisasi. Hal ini akan

mendorong organisasi untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat. Organisasi pada masa mendatang dituntut untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat membawa perusahaan untuk memenangkan persaingan dan menciptakan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang.

Perusahaan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian akan terus berusaha memenuhi tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka menciptakan system yang berkualitas. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan berusaha menawarkan program-program bermutu didukung dengan adanya sarana dan prasaran yang memadai serta sumber daya manusia yang handal untuk memberikan kualitas pelayanan yang tinggi.

Penguasaan teknologi yang dimiliki karyawan akan berpengaruh terhadap pemberdayaan sumber daya manusia. Perusahaan supaya dapat mempertahankan iklim bisnis yang efektif perlu melakukan empowerment (pemberdayaan) sumber daya manusia (Khan & Worldwide, 1997; Caudron, 1995; Luthans, 1995) melalui desain partisipasi karyawan (Schwartz et.al., 1997). Hal tersebut menjadi sangat penting karena dapat membangun hubungan interpersonal supaya terjalin hubungan saling mempercayai antara manajemen dan karyawan. Hubungan ini dapat mengarah pada perbaikan yang berkesinambungan dalam bidang kualitas, produktivitas, teknologi, dan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik. Pemberdayaan dengan menggunakan sumber daya dari dalam perusahaan akan menjamin perusahaan dalam memimpin arget kinerja secara cepat dan efektif (Khan & Worldwide, 1997).

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh otomatisasi sistem informasi, penguasaan teknologi dan kesesuaian tugas-teknologi terhadap pemberdayaan karyawan. Selain itu, studi ini juga mengkaji lebih lanjut tentang peran kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi antara otomatisasi sistem informasi dan penguasaan teknologi terhadap pemberdayaan karyawan.

Melalui pengujian empiris yang akan dilakukan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat memberikan informasi dan bukti empiris mengenai pengaruh otomatisasi sistem informasi dan penguasaan teknologi terhadap pemberdayaan yang berguna bagi organisasi untuk menentukan sumber daya yang tepat di masa yang akan datang. Studi ini juga dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana dampak penguasaan teknologi tersebut mempengaruhi pemberdayaan karyawan, sehingga manajer dan organisasi dapat menciptakan kondisi yang memberikan kepuasan kerja melalui inovasi teknologi dan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu karyawan lebih berpartisipasi dalam penguasaan teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap manajemen sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan karyawan melalui penguasaan teknologi dan inovasi teknologi atau otomatisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Hubungan Inovasi Teknologi dan Otomatisasi

Terjadinya inovasi teknologi akhir-akhir ini memacu perusahaan untuk meningkatkan strategi organisasi dengan tujuan tercapainya keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Inovasi teknologi terutama inovasi sistem informasi disikapi oleh banyak organisasi dengan menciptakan otomatisasi pada berbagai kegiatan organisasi. Inovasi berarti perubahan. Ini juga berarti menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya (Myers, 1987). Myers lebih lanjut mengemukakan bahwa ada beberapa alasan mengapa inovasi sangat diperlukan :

1. Dunia telah berubah

Perubahan yang terus terjadi di lingkungan bisnis menuntut organisasi untuk selalu melakukan perubahan yang mengacu pada pembaharuan dan perbaikan.

2. Semua proyek (kegiatan) memerlukan champion

Setiap kegiatan atau proyek akan dikelilingi oleh user yang memerlukan champion di setiap kegiatan. Dengan demikian setiap individu organisasi harus menanamkan dalam dirinya untuk menjadi champion dalam setiap kegiatan supaya proyek berhasil.

3. Para pemakai (user) telah belajar lebih banyak
Jumlah perubahan yang dilakukan pada setiap kegiatan akan meningkat sebanding dengan meningkatnya pengetahuan para user. Mereka akan melihat perubahan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga perubahan yang dilakukan organisasi seringkali mengalami kegagalan. Para manajer dituntut untuk lebih hati-hati dan menganalisa setiap kegiatan yang akan dilakukan agar program dapat berhasil.
4. Berbagai variabel yang lain
Organisasi harus mempertimbangkan banyak variabel yang akan menentukan keberhasilan suatu proyek, seperti mempelajari user, data base, penyesuaian pribadi dengan pengguna, belajar bekerja sama dengan orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan.

Otomatisasi merupakan dampak positif yang diakibatkan adanya inovasi teknologi. Adanya otomatisasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, dan peningkatan laba bagi perusahaan (Kleim, 1987). Lebih lanjut Kleim menyatakan bahwa otomatisasi dilihat sebagai cara yang efektif sebagai penghematan biaya untuk mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan informasi, serta menghilangkan kegiatan yang tidak produktif dan padat karya, seperti telepon, rapat-rapat yang tidak penting, dan pengumpulan informasi.

Klaim mengemukakan adanya tiga cara untuk membantu karyawan menggunakan sistem otomatis dengan efektif :

1. Dokumentasi
Yaitu mengembangkan prosedur penggunaan dan panduan untuk memberikan kemampuan kepada karyawan dalam mengakses informasi tidak saja pada pengoperasiannya, tetapi juga penggunaannya secara efektif.
2. Personalia
Manajemen harus menilai kembali persyaratan personalia sebelum merencanakan suatu sistem. Hal ini akan menjamin bahwa staf yang terampil telah tersedia untuk menggunakan suatu sistem.
3. Pelatihan
Manajer harus melatih staf mereka supaya dapat menggunakan sistem dengan benar dan produktif. Hal ini memungkinkan karyawan untuk mengerti terlebih dahulu bagaimana menggunakan teknologi tersebut dengan lebih efektif.

2.2 Hubungan Otomatisasi dan Pemberdayaan Karyawan

Di era di mana komputer benar-benar mempengaruhi sebagian besar kegiatan perusahaan, hampir sebagian besar manajer menggunakan komputerisasi untuk mengotomatisasi prosedur-prosedur kerja manual dan mengendalikan semua kegiatan (Linder, 1985).

End-User Computing (EUC) telah menjadi senjata kompetitif yang sangat penting bagi organisasi dengan majunya kemampuan mikrokomputer dan piranti lunak (Lee et al., 1995). Beberapa peneliti dan praktisi menjelaskan bahwa para pengguna (user) adalah bagian yang integral dari keseluruhan implementasi teknologi informasi (Ives et. al., 1983 ; Zuboff, 1988). Selama ini telah diketahui secara umum bahwa para pekerja sistem informasi menggambarkan suatu sumber daya yang sangat bernilai dan sangat penting terhadap penerapan dan penggunaan teknologi informasi yang sukses dalam berbagai organisasi (Amoroso, et. al., 1989). Organisasi bisnis akan berhasil dalam kompetisi apabila organisasi tersebut mampu mengembangkan suatu kapabilitas untuk penerapan teknologi informasi. Kapabilitas tersebut tumbuh dari pengembangan pengguna teknologi informasi dengan cara melakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Otomatisasi di perusahaan seringkali dihubungkan dengan peralatan yang lebih cepat berubah. Otomatisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap karyawan. Peralatan yang digunakan oleh karyawan di dalam pekerjaan mereka akan memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan cepat, lebih mudah dan lebih efisien (Quible, Hammer, 1984). Penggunaan alat-alat elektronik akan meningkatkan kecanggihan dan efisiensi sistem-sistem otomatisasi kantor. Penghubungan alat-alat kantor dilakukan melalui jaringan elektronik. Hal ini akan memudahkan karyawan melakukan pekerjaan secara lebih fungsional dan efisien. Kemudahan-kemudahan yang diperoleh karyawan dengan adanya otomatisasi akan menciptakan lingkungan pemberdayaan.

Penerapan pendekatan pemberdayaan dalam perusahaan hendaknya bersifat lebih manusiawi sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tindakan manajemen yang dapat menjamin keberhasilan pemberdayaan sumber daya manusia dalam organisasi adalah dengan mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang pemberdayaan dan kesempatan yang mendukung pemberdayaan.

2.3 Hubungan Penguasaan Teknologi dan Pemberdayaan Karyawan

Apabila karyawan menyadari bahwa mereka memiliki keterampilan yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui dan mereka akan bekerja dengan kapasitas penuh dibandingkan sebelumnya maka karyawan merasa telah diberdayakan (Junaedi, 2000). Di samping itu kepuasan kerja meningkat dan mayoritas karyawan meletakkan kepercayaan yang lebih besar kepada manajemen.

Kepuasan kerja karyawan sangat terkait dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Secara keseluruhan kepuasan kerja ditemukan mempunyai kaitan erat dengan faktor penting lainnya seperti kinerja pekerjaan (job performance) dan memiliki hubungan positif diantara keduanya (Baroudi, 1985 ; Compton, 1987). Inovasi teknologi terutama inovasi sistem informasi (otomatisasi) telah membuat perubahan yang fundamental pada pekerjaan karyawan. Kebutuhan akan adanya pengetahuan dan keahlian yang baru merupakan syarat mutlak bagi karyawan untuk memenuhi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Komputerisasi diperkenalkan oleh perusahaan untuk membantu memenuhi tujuan perusahaan dan diterapkan dalam praktek sehari-hari untuk mempertinggi kualitas kerja personil perusahaan.

Penguasaan teknologi bagi setiap karyawan merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki untuk menjamin kesuksesan pekerjaan bagi individu dan organisasi. Karyawan yang mempunyai penguasaan teknologi yang baik akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat, hal ini akan menimbulkan kepuasan pekerjaan bagi mereka.

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menentukan seberapa besar nilai yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh manajemen dalam teknologi (Matlin, 1979). Sugeng dan Indriantoro (1998) menemukan bahwa kecocokan tugas teknologi yang dilakukan oleh karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi yang tepat akan membawa dampak bagi kecocokan tugas-teknologi yang selanjutnya akan menimbulkan pemberdayaan bagi karyawan.

2.4 Manfaat Pemberdayaan Karyawan

Perubahan lingkungan bisnis dewasa ini sedemikian cepat sehingga masa depan usahapun penuh ketidakpastian. Kondisi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Namun upaya perubahan yang dilakukan organisasi dalam menyikapi perubahan lingkungan sering menyentuh pada aspek-aspek yang nyata atau hard side of change seperti perubahan pada aspek operasional, sistem informasi, teknologi maupun prosedur yang lebih mudah untuk diidentifikasi. Melalui pemberdayaan sumber daya manusia, organisasi melakukan perubahan manajemen dengan soft side of change sehingga strategi perubahan budaya yang dilakukan lebih mudah diimplementasikan.

Soft side of change merupakan proses perubahan manajemen yang ditujukan pada soft aspect of management dengan menawarkan alat-alat dan teknik yang dibutuhkan serta mendorong setiap orang di seluruh tingkatan dalam organisasi untuk sukses melakukan perubahan (Galpin, 1996). Soft aspect of management yang dimaksud adalah human element of change yang seringkali menjadi penghambat dalam melakukan perubahan. Salah satu cara perubahan ini adalah melalui pemberdayaan sumber daya manusia organisasi. Pendekatan ini berusaha mengombinasikan secara efektif sisi manusia dan sisi perubahan secara teknikal untuk sukses melakukan merger, restrukturisasi, dan bentuk-bentuk perubahan organisasi lainnya.

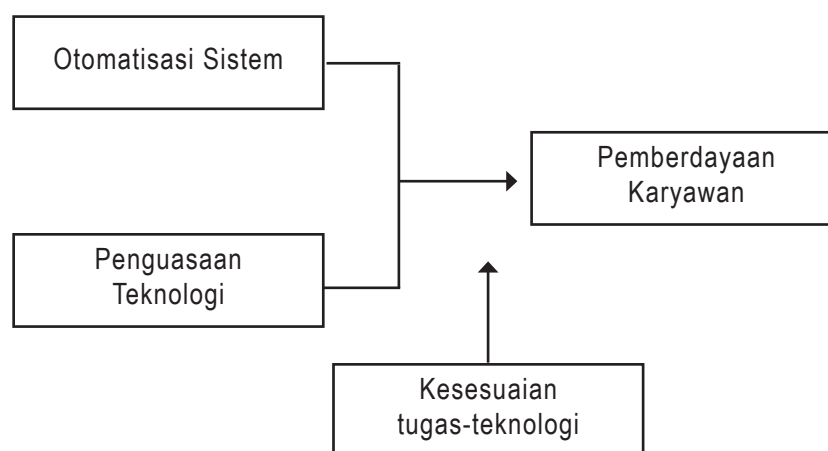
Pemberdayaan efektif yang dikomunikasikan pada seluruh organisasi akan meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan sikap dan tanggung jawab serta pendelegasian otoritas yang lebih besar pada bawahan. Tindakan manajer dapat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan dalam organisasi seperti di bawah ini (Khan & Worldwide, 1997) :

1. Mengembangkan suatu pemahaman yang menyeluruh dari pemberdayaan. Supaya efektif manajer harus mengetahui tentang pemberdayaan dan peralatan manajerial seperti menetapkan tujuan jangka panjang, mempelajari software dan mengelola anggaran.
2. Mengembangkan suatu daftar kesempatan akan mendukung pemberdayaan dalam organisasi. Pengembangan daftar ini dengan input berbagai variasi orang dalam organisasi.
3. Memilih masalah sebagai usaha awal yang memberikan kesempatan yang signifikan bagi keberhasilan, sementara itu berusaha meminimumkan resiko profesional atau kegagalan personal.
4. Mengutamakan setiap pekerja memahami harapan terhadap kinerja dan tugasnya. Menetapkan tujuan bersama untuk menjamin komitmen yang menguntungkan untuk keunggulan kinerja.
5. Menemukan prosedur tindak lanjut untuk kemajuan bersama dengan semua pekerja baik secara individu atau bersama.
6. Menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan karyawan. Pemberdayaan hanya akan berlangsung ketika mempelajari pekerja melalui pengalaman, sedangkan untuk saling mempercayai satu sama lain melalui diskusi permasalahan yang terbuka.
7. Praktek pemberdayaan manajer sebagai komponen kritis dari gaya manajemen. **Pemberdayaan harus terintegrasi sebagai way of life** untuk masing-masing tanggung jawab manajer. Jadi pemberdayaan dipandang sebagai suatu aturan untuk mengelola keberhasilan bisnis.
8. Melakukan tindak lanjut dengan menilai kemajuan pemberdayaan karyawan sehingga dapat menjamin bahwa teknik, pengetahuan dan ketrampilan dibutuhkan untuk bekerja dengan efektif.

Oleh karena itu para manajer di seluruh jenis perusahaan diharapkan untuk membangun tipe lingkungan kerja dengan pemberdayaan sebagai bagian dari budaya organisasi. Karena dengan memasukkan pendekatan ini dalam budaya perusahaan maka pemberdayaan memiliki profitabilitas yang tinggi untuk kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, terdapat empat hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini, yaitu:

- H1 : Otomatisasi sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan karyawan.
- H2 : Penguasaan teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan karyawan.
- H3 : Kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan karyawan.
- H4 : Interaksi pengaruh otomatisasi sistem informasi dan penguasaan teknologi terhadap pemberdayaan dimoderasi oleh kesesuaian tugas-teknologi.
- H5 : Otomatisasi sistem informasi, penguasaan teknologi, kesesuaian tugas-teknologi dan pemberdayaan karyawan dipersepsikan berbeda berdasarkan gender, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan

Dari studi ini dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian seperti Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metoda Pengambilan Sampel dan Pengumpulan Data

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survei, yaitu metoda pengumpulan data primer melalui komunikasi tertulis dengan responden sebagai sampel individual yang representatif. Survei dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan secara cepat, tidak mahal, efisien dan akurat (Sekaran, 1992).

Metoda sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobabilistic sampling, yaitu setiap elemen dalam populasi tidak memiliki probabilitas yang sama untuk menjadi sampel (Sekaran, 1992; Cooper & Emory, 1995; Cooper & Schindler, 2001). Teknik penentuan sampel secara non probabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih dengan benar menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel. Kriteria responden yaitu merupakan karyawan atau staf manajer, bekerja menggunakan komputer sebagai sarana utama, dan telah bekerja lebih dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survai melalui kuesioner.

3.2 Definisi Operasional dan Instrumen Pengukuran

Definisi operasional dan instrumen-instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan sedikit modifikasi untuk penyesuaian terhadap permasalahan penelitian ini.

Inovasi Teknologi (Otomatisasi)

Variabel otomatisasi dibagi menjadi empat kategori berdasarkan manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari teknologi informasi :

1. Penggantian yang akan terjadi pada saat otomatisasi (penggunaan sistem informasi) mampu meningkatkan prosedur yang sudah ada dengan cara mengotomatisasi seluruh atau sebagian dari suatu prosedur secara berkelanjutan.
2. Penghematan waktu akan meningkat karena adanya aplikasi bantuan sistem informasi terhadap suatu tugas atau kelompok tugas sehingga tujuannya akan tercapai dengan lebih cepat.
3. Peningkatan kualitas kerja dapat dicapai melalui berbagai cara misalnya penyajian yang lebih baik, pelayanan yang lebih memuaskan, dan peningkatan kualitas informasi.
4. Peningkatan atau improvisasi dalam lingkungan kerja untuk membuat pekerjaan menjadi lebih menarik dan lebih mudah.

Masing-masing unsur di atas memberikan kontribusi yang penting terhadap dampak otomatisasi bagi karyawan. Keempat dimensi tersebut diukur dengan menggunakan skala sembilan yang kemudian diadopsi oleh Hakeem dan Indriantoro (1997) untuk penelitian mereka di Indonesia. Pengukuran penelitian ini dengan menggunakan lima skala likert dari pernyataan sangat memungkinkan (SM) dengan nilai lima sampai sangat tidak memungkinkan (STM) dengan nilai satu. Pengukuran variabel ini ditujukan untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap manfaat sistem informasi (otomatisasi).

Penguasaan Teknologi bagi Karyawan

Variabel pengetahuan teknologi yang dikuasai karyawan dinyatakan dan diukur dengan skala likert untuk mengetahui persepsi karyawan terhadap penggunaan dan penguasaan pengetahuan teknologi informasi (otomatisasi) tersebut. Perincian variabel diadopsi dari penelitian Gultom (1993) mengenai pengetahuan dan kecakapan terhadap teknologi informasi yang harus dimiliki karyawan.

Penelitian ini berusaha melakukan modifikasi dengan menambahkan item-item yang sangat erat kaitannya yaitu end-user computing dan sistem komunikasi elektronik. Pengukuran variabel dengan menggunakan lima skala likert dari pernyataan sangat setuju (SS) dengan nilai lima sampai sangat tidak setuju (STS) dengan nilai satu.

Pemberdayaan Karyawan

Empowerment, kepercayaan bawahan terhadap kemampuannya sendiri dalam organisasi atau unit di mana mereka menjadi bagian untuk mengatasi hambatan dan mengendalikan situasi. Variabel ini diukur dengan Follower Belief Questionnaire-Form II (Behling & McFillen, 1996) yang terdiri dari 5 item pernyataan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan lima skala likert dari pernyataan sangat setuju (SS) dengan nilai lima sampai sangat tidak setuju (STS) dengan nilai satu.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, tingkat pendapatan, masa kerja dan lama memegang jabatan terakhir.

3.3 Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian reliabilitas untuk mengukur keterandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Uji reliabilitas dengan teknik belah dua dengan membagi pertanyaan yang valid menjadi dua bagian berdasarkan nomor genap dan nomor ganjil dengan rumus Product-Moment kemudian digunakan rumus koefisien Spearman Brown (Azwar, 1997). Reliabilitas juga dapat diukur dengan menggunakan koefisien Cronbach alpha dari hasil analisis faktor. Instrumen penelitian disebut handal bila pengujian tersebut menunjukkan alpha lebih dari 0,7 (Sekaran, 1992). Hasil reliabilitas variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen (N=108)

Keterangan	Jumlah Item Kuesioner	Jumlah Item Kuesioner yang dipertahankan	Cronbach Alpha
Otomatisasi Sistem	9	9	0.8468
Penguasaan Teknologi	6	6	0.7683
Kesesuaian tugas-teknologi	10	4	0.6829
Pemberdayaan karyawan	20	17	0.8333
Total Kuesioner	45	36	

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Respon Kuesioner dan Karakteristik Responden

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden penelitian, yaitu karyawan atau staf manajer yang bekerja menggunakan komputer sebagai sarana utama dan telah bekerja lebih dari satu tahun di suatu perusahaan.

Kuesioner yang tidak layak untuk dianalisis adalah kuesioner yang pengisian jawaban responden tidak lengkap. Selain itu, terdapat juga responden tidak berkompeten terhadap penelitian ini karena dalam bekerja komputer bukanlah sebagai sarana utama ataupun responden yang bekerjanya kurang dari satu tahun, sehingga diasumsikan tidak cukup memahami pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Responden seperti ini dapat menyebabkan hasil penelitian yang bias.

Dalam penelitian ini disebarkan 150 kuesioner dan kuesioner yang dikembalikan oleh responden sebesar 137 kuesioner, jadi response rate-nya sebesar 91.33%. Kuesioner yang terjawab lengkap dengan baik dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebesar 108 kuesioner.

4.2 Profil Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik responden memberikan gambaran karyawan staf yang bekerja dengan menggunakan komputer sebagai sarana utama dengan usia rata-rata 37.01 tahun yang memiliki tingkat pendapatan rata-rata

Rp 2.100.000,- per bulan. Mayoritas responden berpendidikan sarjana sebanyak 65 orang (60.2%) dan rata-rata masa kerja mereka adalah 9.38 tahun. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lama jabatan terakhir responden menunjukkan rata-rata 6.322 tahun. Secara lengkap karakteristik responden penelitian seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Karakteristik Responden Penelitian (N=108)

Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Wanita	59	54.6
Pria	49	45.4
SLTP/SMU	14	13
Diploma	18	16.7
Sarjana	65	60.2
Pascasarjana	11	10.2
Masa kerja:		
▣ 1-5 tahun	54	50
▣ 6-10 tahun	18	16.7
▣ 11-15 tahun	6	5.6
▣ > 15 tahun	30	27.8
Usia:		
▣ 20-30 tahun	38	35.2
▣ 31-40 tahun	31	28.7
▣ 41-50 tahun	24	22.2
▣ > 50 tahun	15	13.9
Tingkat Pendapatan/bulan:		
▣ <Rp 1.000.000	13	12
▣ Rp 1.001.000 - Rp 2.000.000	61	56.5
▣ >Rp 2.000.000	34	31.5

Sumber: Olahan Data Primer

Temuan studi ini menunjukkan bahwa profil responden penelitian antara pria dan wanita relatif sama, namun terdapat kecenderungan perbedaan tingkat pendapatan per bulan antara pria dan wanita ($p=0.058$). Selain temuan tersebut, terdapat indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan akan semakin meningkatkan penghasilan mereka per bulan ($p=0.004$). Walaupun tingkat pendidikan akan meningkatkan penghasilan karyawan, tetapi masa kerja karyawan pada suatu perusahaan atau institusi ternyata tidak berpengaruh pada tingginya tingkat penghasilan mereka. Sebagai variable control usia seorang karyawan terbukti menunjukkan semakin tinggi usia karyawan akan terdapat kecenderungan semakin tingginya tingkat pendapatan per bulan mereka ($p=0.033$).

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 3. menunjukkan rerata dari variabel inovasi teknologi otomatisasi, penguasaan teknologi bagi karyawan, kesesuaian tugas-teknologi dan pemberdayaan karyawan. Rerata kontrak variabel penelitian ini yang relatif tinggi menurut responden adalah variabel penguasaan teknologi (4.2984), otomatisasi system (4.2551), dan pemberdayaan karyawan (4.0463), sedangkan rerata kontrak yang relatif rendah adalah kesesuaian tugas-teknologi (3.0693).

Tabel 3
Statistik Deskriptif dan Hasil One Sample Test

Keterangan	Mean	Standart Deviasi	t One sample test (Test Value=3)	Signifikansi
Otomatisasi Sistem	4.2551	.51476	25.340	.000 **
Penguasaan Teknologi	4.2948	.51033	26.366	.000 **
Kesesuaian Tugas-Teknologi	3.0694	.86995	.830	.409
Pemberdayaan Karyawan	4.0463	.43197	25.172	.000 **

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Hasil pengujian One Sample Test dengan test value 3 menunjukkan bahwa karyawan mempersepsikan sangat besar kemungkinan perubahan sistem informasi sebagai inovasi otomatisasi dan karyawan memiliki pengetahuan dan kemampuan terhadap teknologi informasi yang harus mereka dimiliki. Tingginya otomatisasi sistem dan penguasaan teknologi karyawan ini dapat mengindikasikan tingginya pemberdayaan karyawan. Namun karena kesesuaian tugas-teknologi yang relatif rendah dan tidak berbeda secara signifikan dengan test value 3 menunjukkan bahwa karyawan kurang dapat memperoleh data yang mutakhir untuk memenuhi kebutuhan tugasnya serta kurangnya otorisasi karyawan untuk mengakses data yang dibutuhkan.

4.4 Pengujian Perbedaan Berdasarkan Gender, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan

Analysis of variance (ANOVA) digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan lebih dari dua rata-rata populasi, seperti menguji apakah terdapat perbedaan antara rata-rata persepsi otomatisasi sistem, penguasaan teknologi, kecocokan tugas-teknologi dan pemberdayaan karyawan ditinjau dari latar belakang tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan per bulan. Sedangkan untuk menguji perbedaan gender pada variabel penelitian studi ini dengan menggunakan Independent Sample Test. Di samping itu, dalam penelitian ini juga menguji adanya perbedaan gender pada tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan karyawan, perbedaan tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan per bulan serta perbedaan umur dan masa kerja terhadap tingkat pendapatan per bulan. Hasil pengujian perbedaan gender terhadap variabel penelitian studi ini secara rinci ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Pengujian Perbedaan Gender Terhadap Variabel Penelitian

Keterangan	N	Gender		
		Mean	Uji t	Signifikansi
Otomatisasi Sistem Informasi	Pria (n=49)	4.4875	4.673	.000**
	Wanita (n=59)	4.0621		
Penguasaan Teknologi	Pria (n=49)	4.3605	1.224	.224
	Wanita (n=59)	4.2401		
Kesesuaian Tugas-Teknologi	Pria (n=49)	3.0561	-.144	.885
	Wanita (n=59)	3.0805		
Pemberdayaan Karyawan	Pria (n=49)	4.1417	2.125	.036*
	Wanita (n=59)	3.9671		

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Hasil pengujian perbedaan gender terhadap variabel penelitian studi ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan ditinjau dari pria dan wanita pada inovasi teknologi otomatisasi sistem informasi

($p=0.000$) dan pemberdayaan karyawan ($p=0.036$). Karyawan pria cenderung berpersepsi bahwa penggunaan otomatisasi sistem informasi di tempat kerjanya akan mendukung pekerjaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, karyawan pria juga lebih merasa sesuai dengan tempat kerja mereka dan nyaman dengan kebijakan, gaji dan hubungan kerja antar karyawan dibandingkan dengan karyawan wanita. Namun penguasaan teknologi informasi yang hendaknya dimiliki oleh karyawan dipersepsikan sama antara karyawan pria maupun wanita, demikian juga pada kesesuaian tugas-teknologi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara karyawan pria dan wanita. Hasil pengujian perbedaan tingkat pendidikan terhadap variabel-variabel penelitian dapat ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Pengujian Perbedaan Tingkat Pendidikan Terhadap Variabel Penelitian

Keterangan	Tingkat Pendidikan			
	N	Mean	Uji F	Signifikansi
Otomatisasi Sistem	SMU (n=14)	4.3889	2.060	.110
	Diploma (n=18)	4.1605		
	Sarjana (n=65)	4.2017		
	Pascasarjana (n=11)	4.5556		
Penguasaan Teknologi	SMU (n=14)	4.333	.674	.570
	Diploma (n=18)	4.1389		
	Sarjana (n=65)	4.3282		
	Pascasarjana (n=11)	4.3030		
Kesesuaian Tugas-Teknologi	SMU (n=14)	3.7143	4.704	.004**
	Diploma (n=18)	3.3333		
	Sarjana (n=65)	2.8731		
	Pascasarjana (n=11)	2.9773		
Pemberdayaan Karyawan	SMU (n=14)	4.3319	2.924	.037*
	Diploma (n=18)	4.0719		
	Sarjana (n=65)	3.9701		
	Pascasarjana (n=11)	4.0909		

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Hasil analisis pengujian perbedaan tingkat pendidikan karyawan terhadap kesesuaian tugas-teknologi terbukti terdapat perbedaan yang signifikan ($p=0.004$) dan terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan akan merasa semakin rendahnya kesesuaian antara tugas dan teknologi. Temuan ini kemungkinan dikarenakan seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung ingin mendapatkan informasi yang cukup banyak untuk pengambilan keputusan namun terdapat hambatan untuk dapat mengakses data paling mutakhir yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tugas dan pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan akan meningkatkan persepsi mereka untuk dapat lebih diberdayakan oleh perusahaan dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan lingkungan kerjanya ($p=0.037$).

Hasil pengujian perbedaan tingkat pendidikan terhadap variabel-variabel penelitian dapat ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Pengujian Perbedaan Tingkat Pendapatan Terhadap Variabel Penelitian

Keterangan	N	Tingkat Pendapatan		
		Mean	Uji F	Signifikansi
Otomatisasi Sistem Informasi	< Rp1jt (n=13)	3.8120	4.673	.000**
	Rp1jt – Rp2jt (n=61)	4.2842		
	> Rp2jt (n=34)	4.3725		
Penguasaan Teknologi	< Rp1jt (n=13)	3.7949	1.224	.224
	Rp1jt – Rp2jt (n=61)	4.3661		
	> Rp2jt (n=34)	4.3578		
Kesesuaian Tugas-Teknologi	< Rp1jt (n=13)	3.1154	-.144	.885
	Rp1jt – Rp2jt (n=61)	3.2377		
	> Rp2jt (n=34)	2.7500		
Pemberdayaan Karyawan	< Rp1jt (n=13)	3.7738	2.125	.036*
	Rp1jt – Rp2jt (n=61)	4.0453		
	> Rp2jt (n=34)	4.1522		

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Temuan yang lainnya menunjukkan bahwa perbedaan persepsi karyawan yang berpenghasilan tinggi dan karyawan yang berpenghasilan rendah. Semakin tinggi tingkat penghasilan seorang karyawan suatu perusahaan akan menganggap bahwa sistem informasi dalam perusahaan lebih memungkinkan untuk membuat keputusan yang tepat ($p=0.000$). Selain itu, semakin tinggi tingkat penghasilan seorang karyawan akan semakin meningkatkan dirinya merasa diberdayakan oleh perusahaan ($p=0.036$). Namun semakin tinggi penghasilan seorang karyawan tidak terbukti akan meningkatkan pengetahuan mereka untuk menguasai teknologi dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi kesesuaian tugas-teknologi.

4.5 Hasil Analisis Dengan Kesesuaian Tugas-Teknologi Sebagai Pemoderasi

Analisis regresi berganda digunakan selain untuk mengetahui adanya hubungan dan pengaruh antara variabel bebas (independent variables) dan variabel terikat (dependent variable). Metode yang dipakai adalah regresi berganda karena terdapat dua variabel yaitu variabel bebas otomatisasi sistem informasi dan penguasaan teknologi yang terdapat moderator effect yaitu kesesuaian tugas-teknologi dan, serta variabel terikat yaitu pemberdayaan karyawan (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998). Adanya moderating variable ini mempengaruhi terjadinya dampak interaksi antar variabel. Pengoperasian analisis regresi ini akan menggunakan SPSS. Hubungan pengaruh moderating variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

$$b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1X_3 + b_5X_2X_3$$

Hasil analisis regresi berganda sebelum dimasukkan kesesuaian tugas-teknologi sebagai pemoderasi menunjukkan spesifikasi model adanya pengaruh otomatisasi sistem informasi, penguasaan teknologi, dan kesesuaian tugas-teknologi pada pemberdayaan karyawan. Hasil temuan dapat dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	β	t	Sign	R ²	F
Konstanta	2.434	5.943	.000	0.159	F=6.547
Otomatisasi Sistem Informasi	.252	3.033	.003**		p=0.000
Penguasaan Teknologi	.138	1.645	.103		
Kesesuaian Tugas-Teknologi	-1.72E-02	-.386	.700		

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Hasil analisis regresi berganda secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari otomatisasi sistem informasi, penguasaan teknologi dan kesesuaian tugas-teknologi terhadap pemberdayaan karyawan. Namun secara parsial pengaruhnya hanya memiliki makna pada variabel otomatisasi sistem informasi ($p=0.003$). Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan karyawan adalah otomatisasi sistem informasi, sedangkan penguasaan teknologi dan kesesuaian tugas-teknologi tidak berpengaruh pada persepsi karyawan merasa diberdayakan oleh perusahaan.

Adanya kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi akan mempengaruhi terjadinya dampak interaksi antar-variabel. Pada kenyataannya interaksi yang terjadi menyebabkan variabel independen memoderasi dirinya sendiri. Hal ini berarti terjadi multikolinearitas diantara variabel independen. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah pengaruh variabel pemoderasi signifikan dalam studi ini ditentukan model yang tidak terdapat moderasi (unmoderated equation) kemudian mengestimasi hubungan moderasi diantara variabel independen. Apabila terjadi perubahan koefisien determinasi berarti secara statistik pengaruh kesesuaian tugas-teknologi sebagai pemoderasi signifikan (Hair et al., 1998). Jadi hanya pengaruh secara inkremental yang diukur, bukan secara parsial setiap variabel. Hasil analisis regresi berganda dengan moderator effects ini ditunjukkan pada Tabel 8.

Hasil analisis Tabel 8. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat hubungan interaksi antara otomatisasi sistem informasi terhadap pemberdayaan karyawan. Nilai signifikansi ini dapat dilihat dari perubahan peningkatan R² (unmoderated equation) sebesar 0.159 menjadi R² (moderated equation) sebesar 0.165 dalam studi pengaruh otomatisasi sistem informasi terhadap pemberdayaan karyawan dengan kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi. Dengan adanya kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi membentuk adanya pengaruh yang signifikan antara penguasaan teknologi pada pemberdayaan karyawan ($p=0.093$).

Tabel 8
Hasil Moderasi Otomatisasi Sistem Informasi x Kesesuaian TugasTeknologi

Variabel Independen	β	t	Sign	R ²	F
Konstanta	3.754	2.451	.016	0.165	F = 5 . 1 0 1
Otomatisasi Sistem Informasi	-5.13E-02	-.147	.884		p=0.001
Penguasaan Teknologi	.142	1.694	.093*		
Kesesuaian Tugas-Teknologi	-.461	-.925	.357		
Otomatisasi X Kesesuaian TT	.101	.894	.373		

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Hasil analisis Tabel 9. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kesesuaian

tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi dalam memperkuat hubungan interaksi antara penguasaan teknologi karyawan terhadap pemberdayaan karyawan. Nilai signifikansi ini dapat dilihat dari perubahan peningkatan R^2 (unmoderated equation) sebesar 0.159 menjadi R^2 (moderated equation) sebesar 0.162 dalam studi pengaruh penguasaan teknologi terhadap pemberdayaan karyawan dengan kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi. Dengan adanya kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi membentuk adanya pengaruh yang signifikan antara otomatisasi sistem informasi pada pemberdayaan karyawan ($p=0.04$).

Tabel 9
Hasil Moderasi Penguasaan Teknologi x Kesesuaian Tugas-Teknologi

Variabel Independen	β	t	Sign	R^2	F
Konstanta	1.661	1.298	.197	0.162	F=4.984
Otomatisasi Sistem Informasi	.249	2.982	.004**		p=0.001
Penguasaan Teknologi	.351	1.086	.280		
Kesesuaian Tugas-Teknologi	.241	.592	.555		
Penguasaan Tekn X Kesesuaian TT	-5.82E-02	-.638	.525		

Sumber: Olahan Data Statistik
Signifikan * $p \leq 0.05$ ** $p \leq 0.01$

Secara singkat, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa semakin sesuai antara tugas dan teknologi seorang karyawan suatu perusahaan akan meningkatkan makna pengaruh otomatisasi sistem informasi dan penguasaan teknologi terhadap pemberdayaan pada karyawan. Koefisien determinasi model regresi unmoderated sebesar 0.159 sedangkan koefisien determinasi model regresi yang telah dimoderasi otomatisasi sistem informasi X kesesuaian tugas-teknologi sebesar 0.165. Demikian juga dengan koefisien determinasi model regresi yang telah dimoderasi penguasaan teknologi X kesesuaian tugas-teknologi sebesar 0.162. Perhitungan tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan R square yang membuktikan bahwa kesesuaian tugas-teknologi sebagai variabel pemoderasi berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan karyawan.

5. PENUTUP

Temuan studi ini menghasilkan bahwa adanya otomatisasi sistem informasi pada suatu perusahaan akan meningkatkan pemberdayaan terhadap karyawan. Namun penguasaan teknologi dan kesesuaian tugas-teknologi tidak terbukti secara langsung mempengaruhi peningkatan pemberdayaan karyawan. Selain itu, kesesuaian tugas-teknologi memegang peranan penting untuk memperkuat pengaruh otomatisasi sistem informasi dan penguasaan teknologi seorang karyawan untuk meningkatkan pemberdayaan karyawan.

Hasil studi ini jelas menunjukkan bahwa otomatisasi sistem informasi suatu perusahaan merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi terjadinya pemberdayaan karyawan. Namun pada hakekatnya dalam studi ini variabel otomatisasi sistem informasi merupakan faktor yang sangat kompleks dalam mempengaruhi terjadinya pemberdayaan karyawan. Kemampuan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan karyawan dalam spesifikasi penelitian ini hanya memiliki kemampuan penjelas sebesar 15.9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak menjadi spesifikasi dalam model penelitian ini. Oleh karena itu disarankan untuk penelitian mendatang lebih mengembangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pemberdayaan karyawan karena semakin seorang karyawan merasa diberdayakan maka akan meningkatkan kepuasan kerja mereka yang akhirnya menjadi indikator kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Amoroso, D.D., R. Thomson, and P. Cheney, (1989), "Examining The Duality Role of IS Executives: A Study of IS

- Issues”, *Information and Management Review*, Vol.17, p.1-12.
- Caudron, S. (1995), “Create an Empowering Environment,” *Personnel Journal*, September, p.28-36.
- Dillon R. William, and M. Goldstem (1984), *Multivariate Analysis Methods and Applications*, New York: John Wiley and Sons.
- Gultom, F.F. (1993), *Persepsi Akuntan di Indonesia Terhadap Pengetahuan Teknologi Informasi Yang Harus dikuasai Oleh Akuntan*, Tesis (tidak dipublikasikan) Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Goodhue, D.L. and F. L. Thomson (1986), “Task-Technology Fit and Industrial Performance,” *MIS Quarterly*, 10,2, p. 179-187.
- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich, and J.H. Donnelly, Jr (1995), *Organization: Behavior, Structure, Process*, Richard D. Irwin, Inc.
- Ives, B., M.H. Olson, and J. Barouudij (1983), “The Measurement of User Information Satisfaction,” *Communication of The ACM*, 2610, p. 785-793.
- Johns, G. (1996), *Organizational Behavior: Understanding and Managing Life at Work*, Fourth Edition, harper Collins College Publisher.
- Junaedi, M.F. Sheellyana (2000), “Budaya Pemberdayaan: Suatu Manajemen Perubahan Melalui Intervensi Interpersonal,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, MM Gajayana*, Vol. 1 No. 2, Desember, p. 139-148.
- Khan, S. and A. Worldwide (1997), “The Key to Being A Leader Company: Empowerment,” *Journal for Quality and Participation*, January-February, p. 44-50.
- Kleim, R. L., (1987), “Does Automation Necessarily Mean and Increase in Productivity?” *Journal of System Management*
- Luthans, F. (1995), *Organizational Behavior*, Seventh Edition, Singapore : McGraw-Hill International Editions.
- Lee, S.M., Y.R. Kim and J. Lee (1985), “ An Empirical Study of The Relationship Among End-User Information System Acceptance, Training, and Effectiveness,” *Journal Management of Information Systems*, Vol 12, No. 2, p. 183-202.
- Lewis, M. (1984), *The Promise of Automation*, Nations’ Business, US Chamber of Commerce.
- Linder, J.C. (1985), “Computers, Corporate Culture and Change,” *Personal Journal*.
- Myers, W.W. (1987), “Innovation and Turmoil,” *Journal of System Management*.
- Quible, Z. and J.C. Hammer (1984), *Office Automation’s Impact on Personal, Personal Administrator*, The American Society for Personal Administration.
- Robbins, S. (1996), *Organizational Behavior: Concept, Controversies, Applications*, Seventh Edition, Prentice Hall, Inc.
- Schweltz, R., E. Granata, W.G. Storjohann, and B. Gruenberg (1997), “Could Participative Design be The Answer for Us?” *Journal for Quality and Participation*, January-February, p.34-42.

- Schmidt, F.L., D.S. Ones and J.E. Hunter (1992), "Personel Selection In M.R. Rosenzweig & L.W. Porter, Annual Review of Psychology, Vol. 43 : 627-670, Pale Alto, CA : Annual Review.
- Scheiner, J.A. and F. Reitman (1993), " Effects of Alternative Family Structure on Managerial Career Paths, " Academy of Management Journal, 4 : 830 -843.
- Sugeng dan Indriantoro (1998), Peran Faktor Kecocokan Tugas-Teknologi Dalam Memperoleh Pengaruh Positif Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individual, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Bol. 13, hal 39-56.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi (1989), Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi, Jakarta : LP3ES.
- Sekaran, Uma (1992), Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Second Edition, New York: John Wiley and Sons.
- Warren, A. (1984), The Innovation Traps and How They Can Thwart Technological Leaps, Industry Week, Penton Publishing, Inc.

EFEK MEDIASI KOGNITIF SITUASIONAL PADA PENGARUH KEPERIBADIAN DISPOSISIONAL TERHADAP NIAT PENGGUNAAN INTERNET: STUDI EMPIRIS KEBERTERIMAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI.

Willy Abdillah

Email: aufa_fairuz2000@yahoo.com

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Abstract

The objective of this research is to investigate the effect of dispositional personality factors on intention to use internet which mediated by situational cognitive factors. Personality factors are measured by five variables openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness dan neuroticism. Meanwhile, situational cognitive factors are measured by perceived ease of use, perceived usefulness dan self-efficacy. Survey conducted to 350 students of Economic Faculty of University of Bengkulu, include Extension dan Magister Management students program. This research use non-probability sampling procedure which purposive-judgment method. Primary data gathered using closed-question form questionnaire. Hypotheses testing conducted using Partial Least Square with software SmartPLS version 2.0. Result showed that only openness to experience dan extraversion from personality factors was significantly affected on situational cognitive factors. Meanwhile, perceived usefulness dan self-efficacy were positively affected from situational cognitive factors on intention to use internet. It's indicated that situational cognitive factors were significantly mediated relationship between dispositional personality factors toward intention to use internet. These results imply theoretically dan empirically support for developing of advance information technology acceptance dan adoption theory which dominantly based on perceptual cognitive. Practically these results offer strategic information for higher education managers how to manage common problems of information system resistance. Moreover, resistance wouldn't be come as long as information technology offer benefit for users dan there is a set of education, persuasion dan training programs.

Keywords: Dispositional Personality, Situational Cognitive, Information Technology Acceptance dan Information System.

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan riset sistem informasi (SI) keperilakuan, penggunaan konstruk-construct kognitif perseptual menjadi dominan dan telah mapan dalam menjelaskan fenomena keberterimaan dan adopsi teknologi informasi (TI), seperti pada teori tindakan beralasan (TRA), teori keberterimaan TI (TAM), teori tindakan perencanaan (TPB) dan teori keberterimaan gabungan (UTAUT). Sebaliknya, penggunaan konstruk-construct kepribadian belum dilakukan secara integratif dan sebagian besar bersifat situasional, seperti konstruk internet anxiety dan personal innovativeness (Thatcher et al., 2007). Lebih jauh, perdebatan mengenai sifat hubungan antara faktor kepribadian disposisional dan situasional masih belum berakhir. Perspektif pertama menganggap kepribadian merupakan faktor disposisional yang tidak dapat diubah (Ldaners dan Lounsbury, 2006; Amiel dan Sargent, 2004). Kepribadian didefinisikan sebagai karakteristik yang melekat pada individu yang menggambarkan pola pikiran, perasaan dan

tindakan yang membedakannya dengan individu yang lain (Maddi, 1989 dalam McElroy et al., 2007). Oleh karena itu, faktor kepribadian dinilai sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah oleh faktor situasi dan kondisi tempat individu itu berada. Namun, beberapa penelitian keperilakuan SI menunjukkan bahwa aplikasi faktor kepribadian disposisional sulit dilakukan pada konteks SI yang bersifat situasional.

Lebih jauh, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya inkonsistensi konsep dan perbedaan temuan. Thatcher et al. (2007) menemukan bahwa internet anxiety (kepribadian situasional) memengaruhi personality trait. Sebaliknya, Agarwal dan Karahanna (2000) menemukan bahwa personality trait (openness to experience yang diekstraksi menjadi personal innovativeness) memengaruhi kemudahan penggunaan persepsian dan kegunaan persepsian (kognitif situasional).

Berdasarkan adanya kesenjangan secara teoritis dan empiris yang ditunjukkan oleh perdebatan tentang pengaruh faktor disposisional (personality trait dan cognitive style) dan faktor situasional (persepsi kepribadian dan persepsi kognitif), maka dengan mereplikasi dan mengembangkan model penelitian McElroy et al. (2007) dan Buchanan et al. (2005), tulisan ini bertujuan menjelaskan pengaruh faktor kepribadian disposisional (personality trait) dan faktor kognitif situasional (persepsi kognitif) terhadap niat (intention) penggunaan internet berdasarkan studi empiris pada lingkungan perguruan tinggi.

Sistematika penulisan dibagi menjadi empat bagian, yaitu bagian pertama menjelaskan landasan teori dan konsep kepribadian disposisional dan kognitif situasional. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ketiga menjelaskan hasil dan temuan penelitian. Bagian terakhir merupakan simpulan dan rekomendasi penelitian.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kepribadian Disposisional

Penelitian di bidang SI yang menggunakan konsep kepribadian dimulai oleh Zmud (1979) yang meneliti karakteristik disposisional individu (Personality dan Cognitive style) terhadap kesuksesan implementasi SI. Faktor kepribadian diukur dari dimensi struktur kognitif dan afektif individu dalam merespon kejadian, orang dan situasi yang dihadapi. Faktor kepribadian yang diyakini berpengaruh kuat terhadap kesuksesan Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah locus of control, dogmatisme, toleransi ambiguitas, ekstrovert/introvert, kebutuhan terhadap pencapaian prestasi, keberanian mengambil risiko, pertahanan evaluatif dan tingkat kecemasan (Klauss dan Jewett, 1974 dalam Zmud, 1979). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisional (personality trait dan cognitive style) memengaruhi kesuksesan penggunaan TI. Namun penelitian pada era tersebut masih belum menemukan dimensi kepribadian yang konsisten karena masih menggunakan dimensi dan variabel dari penelitian di luar SIM dan dimensi kepribadian belum terhubung dengan faktor cognitive style.

Aplikasi kelima dimensi Big Five Factor Personality dalam perilaku penggunaan internet telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa Agreeableness cenderung tidak berinteraksi dalam waktu lama dengan komputer dan menggunakan internet terutama apabila mengalami frustrasi (Ldaners dan Lounsbury, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1a : Faktor agreeableness memengaruhi kemudahan persepsian penggunaan internet.

H1b : Faktor agreeableness memengaruhi self-efficacy penggunaan internet.

Conscientiousness cenderung tidak menggunakan internet pada hal-hal yang dianggap tidak produktif, seperti chatting room dan cenderung menggunakan internet untuk kepentingan tertentu yang dianggap produktif, seperti pencarian artikel dan jurnal akademik (Ldaners dan Lounsbury, 2006). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2a : Faktor conscientiousness memengaruhi kemudahan persepsian penggunaan internet.

H2b : Faktor conscientiousness memengaruhi self-efficacy penggunaan internet.

Extraversion cenderung menggunakan internet untuk kepentingan sosialisasi secara on-line, seperti chatting room dan berbagi informasi dengan komunitas di dunia maya (Amiel dan Sargent, 2004). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3a : Faktor extraversion memengaruhi kemudahan persepsian penggunaan internet.

H3b : Faktor extraversion memengaruhi self-efficacy penggunaan internet.

Neuroticism cenderung menghindari internet untuk keperluan sosialisasi tetapi menggunakan internet untuk kepentingan hiburan pribadi (game online) dan mencari identitas diri di dunia maya (Amiel dan Sargent, 2004). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4a : Faktor neuroticism memengaruhi kemudahan persepsian penggunaan internet.

H4b : Faktor neuroticism memengaruhi self-efficacy penggunaan internet.

Openness to experience cenderung melakukan aktifitas di dunia maya untuk berpetualang dan mencari ide-ide baru (Tuten dan Bosnjak, 2001). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5a : Faktor neuroticism memengaruhi kemudahan persepsian penggunaan internet.

H5b : Faktor neuroticism memengaruhi self-efficacy penggunaan internet.

2.2 Kognitif Situasional

Perkembangan konsep kognitif dalam SI dimulai ketika mainstream penelitian keperilakuan muncul pada tahun 1960-an. Ackoff (1960) mengawali dengan melakukan studi kasus untuk mengeksplorasi penyebab kegagalan SI. Penelitian tersebut telah menstimuli penelitian berikutnya walaupun hasil penelitian gagal menemukan penyebab kegagalan sistem, namun telah mengindikasikan adanya hubungan sikap dan perilaku pemakai sistem terhadap kesuksesan SI.

Davis (1989) mengembangkan model TRA dengan mengganti konstruk kepercayaan (belief) dengan konstruk kegunaan persepsian dan konstruk kemudahan penggunaan persepsian. Model TAM dianggap lebih parsimoni dalam menjelaskan perilaku penggunaan SI dan didukung oleh banyak hasil penelitian empiris. Namun, model TAM memisahkan aspek kognitif dan afektif dengan menjadikan konstruk kepercayaan (belief) sebagai aspek kognitif dan sikap (attitude) sebagai aspek afektif.

Dalam penelitian ini, faktor-faktor kognitif yang digunakan diambil dari konstruk yang ada dalam model TAM (Davis et al. 1989), yaitu konstruk kegunaan persepsian (perceived usefulness), kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) dan konstruk self-efficacy yang dikutip dari Bandura (1982); Compeau dan Higgins (1995); Hsu dan Chiu (2004). Pemilihan tersebut didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:

1. TAM adalah model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem informasi gagal diterapkan karena pemakainya tidak mempunyai niat (intention) untuk menggunakannya. Tidak banyak model-model penerapan sistem teknologi informasi yang memasukan faktor psikologis atau perilaku di dalam modelnya dan TAM adalah salah satu pertimbangannya.

2. TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat.
3. TAM telah diuji dengan banyak penelitian dan hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM merupakan model yang baik. Bahkan TAM telah banyak diuji dan dibandingkan dengan model yang lain, misalnya TRA dan TPB dan hasilnya konsisten bahwa TAM cukup baik.
4. Kelebihan TAM yang paling penting adalah model ini merupakan model yang parsimoni yaitu model yang sederhana tapi valid.
5. Khusus self-efficacy, telah banyak digunakan dalam penelitian sebagai konstruk kognitif yang memengaruhi penggunaan SI.

2.3 Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness)

Kegunaan persepsian adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk kegunaan persepsian memengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi (Davis, 1989 dan Igbaria et al. 1997). Kegunaan persepsian merupakan konstruk yang paling banyak signifikan dan penting dalam memengaruhi sikap, minat dan perilaku dalam penggunaan teknologi dibanding konstruk yang lain. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H6 : Faktor kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap niat penggunaan internet.

2.4 Kemudahan Penggunaan Persepsian (Perceived Ease of Use)

Davis et al. (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan persepsian sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun ukuran usaha diasumsikan setiap orang berbeda tetapi untuk menghindari penolakan atas sistem yang dikembangkan, maka SI yang dibangun harus mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap memberatkan.

Kemudahan penggunaan persepsian merupakan salah satu faktor dalam model TAM yang telah diuji dalam penelitian Davis et al. (1989). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kemudahan penggunaan persepsian terbukti dapat menjelaskan alasan seseorang menggunakan sistem informasi dan menjelaskan bagaimana SI baru yang sedang dikembangkan diterima oleh pengguna. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H7 : Faktor kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap niat penggunaan internet dengan gender dan usia sebagai variabel kendali.

Lebih lanjut, Davis et al. (1989) dalam pengujian empirisnya menemukan bahwa kemudahan penggunaan persepsian merupakan prediktor kegunaan persepsian selain memberikan pengaruh langsung ke niat penggunaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H8 : Faktor kemudahan penggunaan persepsian berpengaruh positif terhadap penggunaan persepsian penggunaan internet.

2.5 Self-Efficacy

Selain penggunaan konstruk persepsian, penelitian ini juga menggunakan konstruk self-efficacy yang didasarkan pada alasan bahwa self-efficacy merupakan konstruk kognitif situasional yang dapat berubah dalam konteks tertentu. Self-efficacy didefinisikan sebagai keyakinan terhadap kemampuan untuk melakukan suatu tindakan dan persistensi untuk menghadapi kendala untuk mencapai kinerja dari suatu perilaku (Hartono, 2007a). Bdanura (1982) menyatakan bahwa self-efficacy merupakan perubahan aspek psikologi manusia sebagai respon

terhadap perlakuan yang berbeda, misalnya ketika individu menghadapi kompleksitas tugas yang berbeda maka self-efficacy nya juga akan berbeda.

Webster dan Martocchio (1992; 1993) melakukan penelitian tentang self-efficacy dengan menggunakan skala lima-item yang dikembangkan dari Hollenbeck dan Brief (1987). Instrumen pengukuran inilah yang digunakan oleh beberapa penelitian selanjutnya untuk mengukur self-efficacy, seperti penelitian Compeau dan Higgins (1995). Hasil dari banyak penelitian tersebut menunjukkan bahwa self-efficacy memengaruhi niat penggunaan TI, computer anxiety (Agarwal dan Karahanna, 2000), adopsi produk-produk berteknologi tinggi (Hill et al. 1986) dan niat untuk melakukan inovasi (Burkhat dan Brass, 1990). Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

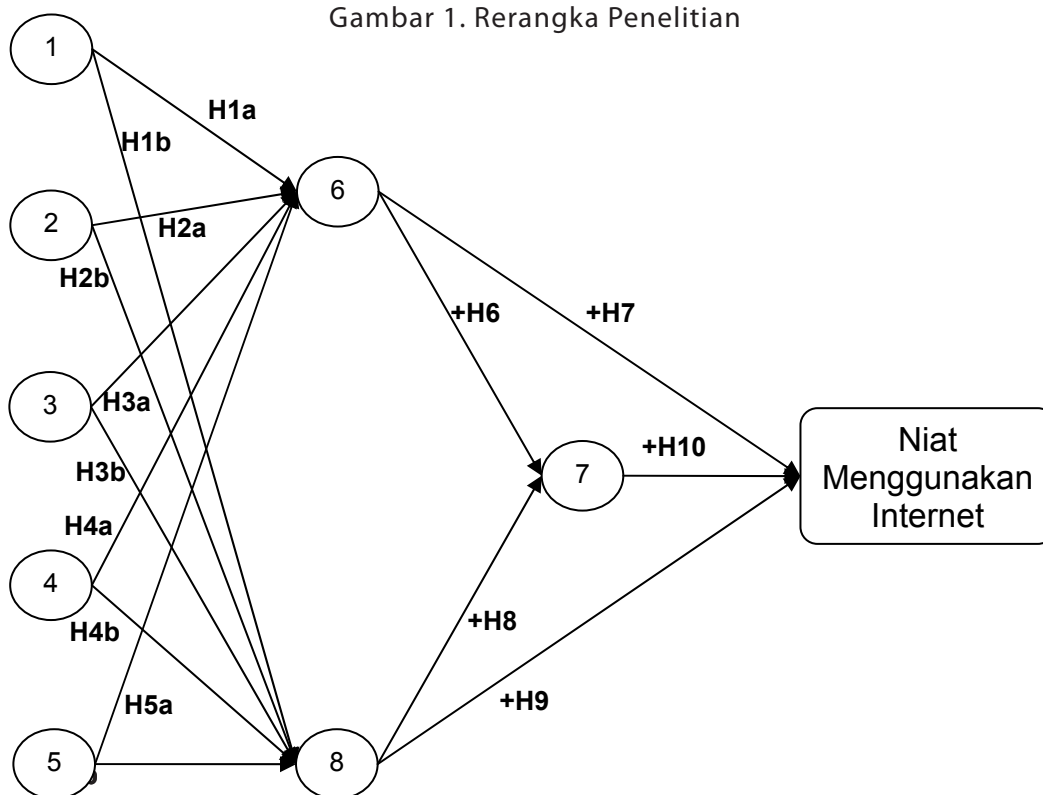
H9 : Faktor self-efficacy berpengaruh positif terhadap kegunaan persepsian penggunaan internet.

H10 : Faktor self-efficacy berpengaruh positif terhadap niat penggunaan internet.

2.6 Rerangka Penelitian

Adapun rerangka penelitian yang dibangun adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Rerangka Penelitian



Keterangan:

→ : Pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Opennes to Experience | 5. Neuroticism |
| 2. conscientiousness | 6. Perceived ease of use |
| 3. Extraversion | 7. Perceived usefulness |
| 4. Agreeableness | 8. Self-efficacy |

Sumber : Diadaptasi dari McElroy et al. (2007); Buchanan et al. (2005); Davis et al. (1989); Bdanura (1982); Compeau dan Higgins (1995); Hsu dan Chiu (2004).

3. METODA PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif-konfirmatori yang bertujuan menguji ulang dan mengembangkan model penelitian untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel (faktor kepribadian, faktor kognitif dan niat penggunaan internet) dengan pendekatan survei.

Konstruk kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju yang diukur dengan menggunakan enam pertanyaan yang diadopsi dari Davis et al. (1989). Self-efficacy diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju yang diukur dengan menggunakan lima pertanyaan yang diadopsi dari Hsu dan Chiu (2004). Kepribadian disposisional diukur dengan menggunakan instrumen Five Factor Personality dari International Personality Item Pool (IPIP) yang dikemukakan oleh Goldberg (1990) yang terdiri atas lima dimensi, yaitu *opennesstoexperience, conscientiousness, extraversion, agreeableness* dan *neuroticism*. Masing-masing dimensi diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5. Sedangkan niat perilaku diukur dengan skala likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 yang menyatakan sangat setuju yang diukur dengan menggunakan tiga pertanyaan yang diadopsi Davis et al. (1989).

3.2 Sampel Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu (FE-Unib) yang merupakan pengguna internet, termasuk mahasiswa Program Magister Manajemen (MM) dan Program Ekstensi sebanyak 350 orang responden. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara non-probabilitas dengan menggunakan teknik *purposive-judgment sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan secara *cross-sectional* selama bulan Juni 2008 melalui kuesioner dengan struktur pertanyaan tertutup.

3.3 Uji Validitas

Pengujian instrument menggunakan uji validitas *tampang* (*face validity*) dan validitas isi (*content validity*) yang dilakukan menggunakan pertimbangan akademisi dan peneliti dalam bidang sistem teknologi informasi, sedangkan validitas konstruk (*konvergen dan diskriminan*) dan pengujian hipotesis menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* dengan bantuan aplikasi *SmartPLS* versi 2.0.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Sampel Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau mahasiswa pengguna internet di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Dari 350 kuesioner langsung yang disebarkan pada mahasiswa FE Unib, sebanyak 323 yang dapat digunakan. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden merupakan kalangan dewasa muda dengan jenjang pendidikan formal sarjana strata pertama. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan karakteristik kepribadian dan kognitif responden pada siklus hidup dewasa muda. Sementara itu, distribusi gender menunjukkan proporsi wanita sedikit lebih banyak walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh, sehingga untuk membandingkan pengaruh faktor gender terhadap kepribadian dan kognitif terhadap penggunaan internet tidak berpotensi menimbulkan bias karena proporsi yang seimbang. Adapun hasil pengujian hipotesis terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Koefisien Beta Regresi, T-value dan P-value Konstruk

	Original Sample	P-value	T-value
AG -> PE	-0.050919	0.62225	0.674444
AG -> SE	0.077981	0.606948	0.709998
CS -> PE	0.024035	0.779305	0.361256
CS -> SE	0.069857	0.451031	1.167017
EV -> PE	0.218417	0.174333	3.559998
EV -> SE	0.176125	0.219404	2.785787
NT -> PE	-0.065440	0.459507	1.136048
NT -> SE	-0.024333	0.751791	0.410921
OP -> PE	0.194836	0.181716	3.407711
OP -> SE	0.223485	0.181362	3.414737
PE -> IT	0.013489	0.446307	0.170301
PE -> PU	0.379982	0.055142	5.714671
PU -> IT	0.351325	0.065137	4.818362
SE -> IT	0.235294	0.115661	2.629888
SE -> PU	0.274221	0.078275	3.984251

Sumber: Data mentah diolah, 2008

2.2 Analisis Data dan Bahasan

Berdasarkan nilai Beta Koefisien, nilai t dan nilai p di atas, hasil uji hipotesis menunjukkan variabel *openness to experience* dan *extraversion* berpengaruh terhadap *perceived ease use* dan *self-efficacy*, sedangkan pengaruh *perceived ease of use* dan *self-efficacy* terhadap *perceived usefulness* dan niat penggunaan internet adalah signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya efek mediasi penuh faktor kognitif situasional pada pengaruh faktor kepribadian disposisional terhadap niat penggunaan internet. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian McElroy et al. (2007), Tuten dan Bosnjak (1991), dan Amiel dan Sargent (2004) yang menemukan bahwa karakter *openness to experience* dan *extraversion* memiliki pengaruh kuat terhadap faktor kognitif situasional dan niat penggunaan internet secara umum.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, *openness to experience* merupakan karakter yang menyukai ide-ide abstrak, seni dan artistik, mencoba hal-hal baru, suka berpetualang dan memiliki imajinasi tinggi. Karakteristik tersebut mendorong manusia untuk menggunakan internet sebagai media untuk mencari ide-ide baru, mewujudkan imajinasi dan berpetualang di dunia maya. Sejalan dengan hasil pengujian variabel kendali, terlihat bahwa usia berpengaruh negatif terhadap niat penggunaan internet. Artinya, usia yang lebih muda cenderung lebih menerima dan mau menggunakan internet dibandingkan usia tua. Hal ini sejalan dengan karakter *openness to experience* yang dominan melekat pada usia muda, khususnya mahasiswa dalam konteks penelitian ini. Sementara itu, faktor kepribadian yang lain, yaitu *neuroticism*, *agreeableness*, *extraversion* dan *conscientiousness* tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan internet.

Neuroticism merupakan karakter negatif dari seperangkat karakter manusia. *Neuroticism* mencerminkan karakter yang labil, pemarah, paranoid, cemas dan sulit bersosialisasi dengan orang lain, sehingga dalam konteks penerimaan TI, karakter *neuroticism* tidak mendorong seseorang untuk menggunakan internet. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian McElroy et al. (2007) dan Amiel dan Sargent (2004) yang menemukan bahwa karakter *neuroticism* tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan internet, khususnya untuk kepentingan akademik. Sebaliknya, karakter *neuroticism* cenderung menggunakan internet untuk memenuhi kepuasan dan

kesenangan individual yang tidak melibatkan orang lain, seperti permainan on-line. Berdasarkan hal tersebut karakter neuroticism bukan merupakan prediktor niat penggunaan internet untuk kepentingan akademik.

Agreeableness merupakan karakter yang terbuka dengan pendapat orang lain, menghormati dan senang membantu orang lain dan sangat menjaga hubungan interaksi sosial langsung dengan orang lain. Namun, karakter ini tidak terstimuli untuk menggunakan internet terutama jika pemakai menemui kendala dalam menggunakan internet. Sejalan dengan hasil penelitian McElroy et al. (2007) dan Ldaners dan Lounsbury (2006) yang menemukan bahwa agreeableness tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan internet. Penelitian ini menemukan hal yang sama, yaitu agreeableness tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik agreeableness yang cenderung melekat pada usia tua dan menyukai interaksi langsung dengan manusia, sulit untuk menggunakan internet, terutama pada penggunaan internet untuk akademik. Hal ini mengindikasikan bahwa karakter ini merupakan potensi sumber resistensi keberterimaan teknologi internet jika organisasi tidak mampu melakukan persuasi dan edukasi yang baik dengan karakter ini. Untuk itu, lembaga pendidikan tinggi sebaiknya menerapkan pendekatan persuasi dan edukasi yang baik untuk mengajak karakter menerima teknologi internet melalui program pelatihan dan membangun forum komunikasi on-line untuk tetap mengakomodasi kepentingan sosialisasi karakter agreeableness.

Extraversion merupakan karakter yang suka bergaul, terbuka dan menyukai berada pada lingkungan komunitas sosial. Khusus pada konteks penggunaan internet, karakter ini cenderung menggunakan internet untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam komunitas dunia maya, seperti chatting room dan blog. Sejalan dengan penelitian McElroy et al. (2007) dan Amiel dan Sargent (2004) yang menemukan bahwa karakter ini tidak berpengaruh pada penggunaan internet secara umum, terutama untuk kepentingan akademik. Sebaliknya karakter ini akan menggunakan internet untuk hal-hal yang bersifat kesenangan dan interaksi sosial. Berdasarkan hal tersebut, untuk mendorong karakter ini menggunakan internet dalam konteks akademik diperlukan pertimbangan yang baik lembaga pendidikan tinggi untuk mengakomodasi kepentingan karakter ini tanpa mengubah tujuan utama penggunaan internet untuk kepentingan pendidikan formal.

Conscientiousness merupakan karakter yang disiplin, peduli pada hal-hal yang detil dan teguh pada rencana dalam mengambil tindakan. Karakter ini sangat ideal untuk mahasiswa dalam konteks penggunaan internet di lingkungan akademik karena karakter ini seharusnya merupakan prediktor yang kuat dalam keberterimaan internet pada kepentingan akademik. Sejalan dengan hasil penelitian McElroy et al. (2007), penelitian ini menemukan hasil yang sebaliknya, yaitu conscientiousness tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan internet. Temuan ini kontradiktif dengan karakteristik yang seharusnya relevan dengan penggunaan internet pada konteks kepentingan akademik. Penjelasan yang dapat diberikan adalah bahwa karakter conscientiousness tidak ditemukan pada mahasiswa FE Unib yang mencerminkan iklim akademik yang kurang kondusif untuk pengembangan keilmuan, sehingga dalam pengujian hipotesis, faktor ini tidak berpengaruh terhadap niat penggunaan internet. Temuan ini memberikan informasi penting bagi lembaga pendidikan tinggi, khususnya FE Unib, bahwa perlunya memperbaiki iklim akademik yang lebih kondusif untuk pengembangan keilmuan melalui pengembangan program-program akademik yang lebih menarik minat pengembangan ilmu mahasiswa dan pengembangan fasilitas akademik yang lebih baik, seperti jurnal on-line.

Pengujian hipotesis faktor kognitif situasional menunjukkan variabel kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap niat penggunaan internet. Sejalan dengan penelitian McElroy et al. (2007) menemukan bahwa kegunaan persepsian berpengaruh positif terhadap niat penggunaan internet. Artinya, semakin tinggi tingkat keyakinan pemakai akan manfaat yang diperoleh dari menggunakan teknologi internet, maka semakin besar niat untuk menggunakan internet. Sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Davis (1989) dan Davis et al. (1989) serta banyak penelitian setelahnya yang menggunakan model TAM, menyatakan bahwa kegunaan persepsian merupakan prediktor yang paling kuat terhadap niat penggunaan TI.

Compeau dan Higgins (1995) dan Hsu dan Chiu (2004) menemukan bahwa self-efficacy merupakan prediktor terhadap penggunaan TI, khususnya internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap niat menggunakan internet. Artinya, semakin tinggi tingkat keyakinan akan kemampuan melakukan

aktifitas tertentu melalui internet yang didasari oleh pengetahuan dan keahlian tentang teknologi internet maka semakin besar niat untuk menggunakan internet.

Berdasarkan uji hipotesis tiga variabel kognitif situasional, variabel kemudahan penggunaan persepsian tidak berpengaruh positif langsung terhadap niat penggunaan internet. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Davis (1989), menemukan bahwa variabel kemudahan penggunaan persepsian tidak berpengaruh langsung terhadap niat tetapi merupakan anteseden terhadap kegunaan persepsian yang sekaligus merupakan variabel mediasi terhadap pengaruh variabel kemudahan penggunaan persepsian pada niat penggunaan. Ketiga hasil pengujian hipotesis variabel kognitif situasional mengindikasikan bahwa niat mahasiswa untuk menggunakan internet dalam lingkungan akademik dipengaruhi oleh dimensi kognitif (persepsi) atas kegunaan atau manfaat TI dan tingkat keyakinan akan kemampuan penggunaan.

Sejalan dengan hasil uji perbandingan besaran pengaruh antara faktor kepribadian disposisional dan kognitif situasional, menunjukkan faktor kognitif lebih berpengaruh terhadap niat penggunaan internet di lingkungan akademik dibandingkan faktor kepribadian. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam lingkungan akademik yang dominan dengan aspek rasionalitas (kognitif) dalam proses interaksi sosial, keputusan mahasiswa sebagai pengguna TI lebih dipengaruhi oleh aspek rasionalitas atas pertimbangan untuk menggunakan internet. Karena itu, aspek karakter yang menetap dalam diri individu kurang berpengaruh terhadap niat penggunaan internet.

Hasil pengujian di atas memberikan informasi penting bagi lembaga pendidikan tinggi dalam investasi dan pengembangan SI bahwa aspek kognitif (persepsi atas manfaat dan keyakinan atas kemampuan menggunakan TI) merupakan prediktor kuat dibandingkan aspek kepribadian. Walaupun demikian, karakteristik individu (*openness to experience*) tetap merupakan prediktor keberterimaan internet. Untuk itu, lembaga pendidikan tinggi seharusnya merasa yakin bahwa keputusan investasi TI dalam bentuk internet merupakan hal yang tepat dilakukan sepanjang sistem kendali dan pengelolaan atas SI dilakukan dengan baik. Permasalahan keberterimaan dan adopsi internet bukan merupakan kendala yang dapat menghambat pengembangan SI di lingkungan perguruan tinggi sepanjang persepsi dan keyakinan yang terbentuk atas TI tersebut baik di mata pemakai sistem.

Secara umum hasil penelitian ini memberikan kontribusi dan penegasan atas kesenjangan teoritis dan empiris dalam riset SI keperilakuan bahwa faktor kepribadian disposisional dan kognitif situasional merupakan prediktor niat penggunaan internet di lingkungan perguruan tinggi. Namun, faktor kognitif merupakan prediktor utama dibandingkan faktor kepribadian, sehingga dapat disimpulkan model penelitian ini mendukung banyak hasil penelitian SI keperilakuan lainnya yang menggunakan dimensi kognitif perseptual, seperti TAM, TPB dan UTAUT yang menunjukkan bahwa konstruk-konstruk tersebut merupakan prediktor utama dalam keberterimaan TI yang berbasis perseptual (Robey, 1983). Penelitian selanjutnya, perlu mengkaji lebih lanjut faktor kepribadian situasional yang sedang dikembangkan dalam riset SI keperilakuan dan faktor kognitif disposisional yang jarang diteliti dalam riset empiris.

5. PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efek mediasi faktor kognitif situasional pada pengaruh faktor kepribadian disposisional terhadap niat penggunaan internet. Alasan utama peneliti melakukan pengujian adalah karena adanya kesenjangan teoritis dan empiris dalam penelitian tentang keberterimaan TI yang menggunakan kedua faktor tersebut. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu model pengukuran kepribadian disposisional menggunakan model IPIP dan kognitif situasional menggunakan konstruk kemudahan penggunaan persepsian, kegunaan persepsian dan *self-efficacy*.

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-konfirmatori dengan pendekatan survei. Data primer yang digunakan diambil secara *cross-sectional* dari 350 orang responden yang merupakan mahasiswa pengguna internet di lingkungan FE Unib. Prosedur penyampelan dilakukan secara non-probabilitas dengan teknik *convenience sampling*.

Hasil pengujian menunjukkan adanya efek mediasi penuh faktor kognitif situasional pada pengaruh faktor kepribadian disposisional terhadap niat penggunaan internet. Namun, hanya variabel *openness to experience* dan

extraversion pada faktor kepribadian disposisional yang signifikan berpengaruh terhadap faktor kognitif situasional sedangkan seluruh variabel kognitif situasional signifikan berpengaruh pada niat penggunaan internet.

Hasil penelitian memberikan kontribusi penting bagi lembaga pendidikan tinggi yang sedang mengembangkan TI. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada lingkungan pendidikan tinggi, prediksi keberterimaan teknologi internet lebih dominan dimediasi oleh faktor kognitif situasional dibandingkan prediksi langsung faktor kepribadian disposisional. Hal ini menegaskan bahwa secara teoritis, konstruk-konstruk kognitif situasional merupakan konstruk yang telah baku dan lebih baik dalam menjelaskan fenomena keberterimaan TI dibandingkan konstruk kepribadian diprediksi oleh lebih didominasi oleh orang-orang dengan karakter *openness to experience*, yaitu orang-orang yang memiliki sifat suka mencari pengalaman, ilmu, ide-ide baru dan tertantang untuk mencoba sesuatu yang baru. Selain itu, orang akan menerima dan mengadopsi internet jika orang tersebut menilai bahwa internet memberikan kemanfaatan (misal: meningkatkan kinerja, meningkatkan produktifitas dan mempercepat penyelesaian kerja) dan pemakai sistem memiliki keyakinan akan kemampuan menggunakan internet berbasis pada pengetahuan dan keterampilan tentang internet yang dimilikinya. Namun, secara umum, karakter individual bukanlah prediktor kuat penggunaan TI tetapi aspek kognitif perseptual yang lebih berpengaruh terhadap niat penggunaan internet.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan atau kelemahan antara lain: (1) Penelitian ini hanya meneliti penggunaan satu TI, yaitu internet, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk penggunaan TI yang lain; (2) Subjek penelitian terbatas pada pemakai TI di lingkungan perguruan tinggi yang merupakan lingkungan akademik, sehingga hasil penelitian sulit digeneralisir untuk subjek penelitian lain; (3) Penelitian ini hanya mengukur pada tingkatan niat penggunaan yang berbasis perseptual, tidak pada penggunaan aktual sehingga penilaian dilakukan berdasarkan parameter subjektif opini responden; dan (4) Terlalu banyak item-item pertanyaan untuk mengukur konstruk kepribadian membuat responden tidak serius atau lelah dalam mengisi kuesioner. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan banyak indikator-indikator dari konstruk kepribadian yang tidak valid.

Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Penelitian berikutnya dapat menggunakan model penelitian yang sama untuk mengukur keberterimaan dan adopsi TI selain internet yang berbasis web, seperti TI berbasis teknologi komunikasi seluler; (2) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada lingkungan perguruan tinggi tetapi pada lingkungan pengguna TI yang lebih luas, misalnya pelaku e-commerce; (3) Cakupan pengukuran dapat dikembangkan dengan mengukur penggunaan aktual, sehingga ada komparasi antara persepsi responden yang subjektif dengan parameter yang objektif; dan (4) Jika penelitian selanjutnya menggunakan konstruk-konstruk kepribadian disposisional, maka pada saat pengumpulan data sebaiknya dilakukan kendali yang ketat terhadap responden untuk menghindari bias respon, misalnya dengan mendampingi responden pada saat mengisi kuesioner (*self-administered questionnaire*) atau dengan memberikan kompensasi yang dapat menstimuli responden untuk mengisi kuesioner lebih baik.

Daftar Pustaka

- Ackoff, R.L., (1960), "Unsuccessful Case Studies dan Why", *Operations Research*, Vol. 2, No. 8, pp. 259-263.
- Agarwal, R. and Karahanna, E., (2000), "Time Flies when You are Having Fun: Cognitive Absorption dan Beliefs about Information Technology Usage", *MIS Quartely*, Vol. 24, pp. 418-430.
- Ajzen, I., (1991), "The Theory of Planned Behavior", *Organisational Behavior dan Human Decision Process*, Vol. 50, pp.179-211.
- Amiel, T. and Sargent, S.L., (2004), "Individual Differences in Internet Usage Motives", *Computers in Human Behavior*, Vol. 20, No. 6, pp. 711-726.
- Bdanura, A., (1982), "Self-Efficacy Mechanism in Human Agency", *American Psychologist*, Vol. 2, No.37, pp.122-147.

- Buchanan, T., Jhonson, J.A. and Goldberg, L.R., (2005), "Implementing a Five-Factor Personality Inventory for Use on the Internet", *European Journal of Psychology Assessment*, Vol. 22, No.2, pp.115-127.
- Burkhat, M.E. and Brass, D.J., (1990), "Changing Patterns or Patterns of Change: The Effects of a Structure dan Power", *Administrative Science Quartely*, Vol.35, pp.104-127.
- Cambre, M.A. and Cook, D.L., (1985), "Computer Anxiety: Definition, Measurement dan Correlates", *Journal of Educational Computing Research*, Vol.1, No.1, pp.37-54.
- Chesney, T., (2006), "An Acceptance Model for Useful dan Fun Information System", *An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments*, Vol.2, No.2, pp.225-235.
- Compeau, D.R. and Higgins, C.A., (1995), "Computer Self-efficacy: Development of a Measure dan Initial Test", *MIS Quarterly*, Vol.19, No.2, pp.189-211.
- Cooper, Donald R. and Pamela S. Schindler, (2006), *Business Research Methods*, 9th ed., New York, NY: Irwin/McGraw-Hill.
- Costa, P.T. and McCrae, R.R., (1992), "Revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) dan NEO Five-Faktor Inventory (NEO-FFI) Professional Manual", *Psychological Assessment Resources*, Odessa, FL.
- Davis, F.D., (1989), "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use dan End User Acceptance of Information Technology", *MIS Quartely*, Vol.13, No.3, pp.319-340.
- Davis, F.D., Bagozzi, R.P. and Warhsaw, P.R. (1989), "User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models", *Management Science*, Vol.35, No.8, pp.982-1003.
- Gardner, C. and Amoroso, D.L., (2004), "Development of an Instrument to Measure the Acceptance of Internet Technology by Consumers", *Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences*.
- Gist, M.E., Schwoerer, C.E. and Rosen, B., (1989), "Effects of Alternative Training Methods on Self-Efficacy dan Performance in Computer Software Training", *Journal of Applied Psychology*, Vol.6, No.74, pp. 884-891.
- Goldberg, L. R., (1990), "An Alternative "Description of Kepribadian": The Big-Five Factor Structure", *Journal of Personality dan Social Psychology*, Vol.59, pp.1216-1229.
- Goodhue, D.L. and Thompson, R.L., (1995), "Task-Technology Fit dan Individual Performance", *MIS Quartely*, pp.213-236.
- Gozali, I., (2006), *Structural Equation Modelling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square-PLS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J.F. Jr., Black, W.C., Babin, B.J., Danerson, R.E. and Tatham, R.L., (2006), *Multivariate Data Analysis*, 6th ed., NJ, Pearson Prentice Hall.
- Hartono, J.M., (2007a), *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi I, Dani Offset, Yogyakarta.
- _____ (2007b), *Sistem Informasi Strategis*. Edisi I, Dani Offset, Yogyakarta.
- _____ (2008a), *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Edisi I, Dani Offset, Yogyakarta.
- _____ (2008b), *Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon*. Edisi I, BPFE, Yogyakarta.

- Heinssen, R.K., Glass, C.R. and Knight, L.A., (1987), "Assessing Computer Anxiety: Development dan Validation of the Computer Anxiety Rating Scale", *Computers in Human Behavior*, Vol.3, No.1, pp.49-59.
- Hill, T., Smith, N.D. and Mann, M.F., (1987), "Role of Efficacy Rpxpectations in Predicting the Decision to Use Advanced Technologies: The Case of Computers", *Journal of Applied Psychology*, Vol.2, No.72, pp.307-313.
- Hollenbeck, J.R. and Brief, A.P., (1987), "The Effects of Individual Differences dan Goal Origins on Goal Setting dan Performance", *Organisational Behavior dan Human Decision Performance*, Vol.3, No.40, pp.392-414.
- Hsu, M.H. and Chiu, C.M., (2004), "Predicting Electronic Service Continuance with a Decompensated Theory of Planned Behavior", *Behavior dan Information Technology*, Vol. 23, No.5, pp.359-373.
- Igbaria, M., Parasuraman, S. and Baroudy, J.J., (1996), "A Motivational Model of Microcomputer Usage", *Journal of Management Information System*, Vol.13, pp.127-143.
- Ldaners, R.N. and Lounsbury, J.W., (2006), "An Investigation of Big Five dan Narrow Personality Traits in Relation to Internet Usage", *Computers in Human Behavior*, Vol.22, No 2, pp.283-293.
- Lee, Y., Kozar, K.A. and Larsen, K.R.T., (2003), "The Technology Acceptance Model: Past, Present dan Future", *Communication of the Association for Information Systems*, Vol.12, No.50, pp.752-780.
- Lucas, H.C., Jr., (1974), "System Quality, User Reactions dan Use of Information System", *Management Informatics*, Vol.3, No.4, pp.207-212.
- Lucas, H.C., Jr., (1975), "User Reactions to Computer Operations", *Sloan Management Review*, Vol.3, No.15, pp.59-67.
- McElroy, J.C., Hendrickson, A.R., Townsend, A.M. and DeMarie, S.M., (2007), "Dispositional Factors in Internet Use: Personality Versus Cognitive Style", *MIS Quarterly*, Vol.31, No.4, pp.809-820.
- McCrae, R.R. and Costa, Jr., P.T., (1989), "More Reason to Adopt the Five-Factor Model", *American Psychology*.
- Robey, D., (1979), "User Attitudes and Management Information System Use", *Academy of Management Journal*, Vol.3, No.22, pp.527-538.
- Robey, D., (1983), "Cognitive Style and DSS Design: A Comment on Huber's Paper", *Management Science*, Vol.29, No.2, pp.580-582.
- Salisbury, W.D., Chin, W.W., Gopal, A. and Newsted, P.R., (2002), "Research Report: Better Theory Through Measurment-Developing a Scale to Capture Consensus on Appropriation", *Information System Research*, Vol.13, No.1, pp.91-103.
- Szajna, B., (1996), "Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model", *Management Science*, Vol.1, No.42, pp.85-92.
- Taylor, S. and Todd, P.A., (1995), "Understanding Information Technology Usage: A Test of Competing Models", *Information System Research*, Vol.6, No.1, pp.144-176.
- Tenenhaus, M., Vinzi, V.E., Chatelin, Y.M. and Lauro, C., (2005), "PLS Path Modelling", *Computational Statistics dan Data Analysis*, Vol.48, pp.159-205.

- Thatcher, J.B., Misty L.L., Jaejoo, L. and McKnight, D. H., (2007), "Internet Anxiety: An Empirical Study of the Effects of Kepribadian, Beliefs and Social Support", *Information Management*, Vol.44, pp.353-363.
- Thompson, R.L., Higgins, C.A. and Howell, J.M., (1991), "Personal Computing: Toward Conceptual Model of Utilisation", *MIS Quartely*, March.
- Turban, E., King, D., McKay, J., Marshall, P., Lee, J. dan Viehland, D., (2008), "Electronic Commerce: A Managerial Perspective", Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, NJ.
- Tuten, T. and Bosnjak, M., (2001), "Understanding Differences in Web Usage: The Role of Need for Cognition and the Five Factor Model of Personality", *Social Behavior and Personality*, Vol. 29, No.4, pp.391-398.
- Van der Heijden, H., (2004), "User Acceptance of Hedonic Information System", *MIS Quartely*, Vol.28, pp.695-704.
- Venkatesh, V. and Davis, F.D., (2000), "A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies", *Management Science*, Vol.46, No.2, pp. 186-204.
- Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B. and Davis, F.D., (2003), "User Acceptance of Information Technology: Toward Unified View. *MIS Quarterly*, Vol.27, No.3, pp.425-478.
- Webster, J. and Martocchio, J.J., (1992), "Microcomputer Playfulness: Development of a Measure with Workplace Implications", *MIS Quartely*, Vol.2, No.16, pp.201-226.
- _____ (1993), "Turning Work into Play: Implication for Microcomputer Software Training", *Journal of Management*.
- www.wikipedia.org, (2008), Myers-Briggs Type Indicator, URL diakses pada 22 Mei 2008: 13.22 wib.
- Zmud, R.W., (1979), "Individual Differences and MIS Success: A Review of the Empirical Literature", *Management Science*, Vol.25, No.10, pp.966-97.

DAMPAK KEBERADAAN SUPERMARKET TERHADAP PEDAGANG RITEL PASAR
TRADISIONAL: STUDI KASUS SUPERMARKET "X" DENGAN PASAR "Y"
DI JL. SULTAN AGUNG, YOGYAKARTA

P. Didit Krisnadewara
Email: didit@mail.uajy.ac.id

Y. Sri Susilo
Email: yssusilo@mail.uajy.ac.id
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

The purpose of this research is to identify and analyze the impact of supermarket existence on retail merchants in traditional market. The study uses the case of Supermarket "X" and retail merchants in Traditional Market "Y" on Sultan Agung Street, Yogyakarta. Sample size is 59 retail merchants. Sampling on retail merchants utilized purposive sampling method. For respondents exclude the retail merchants is utilized convenience sampling method. Data analyzed with descriptive analysis and statistic analysis method. The result of the survey shows that 22 respondents (37.3%) are not experiencing the change in turnover. As 37 respondents (62.7%) stated that they are experiencing the decline in turnover. The result of statistic examination with paired sample test concluded that average revenue before and after supermarket existence is relatively different. In another word, the existence of Supermarket "X" has impact on average turnover per day earned by retail merchants in traditional market "Y" significantly. The level of difference meant is 0.15254, viewed from the average value.

Keywords: supermarket, retail merchant, traditional market.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 200 juta jiwa dan kedatangan jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai sekitar 5 juta per tahun merupakan pasar yang potensial bagi usaha ritel atau eceran (Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT. Solusi Dinamika Manajemen, 2005). Usaha atau bisnis eceran termasuk meliputi supermarket, hipermarket, toko, warung, pedagang ritel di pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan usaha dan bisnis di bidang ritel berkembang dengan pesat. Selama periode tahun 1998 sampai dengan 2003, hipermarket di seluruh Indonesia tumbuh 27% per tahun atau dari 8 gerai menjadi 49 gerai (Poesoro, 2007). Sebagai contoh untuk Jabodetabek, selama periode 1999 – 2004 terjadi peningkatan pangsa pasar supermarket terhadap total pangsa pasar industri makanan yang cukup tajam dari 11% menjadi 30%. Selanjutnya penjualan supermarket juga tumbuh rata-rata 15% per tahun, sedangkan penjualan pedagang tradisional turun 2% per tahunnya (Natawidjaya, 2006). Pertumbuhan hipermarket terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan proporsi 58% dari keseluruhan hipermarket.

Pertumbuhan dan keberadaan pasar modern tersebut, terutama hipermarket dan supermarket, berdampak pada pedagang ritel di pasar tradisional terutama pedagang yang produknya sama di kedua pasar tersebut. Bagi pedagang makanan segar (daging, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya) masih bisa bersaing dengan supermarket dan hipermarket, hal ini disebabkan banyak pembeli yang memilih untuk pergi ke

pasar tradisional untuk membeli produk tersebut (Poesoro, 2007). Keunggulan pasar modern dari pasar tradisional adalah mereka dapat menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah¹. Di samping itu di pasar modern lebih nyaman dalam berbelanja dan ada beragam pilihan dalam pembayaran. Supermarket dan hipermarket telah bekerjasama dengan pemasok besar, hal ini tentu akan dapat menekan biaya dan pencapaian skala ekonomi yang lebih besar. Hal lain yang dilakukan oleh supermarket dan hipermarket adalah beberapa strategi harga dan strategi non-harga untuk menarik pembeli (Suryadarma et al, 2007). Strategi termaksud antara lain strategi limit harga, predatory pricing, diskriminasi harga antar waktu, iklan, membuka gerai lebih lama, bundling, dan parkir gratis.

Kemunculan atau keberadaan pasar modern, baik supermarket maupun hipermarket, di samping membawa dampak positif namun di sisi lain juga berdampak negatif (Tresna, 2007). Dampak positif diantaranya konsumen diuntungkan dengan semakin tersedianya banyak pilihan untuk berbelanja. Persaingan antar supermarket dan hipermarket juga berdampak positif terhadap peningkatan pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya dampak negatif yang muncul adalah supermarket dan hipermarket akan semakin memarginalkan pedagang-pedagang ritel di pasar rakyat atau pasar tradisional. Pedagang-pedagang pasar tradisional yang merupakan pengusaha mikro-kecil yang tidak mampu bertahan akhirnya gulung tikar (Hanafi, 2006). Dampak negatif yang lain adanya pasar modern tersebut akan mendorong masyarakat semakin konsumtif.

Bagaimanakah dampak keberadaan supermarket terhadap usaha ritel pasar tradisional? Riset dilakukan dengan pendekatan studi kasus dampak keberadaan supermarket "X" terhadap pasar tradisional "Y" di Jl. Sultan Agung, Kota Yogyakarta. Dampak dalam kasus ini mencakup aspek omset penjualan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Suryadarma et al., (2007) dari SMERU melakukan riset mengenai dampak supermarket terhadap pasar dan pedagang tradisional di daerah perkotaan. Lokasi penelitian mencakup beberapa pasar di Depok dan Bandung. Responden riset tersebut meliputi pedagang di pasar tradisional dan pihak-pihak terkait (stakeholders) seperti misalnya Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pengelola pasar tradisional, pengelola supermarket, dan kantor/instansi pemerintah yang terkait. Alat analisis yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan metode difference in difference (DiD) dan metode ekonometrik. Riset ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait.

Temuan analisis kualitatif menunjukkan bahwa supermarket memang memberi dampak negatif terhadap pedagang ritel di pasar tradisional. Peritel yang berada di pasar tradisional yang dekat lokasi supermarket terkena dampak yang lebih buruk dibandingkan yang jauh dari supermarket. Lesunya perdagangan peritel di pasar tradisional harus diakui tidak hanya disebabkan oleh keberadaan supermarket, tetapi juga oleh lemahnya daya saing peritel sendiri dan menurunnya daya beli konsumen karena kenaikan harga BBM. Faktor lain adalah meningkatnya persaingan dengan pedagang kaki lima (PKL) yang memenuhi lahan parkir dan jalan di sekitar pasar tradisional.

Analisis dampak kuantitatif menemukan hasil statistik yang bervariasi untuk beberapa indikator kinerja pasar tradisional, seperti jumlah keuntungan, pendapatan, dan jumlah pegawai. Dari indikator tersebut, ditemukan bahwa supermarket secara statistik hanya berdampak pada pasar tradisional melalui jumlah karyawan yang bekerja. Data tersebut menunjukkan bahwa pedagang di pasar tradisional hanya bersedia memperkerjakan pegawai lebih banyak jika lokasi jauh dari supermarket, demikian pula sebaliknya. Pengurangan jumlah karyawan merupakan

¹ Selama ini pasar tradisional dianggap unggul dalam memberikan harga yang relatif rendah, namun keunggulan tersebut mulai terkikis karena supermarket dan hipermarket mempunyai jaringan dengan pemasok dan mempunyai akses langsung dengan produsen. Kondisi ini menyebabkan mereka mampu menekan harga pokok dan menjual dengan harga yang lebih rendah (Napitupulu, 2007). Hasil survei menunjukkan bahwa pembeli tetap mengunjungi pasar tradisional dengan alasan harga lebih murah (20%), harga bisa ditawar (25%), lokasi dekat rumah (12%), banyak pilihan makanan dan produk segar (18%), menyediakan segala yang diperlukan (6%), dan alasan lainnya (10%) (Hagemman, 2007).

salah satu strategi yang dilakukan agar usahanya tetap mampu bersaing dan bertahan.

Studi atau riset yang lain dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan PT. Solusi Dinamika Manajemen pada tahun 2006. Penelitian ini mengambil lokasi di 10 wilayah propinsi di Indonesia, dengan objek kajian: (1) pasar tradisional, (2) koperasi/wasberba, (3) UKM sektor ritel, (4) pasar modern, dan (5) instansi terkait. Alat analisis yang digunakan dalam riset ini mencakup pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah analisis univariat (MannWhitneytest dan t-test), yang sebelumnya diaduhuludengan uji normalitas data dengan metode one-sample Kolmogorov-Smirnov. Alat analisis yang lain adalah regresi logistik (logit regression).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa dampak negatif keberadaan pasar modern (supermarket dan hypermarket) terhadap pasar tradisional adalah dalam hal omset penjualan. Variabel omset penjualan pasar tradisional menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah hadirnya pasar modern. Dalam hal ini sesudah kehadiran pasar modern ternyata omset penjualan lebih rendah dibandingkan sebelum kehadiran pasar modern. Temuan yang lain adalah untuk variabel jumlah tenaga kerja dan harga jual barang tidak signifikan.

Selanjutnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI dan PT. Indef Ramadani (INDEF) melakukan kajian dampak ekonomi keberadaan hypermarket terhadap ritel / pasar tradisional pada tahun 2007. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif, khususnya metode difference-in-difference (DiD) untuk melihat dampak keberadaan hypermarket terhadap pedagang ritel / pasar tradisional. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak pemangku kepentingan (stake holders) yang terkait dengan pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Lokasi riset dilakukan di kota Makassar, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa keberadaan hypermarket berdampak negatif terhadap pasar tradisional. Pasar tradisional mengalami penurunan jumlah jenis barang dagangan, jumlah pembeli, jumlah pemasok, dan jumlah pegawai/karyawan setelah adanya hypermarket. Keberadaan hypermarket tidak berdampak negatif terhadap beberapa indikator kinerja dari pedagang di pasar tradisional, yaitu rata-rata omset, perputaran persediaan, dan margin harga komoditas. Hasil pengujian secara statistik terhadap indikator-indikator tersebut tidak signifikan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi

Lokasi penelitian dipilih di pasar tradisional "Y" yang berlokasi di Jl. Sultan Agung, Yogyakarta dimana di lokasi tersebut berdekatan dengan sebuah supermarket "X" yang baru beroperasi pada bulan Desember 2007. Jarak antara supermarket "X" dengan pasar tradisional "Y" sekitar 500 meter.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan dan juga wawancara mendalam dengan pedagang pasar tradisional, asosiasi yang terkait, pengelola supermarket, pengelola pasar tradisional, dan instansi terkait. Penentuan sampel, khususnya pedagang ritel di pasar tradisional, dilakukan dengan metode purposive sampling (Kuncoro, 2003). Untuk responden lain penentuan sampel ditentukan dengan convenience sampling (Kuncoro, 2003). Data sekunder bersumber dari survei literatur dari berbagai sumber, termasuk penelusuran melalui internet. Penggunaan data sekunder untuk mendukung analisis yang didasarkan data primer.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Analisis Deskriptif

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dalam riset yang menggunakan analisis deskriptif pada dasarnya mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua atau lebih fenomena (Leedy dan Ormrod, 2005). Pengertian yang lain,

dalam analisis deskriptif memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Kuncoro, 2003). Selanjutnya dalam analisis deskriptif dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian tersebut.

Dalam analisis deskriptif dapat dilakukan komparasi antara hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian terkait dan dilakukan korelasi antara hasil-hasil penelitian tersebut dengan teori atau konsep yang relevan (Singarimbun dan Effendi, 1989). Kemudian analisis secara deskriptif juga dilakukan dengan teknik statistik yang relatif sederhana, seperti misalnya menggunakan tabel, grafik, dan ukuran tendensi sentral yaitu nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus (Kountur, 2003). Dengan demikian sekalipun metode analisis yang digunakan dalam riset ini relatif sederhana, namun dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3.2 Analisis Statistik

Dalam riset ini juga dilakukan analisis dengan metode statistika. Pengujian dilakukan dengan uji t untuk dua sampel yang berpasangan (Paired). Dua sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda (Santoso, 1999). Dengan asumsi bahwa distribusi dari perbedaan populasi ini mengikuti distribusi normal. Uji statistik untuk distribusi t dihitung menggunakan rumus Paired t Test sebagai berikut (Lind, et al., 2003):

$$t = \frac{\bar{d}}{S_d / \sqrt{n}}$$

di mana :

Degrees of freedom : $n - 1$

\bar{d} : rata-rata dari perbedaan antara dua sampel yang berpasangan

S_d : standar deviasi dari perbedaan antara dua sampel yang berpasangan

n : jumlah dua sampel yang berpasangan

Standar deviasi dari perbedaan tersebut dapat dihitung dengan formula di bawah ini :

$$S_d = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n - 1}}$$

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam hal pendapatan yang nyata dari pedagang pasar tradisional sebelum dan sesudah beroperasinya supermarket.

3.4 Tahapan/Langkah Penelitian

Adapun tahapan /langkah penelitian sebagai berikut:

- (1). Melakukan pengumpulan data sekunder dari instansi/lembaga yang telah disebutkan di atas. Sumber data sekunder lainnya bersumber dari majalah, surat kabar, jurnal, publikasi lainnya dan penelusuran melalui internet.
- (2). Melakukan survei terhadap 65 (enam puluh lima) pedagang ritel di pasar tradisional "Y" untuk mencari data dan

informasi yang sesuai dengan tujuan studi. Survei dilakukan dengan cara melakukan wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan.

- (3). Melakukan wawancara mendalam (in-dept interview) terhadap perusahaan 5 (lima) pedagang yang bersedia menjadi responden dan terpilih menjadi sampel. Metode yang dipilih untuk menentukan sampel adalah convenience sampling (Kuncoro, 2003). Tujuan dilakukan wawancara mendalam agar diperoleh informasi yang lebih mendalam dari jawaban-jawaban yang telah diberikan berdasarkan pertanyaan dalam kuesioner.
- (4). Melakukan wawancara mendalam pihak-pihak terkait yaitu asosiasi pedagang pasar, asosiasi pengusaha ritel, pengelola supermarket, pengelola pasar tradisional, pembeli / konsumen, pemasok, dan instansi terkait. Metode yang dipilih untuk menentukan sampel adalah convenience sampling (Kuncoro, 2003), dengan besar sampel disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5). Dari data primer dan sekunder yang terkumpul, baru kemudian diolah dan diuji secara statistik sesuai dengan tujuan penelitian.
- (6). Pelaporan riset, presentasi riset, revisi, dan penulisan artikel untuk dikirim ke jurnal yang terakreditasi.

3.5 Batasan Operasional

Batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1). Pasar Tradisional adalah pasar atau tempat berjualan yang dikelola oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan belum menerapkan manajemen usaha yang moderen.
- (2). Supermarket adalah pasar atau tempat berjualan yang dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen dan dimiliki oleh pihak swasta.
- (3). Dampak adalah pengaruh keberadaan supermarket terhadap pedagang ritel di pasar tradisional yang mencakup aspek omset penjualan, keuntungan, dan harga jual.
- (4). Omset penjualan adalah pendapatan yang diperoleh dari total penjualan (jumlah barang yang terjual x harga barang per unit)
- (5). Pedagang ritel adalah pedagang yang berjualan barang di pasar tradisional secara eceran.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden

Bagian ini menjelaskan profil dari 59 responden pedagang ritel pasar tradisional berdasarkan frekuensi dan persentase menurut jenis barang dagangan, lama usaha, dampak omset penjualan rata-rata (tetap/tidak berubah atau turun) baik sebelum maupun sesudah keberadaan supermarket². Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa daging dan makanan kecil/jajan pasar/gorengan memiliki frekuensi yang paling banyak yaitu masing-masing 9 pedagang ritel dengan persentase masing-masing 15,3 %. Jenis barang dagangan yang menduduki peringkat kedua adalah sayuran dengan frekuensi sebanyak 8 pedagang dengan persentase 13,6 %. Sedangkan untuk bumbu dapur sebesar 11,9 % dengan frekuensi sebanyak 7 pedagang, kemudian untuk kelontong, ikan, dan lainnya masing-masing frekuensinya sebanyak 6 pedagang dengan persentase masing-masing sebesar 10,2 %. Dengan frekuensi sebanyak 5 pedagang diduduki oleh jenis barang dagangan lauk pauk sebesar 8,5 %. Untuk jenis barang dagangan yang memiliki frekuensi kecil adalah buah-buahan sebanyak 3 pedagang ritel dengan persentase sebesar 5,1 %.

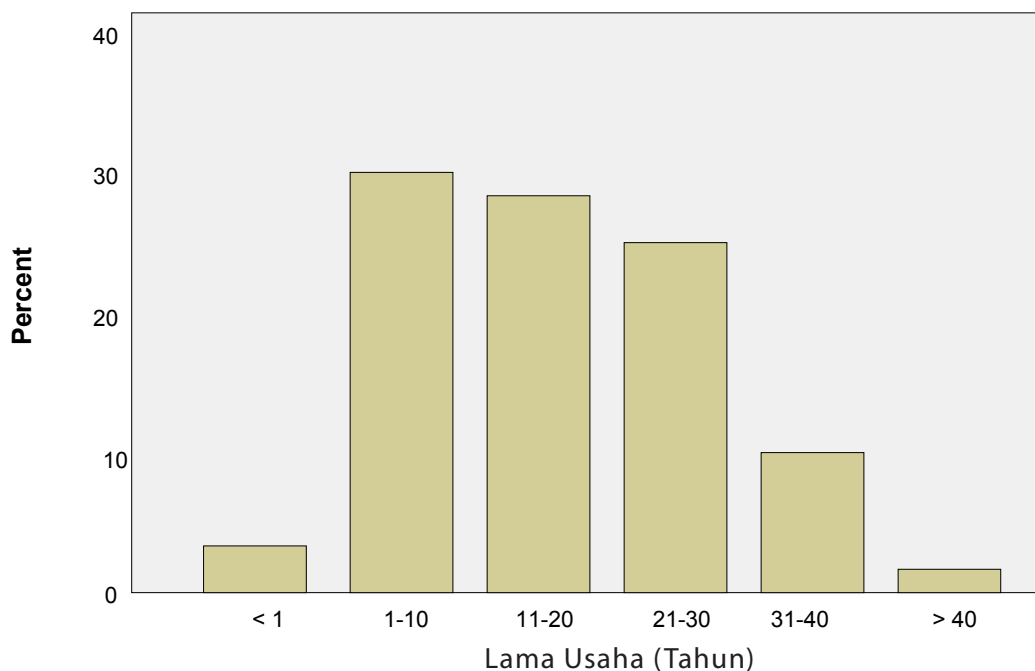
² Dari jumlah responden sebanyak 65 pedagang, setelah diteliti hasil kuesionernya maka yang dapat digunakan sebanyak 59 responden.

Tabel 1
Pedagang Ritel Pasar Tradisional Menurut Jenis Barang Dagangan

No.	Jenis Barang Dagangan	Frekuensi	%
1	Kelontong	6	10,2
2	Sayuran	8	13,6
3	Daging	9	15,3
4	Ikan	6	10,2
5	Bumbu dapur	7	11,9
6	Buah-buahan	3	5,1
7	Makanan kecil/ jajan pasar/gorengan	9	15,3
8	Lauk pauk	5	8,5
9	Lainnya	6	10,2
	Total	59	100

Sumber: Data primer (diolah)

Gambar 2 menunjukkan bahwa untuk dari 59 pedagang ritel pasar tradisional yang lama usahanya kurang dari 1 tahun sebanyak 2 pedagang dengan persentase sebesar 3,4 %. Lama usaha antara 1 – 10 tahun sebanyak 18 pedagang dengan persentase sebesar 30,5 %, untuk 11 – 20 tahun sebanyak 17 pedagang dipersentasekan sebesar 28,8 %, antara 21 – 30 tahun sebanyak 15 pedagang persentase sebesar 25,4 %, sedangkan antara 31 – 40 tahun sebanyak 6 pedagang dengan persentase sebesar 10,2 %. Pedagang ritel pasar tradisional paling lama usahanya yaitu lebih dari 40 tahun sebanyak 1 pedagang dengan persentase sebesar 1,7 %.



Sumber: Data primer (diolah)

Gambar 2
Lama Usaha Reponden

4.2 Dampak Keberadaan Supermarket

4.2.1 Analisis Deskriptif

Selanjutnya Tabel 2 menunjukkan bahwa dampak keberadaan supermarket terhadap omset penjualan rata-rata per hari pedagang ritel pasar tradisional yang tetap/tidak berubah adalah sebanyak 22 dari 59 pedagang dengan persentase 37,3 %, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 37 pedagang dengan persentase sebesar 62,7 %. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan supermarket yang tidak jauh lokasinya dari pasar tradisional berdampak pada penurunan omset penjualan rata-rata per hari pedagang ritel pasar tradisional.

Tabel 2
Dampak Keberadaan Supermarket Terhadap Omset Penjualan Rata-Rata Per Hari Pedagang Ritel Pasar Tradisional

Dampak	Frekuensi	%
Tetap/Tidak berubah	22	37,3
Turun	37	62,7
Total	59	100

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dinyatakan bahwa sebelum keberadaan supermarket omset penjualan rata-rata per hari pedagang ritel pasar tradisional mencapai di atas Rp 10.000,00. Namun sesudah ada supermarket omset penjualan rata-rata per hari menurun hingga kurang dari Rp10.000,00. Hal ini dapat dijumpai 2 dari 59 pedagang, dengan persentase sebesar 3,4 %. Sebelum adanya supermarket pedagang ritel yang mendapatkan omset besar yaitu lebih dari Rp 1.000.000,00 sebanyak 4 dari 59 pedagang ritel pasar tradisional dengan tingkat persentase sebesar 6,8 %, sedangkan sesudah keradaan supermarket menurun menjadi 3 pedagang dengan persentase 5,1 %. Untuk omset antara Rp 50.001,00 – Rp 100.000,00 sebelum keberadaan supermarket sebanyak 7 pedagang (11,9%), sedangkan sesudah keberadaan supermarket meningkat menjadi 8 pedagang (13,6 %). Akan tetapi, omset antara Rp 100.001,00 – Rp 500.000,00 sebelum sebanyak 21 pedagang (35,6 %) dan sesudah menurun menjadi 19 pedagang (32,2 %).

Tabel 3
Dampak Sebelum maupun Sesudah Keberadaan Supermarket Terhadap Omset Penjualan Rata-Rata Per Hari Pedagang Ritel Pasar Tradisional

Omset Penjualan rata-rata per hari (Rp)	Sebelum		Sesudah	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
< 10.000			2	3,4
10.000 – 50.000	21	35,6	21	35,6
50.001 – 100.000	7	11,9	8	13,6
100.001 – 500.000	21	35,6	19	32,2
500.001 – 1.000.000	6	10,2	6	10,2
> 1.000.000	4	6,8	3	5,1
Total	59	100	59	100

Sumber: Data primer (diolah)

4.2.2 Analisis Statistik

Pada Output Paired Samples Statistics ditunjukkan ringkasan statistik dari kedua sampel, yaitu omset penjualan rata-rata per hari sebelum dan sesudah keberadaan supermarket terhadap pedagang ritel pasar tradisional. Berdasarkan hasil korelasi antara kedua variabel menghasilkan angka 0,949 dengan nilai probabilitas jauh di bawah 0,05 (Tabel 4). Hal ini menyatakan bahwa korelasi sebelum dan sesudah keberadaan supermarket terhadap pedagang ritel pasar tradisional adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata.

Tabel 4
Hasil Korelasi antara Kedua Variabel

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Sesudah	59	.949	,000

Sumber: Data primer (diolah)

Hipotesis untuk kasus ini adalah :

H_0 : Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi omset penjualan rata-rata per hari sebelum dan sesudah keberadaan supermarket terhadap pedagang ritel pasar tradisional adalah sama/tidak berbeda secara nyata).

H_a : Kedua rata-rata populasi adalah tidak identik (rata-rata populasi omset penjualan rata-rata per hari sebelum dan sesudah keberadaan supermarket terhadap pedagang ritel pasar tradisional adalah tidak sama/berbeda secara nyata).

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut: (1) jika probabilitas > 0,05, maka H_0 diterima, dan (2) jika probabilitas < 0,05, maka H_0 ditolak. Pada prinsipnya pengambilan keputusan berdasar t- hitung dan t-tabel akan selalu menghasilkan kesimpulan yang sama dengan berdasar angka probabilitas. Namun untuk kemudahan dan kepraktisan, penggunaan angka probabilitas lebih sering dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan inferensi (Santoso, 1999).

Tabel 5
Hasil Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig.(2-tailed)
		Mean	Std.Deviation	95% Confidence Interval of the Std, Erro Difference					
Pair 1	Sebelum - Sesudah			,15254	,40741	,05304	,04637	,25871	2,876

Sumber: Data primer (diolah)

Dalam hasil pengujian tersebut nilai sig.(2-tailed) mencerminkan nilai probabilitas – t. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas – t adalah 0,006. Karena nilai probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak, atau pendapatan rata-rata sebelum dan sesudah keberadaan supermarket relatif berbeda. Dengan kata lain, keberadaan supermaket berdampak pada omset penjualan rata-rata per hari yang diperoleh pedagang ritel di pasar tradisional secara nyata. Dengan tingkat perbedaan sebesar 0,15254, dilihat dari nilai mean (Tabel 5).

4.3. Pembahasan

Dari hasil survei dan pengujian statistik terbukti bahwa keberadaan supermarket “X” di Jl. Sultan Agung, Yogyakarta berdampak terhadap penurunan rata-rata omset penjualan pedagang ritel di pasar tradisional yang berjarak sekitar 500 meter dari supermarket tersebut. Mengacu pada hasil survei maka hasil riset ini sejalan dengan

kajian yang dilakukan oleh Suryadharma, et al., (2007) serta Departemen Perdagangan dan PT. Indef Ramadani (2007). Di sisi lain hasil pengujian statistik dari kedua riset hasilnya berbeda dengan studi ini. Jika pada riset ini hasil pengujian statistiknya signifikan, maka hasil pengujian kedua riset tersebut tidak signifikan / tidak nyata.

Kemudian hasil riset ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan PT. Solusi Dinamika Manajemen pada tahun 2006. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dampak negatif keberadaan pasar modern (supermarket dan hypermarket) terhadap pasar tradisional adalah dalam hal omset penjualan. Variabel omset penjualan pasar tradisional menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah hadirnya pasar modern. Dalam hal ini sesudah kehadiran pasar modern ternyata omset penjualan lebih rendah dibandingkan sebelum kehadiran pasar modern.

Selanjutnya yang perlu dicermati adalah apakah keberadaan supermarket tersebut merupakan satu-satunya faktor penyebab penurunan rata-rata omset tersebut? Hasil wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak terkait (Pedagang ritel pasar tradisional, Pembeli / konsumen supermarket, Pengelola Pasar / Dinas Pasar Pemkot Yogyakarta, pemasok, dan pengelola / manajemen supermarket) menunjukkan bahwa keberadaan supermarket bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab penurunan rata-rata omset penjualan. Ada sejumlah faktor penyebab yang lain, yaitu: (1) pedagang lain / pedagang kaki lima yang berjualan di jalan depan pasar, (2) daya beli konsumen yang menurun, semakin banyak pedagang ritel kelontong di wilayah perkampungan dekat pasar, (3) semakin meningkatnya pedagang ritel keliling, dan (4) kondisi lingkungan pasar yang semakin tidak nyaman. Hasil wawancara ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan (2008), Suryadharma, et al., (2007) serta Departemen Perdagangan dan PT. Indef Ramadani (2007).

Secara nasional penurunan rata-rata omset penjualan pedagang ritel di pasar tradisional karena keberadaan pasar modern merupakan fenomena yang biasa terjadi (Departemen Perdagangan, 2008; Suryadharma, et al., 2007; Departemen Perdagangan dan PT. Indef Ramadani, 2007). Penurunan tersebut ini dapat diduga sebagai salah satu konsekuensi langsung dari pesatnya pertumbuhan retail modern yang pangsa pasar nasionalnya mengalami suatu peningkatan yang pesat selama periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tradisional cenderung semakin tergeser oleh ritel modern di pasar nasional, walaupun kontribusinya terhadap pertumbuhan pasar nasional masih paling besar. Jika struktur pertumbuhan seperti ini terus berlangsung, tidak menutup kemungkinan apabila pada suatu saat ritel modern akan mendominasi pertumbuhan omset maupun jumlah unit pasar nasional. Pemerintah memang tidak bisa menghentikan perkembangan hypermarket asing seperti yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Selain masyarakat masih membutuhkan, Indonesia juga terikat perjanjian dengan IMF yang memperbolehkan retail asing masuk (Tambunan, et al., 2004).

Menurut Tim Peneliti Akademika (2003), penurunan pangsa belanja konsumen ke pasar tradisional yang tidak disebabkan oleh kurangnya jumlah konsumen melainkan oleh berkurangnya nilai belanja ke pasar tradisional. Hal ini dipicu oleh strategi pemasaran pasar modern, terutama melalui program diskon dan sejenisnya (Akademika, 2003). Penurunan ini juga dapat disebabkan karena adanya perubahan selera konsumen. Whardono (2001), berpendapat bahwa pergeseran selera konsumen dapat terjadi di masyarakat daerah sejalan dengan otonomi daerah (Tambunan et al., 2004). Selera konsumen di daerah yang biasanya hanya puas dengan harga dan kualitas pasar tradisional akan berubah ke pasar modern semata-mata untuk kelihatan trendi dan sedikit beraksi hanya sekedar gengsi (berkesan "elite"). Pergeseran selera konsumen di daerah juga didorong oleh perpindahan penduduk atau pemekaran kota-kota maupun daerah pemerintahan yang berarti juga pemerintah harus menyediakan sarana belanja umum bagi masyarakatnya. Shopping center, hypermarket, dan supermarket tentunya menjadi alternatif untuk memuaskan bergesernya selera belanja dari masyarakat daerah (Departemen Perdagangan, 2008). Selain itu, pergeseran konsumen daerah di pasar tradisional ke pasar modern juga disebabkan oleh demonstrative effect yang besar dan didorong oleh media masa, baik cetak maupun audio visual. Sarana transportasi yang semakin baik menghubungkan kota dengan desa juga sangat berperan, yang membuat mobilisasi penduduk dari desa ke kota semakin tinggi (Tambunan, et al., 2004).

5. PENUTUP

Keberadaan supermarket "X" berdampak negatif terhadap pedagang ritel di pasar tradisional "Y" di Jl. Sultan Agung, Yogyakarta. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari penurunan rata-rata omset penjualan sebagian besar pedagang ritel yang menjadi responden. Hasil survei menunjukkan bahwa dampak keberadaan supermarket terhadap omset penjualan rata-rata per hari pedagang ritel pasar tradisional yang tetap / tidak berubah adalah sebanyak 22 dari 59 pedagang dengan persentase 37,3 %, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 37 pedagang dengan persentase sebesar 62,7 %. Hasil pengujian secara statistik juga menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan / nyata dalam hal rata-rata omset penjualan pedagang ritel di pasar tradisional "Y" sebelum dan sesudah keberadaan supermarket "X".

Penurunan rata-rata omset penjualan tersebut bukan hanya disebabkan semata-mata oleh keberadaan supermarket semata, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain. Faktor atau penyebab lain termaksud adalah pedagang lain / pedagang kaki lima yang berjualan di jalan depan pasar, daya beli konsumen yang menurun, semakin banyak pedagang ritel kelontong di wilayah perkampungan dekat pasar, semakin meningkatnya pedagang ritel keliling, dan kondisi lingkungan pasar yang semakin tidak nyaman. Dengan demikian keberadaan supermarket hanya menjadi salah satu faktor penyebab, namun ada faktor penyebab yang lain.

Saran yang dapat direkomendasikan berkaitan dengan riset ini adalah: (1) Pemerintah daerah / kota harus menegakkan implementasi dari regulasi yang berkaitan dengan pengaturan jarak lokasi antara pasar tradisional dengan pasar modern (mini market, supermarket, dan hypermarket). (2) Pengelola pasar tradisional harus menata pasar dengan baik, yang mencakup aspek ketertiban, kebersihan, dan keamanan, baik bagi pedagang ritel maupun bagi konsumen / pembeli. (3) Pedagang ritel harus meningkatkan manajemen usaha ritelnya, terutama dalam pengelolaan keuangan, penataan dan kebersihan produk, pelayanan kepada pembeli / pelanggan. (4) Riset atau kajian ini dapat dikembangkan dengan mengambil kasus yang lebih banyak serta menggunakan tambahan metode dan alat analisis yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademika, (2003), Analisis Cost-Benefit Kehadiran Pengecer Besar, Partnership for Economics Growth (PEG) & United State Agency for International Development (USAID), Bekasi, Jawa Barat.
- Departemen Perdagangan RI, (2008), "Pasar Tradisional Yang Modern: Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional", Laporan, diakses dari <http://www.depdag.go.id> pada tanggal 1 Juni 2008.
- Departemen Perdagangan RI dan PT. Indef Ramadani, (2007), "Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket Terhadap Peritel/Pedagang Tradisional", Ringkasan Eksekutif, diakses dari <http://www.indef.or.id> pada tanggal 1 Juni 2008.
- Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT. Solusi Dinamika Manajemen, (2005), "Penelitian Dampak Keberadaan Pasar Modern (Supermarket dan Hypermarket) terhadap Usaha Ritel Koperasi/Wasberba dan Pasar Tradisional", Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Nomor 1 Tahun I 2006, hal. 85 – 99.
- Hageman, H., (2007), "Selamatkan Pasar Tradisional!", diakses dari <http://handy.hageman.com/index.php/2007/11/03/selamatkan-pasar-tradisional/>
- Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., and Tatham, R.L., (2006), Multivariate Data Analysis, Sixth Edition, Paerson Education International, Singapore.
- Hanafi, Z.E., (2006), "Pasar Tradisional vs Pasar Modern", Pikiran Rakyat, Selasa 11 Juli 2006 diakses dari <http://>

- www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/11/11wacana.htm pada tanggal 30 November 2007.
- Jusuf, H.E., (2007), "Kapitalisme versus Pasar Rakyat", *Pikiran Rakyat*, 9 Oktober 2007, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/102007/09/0902.htm> pada tanggal 30 November 2007.
- Kountur, R., (2003), *Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Cetalan 1, Penerbit PPM, Jakarta.
- Kuncoro, M., (2003), *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?*, Cetakan 1, Erlangga, Jakarta.
- Leedy, P.D. and Ormrod, J.E., (2005), *Practical Research: Planning and Design*, 8th Edition, Pearson Education Pte., Singapore.
- Lind, D.A., Marchal, W.G., and Wathen, S.A., (2003), *Basic Statistics for Business & Economics*, 4th Edition, International Edition, McGraw-Hill/Irwin Companies, Singapore.
- Napitupulu, A., (2007), "Masa Depan Pasar Tradisional", Makalah, diakses dari <http://www.jakarta.go.id/pasar/pasar3a.htm> pada tanggal 29 November 2007.
- Natawidjaya, R.N., (2006), "Modern Market Grpwth and the Changing Map of the Retail Food Sector in Indonesia", Paper, Pacific Food System Outlook 9th Annual Forecasters diakses dari <http://www.pecc.org/food/papers/2005-2006/indonesia/indonesia-paper.pdf> diakses 29 November 2007.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan RI dan PT. Indef Ramadani, (2007), "Kajian Dampak Ekonomi Keberadaan Hypermarket Terhadap Peritel/Pedagang Tradisional", Ringkasan Eksekutif, diakses dari <http://www.indef.or.id> pada tanggal 1 Juni 2008.
- Poesoro, A., (2007), "Pasar Tradisional di Era Persaingan Global", *Smeru Newsletter*, No. 22 April – Juni 2007, hal. 3 – 10, diakses dari <http://www.smeru.or.id> pada tanggal 30 November 2007.
- Santoso, S., (1999), *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional Versi 7.5*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun, M., dan Effendi, S., (Editor), (1989), *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, Cetakan 1, LP3ES, Jakarta.
- Suryadharma, D., Poesoro, A., Sri Budiayati, Akhmadi, dan Rosfadhila, M., (2007), "Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia", Laporan Penelitian Smeru, November, diakses dari <http://www.smeru.or.id> pada tanggal 30 November 2007.
- Tambunan, T.T.H, dan Nirmalawati T.D., Silondae, A.A., (2004), *Kajian Persaingan Dalam Industri Retail*, KPPU, diakses dari <http://www.kadin-indonesia.or.id> pada tanggal 12 Desember 2007.
- Tresna, Y.R., (2007), "Terpuruknya Pasar rakyat: Wujud ketidakadilan Pemerintah Kota dan Dampak Global Ekonomi Kapitalis", Makalah, diakses dari <http://www.syabab.com> pada tanggal 30 November 2007.

ANALISIS SURPLUS DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2007

Rudy Badrudin
E-mail: rudy@stieykpn.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Abstract

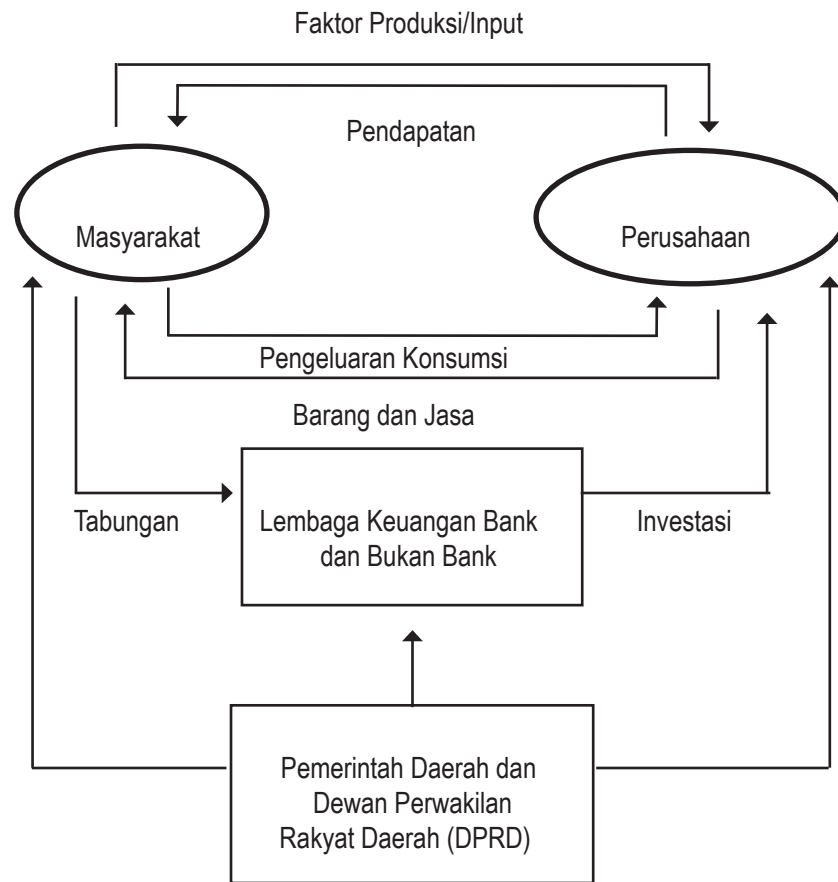
The differences perception of regency and municipal government in understanding and applying some important definitions, such as balanced, surplus, and deficit local budget, in new regulations related to local revenue and expenditure have lead to serious problems. It has taken effect to the impediment of balanced fund from centre government to some regency and municipals that are considered not complying with the intended regulations. This study is to test the perception of regency and municipal government in understanding two recent regulations, there are Government Regulation 58/2005 and Minister of Finance Regulation 72/2006, which are proposed to facilitate regency and municipal government applying good governance principles in managing their local budget. The study uses T-test paired two samples for means to test the hypotheses. The findings are: (1) a difference perception among regency and municipal governments of local budget surplus definition as stated in those new regulations; (2) no difference discernment of balanced local budget; (3) a difference judgment of deficit less than 5% definition; and (4) a difference opinion of deficit more than or equal to 5% definition. The results show captivatively some findings that are needed to follow-up for better good governance practices.

Keywords: surplus, deficit, decentralization, local budget

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah –Jawa dan luar Jawa serta Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antarwilayah (Waluyo, 2007:1). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk menangani pembangunan di daerah (Badrudin, 1999:2).

Pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah sebagai komponen sumberdaya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan circular flow diagram tentang Pelaksana Otonomi Daerah seperti yang nampak pada Gambar 1. Diagram tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di daerah saling berinteraksi, dengan asumsi ada lima pelaku yaitu masyarakat, perusahaan, lembaga keuangan bank dan bukan bank, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.



Gambar 1
Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sumber: Syahrudin dan Taifur (2002:146).

Hakekat pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan pada inisiatif yang muncul dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Waluyo, 2007:3).

Menurut Abdullah dan Asmara (2007:19), penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 pada tahun anggaran 2003 dan 2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari stakeholders sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.

Subiyanto (2004:1) menjelaskan bahwa salah satu kelemahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia ini adalah sulitnya memperoleh informasi keuangan pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelemahan ini terjadi karena semua laporan keuangan tidak disajikan berdasarkan pada basis standar akuntansi pemerintah yang memadai atau sebaliknya miskin regulasi yang berkaitan dengan standar akuntansi pada unit-unit pemerintahan.

Bupati/Walikota sebagai pimpinan daerah dalam mengelola keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD), harus memenuhi ketentuan tentang basis standar akuntansi pemerintah dan mematuhi berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Tugas ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2003, PP Nomor 58/2005, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/2006, dan PMK Nomor 72/2006 yang mengatur tentang Surplus Defisit APBD. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan tersebut merupakan salah satu indikator pelaksanaan kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan pemerintah daerah terhadap berbagai peraturan perundangan khususnya PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 akan dipantau oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan. Hasil pantauan akan dianalisis sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Syahrudin dan Taifur, 2002:10).

Penelitian ini menganalisis Surplus Defisit APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007 dengan menggunakan dua pendekatan dalam penentuan surplus defisit. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan dasar sesuai dengan PP Nomor 58/2005 yaitu surplus defisit adalah selisih Pendapatan dan Belanja daerah dan pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK Nomor 72/2006 yaitu surplus defisit adalah selisih pendapatan dan belanja daerah setelah ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pembiayaan (SiLPA) dan pencairan Dana Cadangan (Waluyo, 2007:9). SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Kedua pendekatan tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Analisis yang digunakan dalam membuktikan hipotesis penelitian adalah analisis deskriptif dan inferens.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah ada perbedaan pengertian surplus APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; (2) Apakah ada perbedaan pengertian berimbang APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; (3) Apakah ada perbedaan pengertian defisit kurang daripada 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; dan (4) Apakah ada perbedaan pengertian defisit lebih besar atau sama dengan 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) perbedaan pengertian surplus APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; (2) perbedaan pengertian berimbang APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; (3) perbedaan pengertian defisit kurang daripada 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; dan (4) perbedaan pengertian defisit lebih besar atau sama dengan 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

2.1 Kajian Literatur

Setiap usaha pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah beserta masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di daerah tersebut harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Boediono, 2002:10).

Menurut UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal itu juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasal 18 UUD 1945 menjadi landasan yang kuat bagi TAP MPR Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Sidik, 2002:9). Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Propinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Propinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten atau daerah kota.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan — perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi — kecuali di bidang luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya yang akan ditetapkan dengan Pemerintahan Pemerintah. Kewenangan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Kewenangan otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tersebut maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber keuangan daerah sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/ kota sebagai prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Menurut UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pembiayaan daerah tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak mengabaikan distribusi pendapatan antarwilayah yang timpang seperti yang terjadi pada masa lalu.

Menurut Abdullah dan Asmara (2007:21), proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di pemerintahan kabupaten/kota, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK SKPD). RK SKPD kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran. Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui bargaining sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

Subiyanto (2005:2) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang tidak disajikan berdasarkan pada basis standar akuntansi pemerintah yang memadai atau miskin regulasi yang berkaitan dengan standar akuntansi pada unit-unit pemerintahan akan mengakibatkan suatu unit pemerintahan sulit menyusun laporan keuangan kepada publik karena penafsirannya sangat bervariasi. Kelemahan-kelemahan dalam standardisasi laporan keuangan

pemerintah inilah yang mengakibatkan berbagai penafsiran dari sudut pandang yang berbeda-beda. Berdasarkan aspek politik, hukum, sistem anggaran, dan lain-lain mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Bahkan laporan keuangan yang mengandung tindak kecurangan justru tidak teridentifikasi, tetapi justru laporan keuangan yang bersih dari kecurangan ditafsirkan sebagai adanya tindak kecurangan.

Dalam menjalankan pemerintahan sangat disadari adanya keterbatasan dan hambatan yang dibentuk dari lingkungan pemerintahan daerah tersebut berada. Keterbatasan sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia yang berbeda-beda akan sangat mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya memakmurkan rakyatnya. Begitu juga keterbatasan sumber-sumber keuangan daerah maupun penguasaan teknologi oleh manusia pendukungnya juga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu pemerintahan di daerah. Kemampuan seluruh sumberdaya manusia beserta seluruh sistem politik lokal yang melingkupinya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan melaksanakan amanat negara tersebut. Ini berarti, kecakapan di dalam merumuskan strategi pemerintahan di daerah akan sangat menentukan tercapainya usaha-usaha mensejahterakan rakyat. Rekomendasi Bank Dunia kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota adalah sebaiknya pemerintah propinsi dan kabupaten/kota mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki manajemen penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam jangka pendek dan menengah dalam hal penerimaan dan pembiayaan, pengeluaran pemerintah, perencanaan, dan pemecahan masalah di hirarki pemerintahan yang lebih tinggi (Bank Dunia, 2005:4-5).

Menurut Boediono (2002:2) permasalahan yang sering terjadi dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, penyusunan anggaran, dan manajemen keuangan dengan merancang data base yang sederhana di tingkat kabupaten sebagai acuan bagi proses perencanaan. Data base ini mencakup data sosio-ekonomi dan indikator-indikator lain berdasarkan data yang ada dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya. Di samping itu, juga dengan membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara propinsi dan kabupaten/kota sejak tahap perencanaan termasuk melakukan klarifikasi terhadap aspek legal pemekaran wilayah. Sikap yang tidak jelas dari pemerintah pusat tentang pemekaran wilayah akan mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam beberapa hal seperti jumlah dana yang akan diterima oleh pemerintah daerah nantinya.

Menurut Bank Dunia (2005:15), proses perencanaan di Indonesia adalah sebuah proses yang memakan waktu lama dan cenderung tidak efektif. Ada dua jalur perencanaan, jalur topdown, yang didesain untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di tingkat daerah dengan pusat; dan jalur bottom-up, dimana perencanaan disusun dari tingkat akar rumput ke atas. Namun keterkaitan antara kedua jalur itu sangat lemah dan berbagai masukan dari bawah seringkali diabaikan dalam dokumen perencanaan akhir. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan fungsi badan-badan perencanaan –Bappenas di tingkat pusat dan Bappeda di daerah.

Mekanisme perencanaan di daerah mencerminkan sistem perencanaan di tingkat nasional, termasuk perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan rencana tahunan yang merinci butir-butir rencana jangka menengah sekaligus prospek pembiayaannya. Ketiga dokumen itu harus disosialisasikan kepada publik dan harus mengakomodasi hasil dari proses bottom-up. Berbagai studi menunjukkan bagaimana mekanisme perencanaan di kabupaten/kota menjadi rumit karena kabupaten/kota yang baru dibentuk belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang yang dapat menjadi acuan bagi proses perencanaan dan penyusunan anggaran tahunan. Secara umum berbagai masalah timbul akibat tidak adanya data base atau data sektoral yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses perencanaan (Bank Dunia, 2005:16).

Ketentuan baru untuk memperoleh persetujuan pusat terhadap Rancangan APBD akan mengakibatkan tertundanya seluruh proses. Siklus penyusunan anggaran dimulai pada bulan Juni dengan rapat antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang kebijakan umum terhadap Rancangan APBD tahun yang dimaksud. Antara Juni dan November, rincian anggaran disusun, dibahas, dan disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Namun, UU No. 32/2004 menetapkan bahwa sebelum bisa diputuskan sebagai Peraturan Daerah (Perda), APBD harus dievaluasi terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Gubernur suatu propinsi dengan puluhan

kabupaten/kota berarti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus menilai dan menyetujui APBD dari puluhan kabupaten/kota dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Hampir pasti hal ini akan mengabaikan tertahannya seluruh proses di tingkat propinsi, yang pada akhirnya membuat tertundanya implementasi anggaran daerah, meski menurut aturan sebelum disahkannya RAPBD menjadi APBD, pemerintah daerah dimungkinkan untuk mulai membelanjakan anggaran sebatas nilai anggaran tahun sebelumnya.

Penelitian Bank Dunia (2005:17) menunjukkan bahwa format APBD baru belum sepenuhnya dijalankan di semua kabupaten/kota hingga 2004. Selain memperkenalkan konsep anggaran berbasis kinerja, Keputusan Mendagri No. 29/2002 juga mengakibatkan perubahan format APBD yang menggunakan konsep anggaran terpadu. Perubahan utama adalah pos belanja daerah tidak lagi dibedakan antara belanja rutin dan pembangunan, melainkan antara belanja aparatur dan belanja publik. Selain itu pinjaman dan arus pembiayaan lain serta cadangan pemerintah kini dibuat terpisah. Jika penanganan atas sisi pendapatan tidak terlalu banyak berubah, ada sejumlah perubahan pada sisi pengeluaran yang mempengaruhi APBD secara mendasar. Penggolongan antara belanja aparatur pemerintah dan layanan publik didasarkan pada siapa yang menikmati. Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat umum akan dicatat sebagai belanja publik. Definisi yang tidak jelas ini mendorong Pemda untuk membuat interpretasi sendiri atas jenis pengeluaran sehingga perbandingan belanja daerah antar kabupaten/kota menjadi sulit.

Sebelum adanya Keputusan Mendagri 29/2002, setiap unit kerja menyusun dokumen anggaran masing-masing. Permohonan anggaran diajukan secara terpisah dalam bentuk Daftar Isian Kegiatan (DIK) untuk anggaran rutin dan Daftar Isian Proyek (DIP) untuk anggaran pembangunan. Dalam struktur baru, seluruh unit kerja kini hanya menggunakan satu dokumen anggaran (Dokumen Anggaran Satuan Kerja/DASK). Secara umum, DIK mencakup seluruh pengeluaran rutin, setara dengan kategori administrasi umum dalam DASK yang mencakup belanja pegawai dan publik. DIP mencakup seluruh pengeluaran proyek, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Dalam format anggaran baru, pengeluaran untuk menambah modal dicatat di bawah belanja modal, sementara belanja operasional proyek (kini disebut kegiatan) dicatat di bawah belanja operasi dan pemeliharaan. Hal ini membuat perbandingan belanja pembangunan dengan pos-pos terkait dalam format yang baru menjadi bermasalah. Format yang baru bertujuan untuk bergeser dari pembedaan rutin/pembangunan ke pendekatan yang lebih berorientasi pada program (Suhab, 2004:115).

Menurut Bank Dunia (2005:18), rekam jejak kabupaten/kota dalam hal laporan anggaran tidaklah memuaskan. Secara hukum, pemerintah daerah wajib melaporkan segala informasi mengenai anggaran pada Departemen Keuangan. Kealpaan dalam menjalankan kewajiban ini bisa berakibat ditundanya pencairan dana alokasi dari pusat. Sejumlah pemerintah daerah propinsi termasuk kabupaten/kota sering terlambat bahkan sama sekali tidak menyerahkan laporannya, seperti pada tahun 2002 hanya delapan dari empatbelas kabupaten/kota melaporkan APBD-nya pada pemerintah pusat. Meski demikian, Departemen Keuangan hanya mengeluarkan surat peringatan tanpa menerapkan sanksi apapun. Tidak jelas apakah pemerintah propinsi akan lebih berhasil dalam melakukan review APBD kabupaten/kota. Dapat terjadi pemerintah kabupaten/kota akan lebih mematuhi ketentuan pelaporan pada propinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan demikian dapat dicapai.

Menurut Dwiyanto (2003) kepala daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada DPRD yang mencakup empat hal, yaitu realisasi APBD, penjelasan detail mengenai realisasi APBD termasuk penilaian kinerja, laporan arus kas, dan neraca anggaran. Studi kasus pada beberapa kota menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban walikota pada tahun tertentu sudah mencakup seluruh hal yang ditentukan itu. Namun terlihat juga bahwa laporan pertanggungjawaban itu tidak merujuk pada dokumen perencanaan utama yang seharusnya menjadi acuan penilaian kinerja pemerintah. Laporan itu juga disampaikan sangat terlambat, pada bulan Juni dari seharusnya Maret. Keterlambatan ini mengakibatkan kesulitan dalam memasukkan temuan-temuan penting pada siklus perencanaan dan anggaran tahun berikutnya. Sebagaimana terjadi di banyak daerah lain, audit regional berjalan dengan lemah.

Setiap propinsi dan kabupaten/kota memiliki unit audit internal yaitu Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), yang di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Depdagri. Berdasarkan Kepres No.74/2001,

tugas Bawasda adalah menilai kinerja pemerintahan daerah. Namun, tidak ada indikasi bahwa temuan Bawasda memiliki dampak atau konsekuensi serius. Pemberlakuan Undang-undang Audit (UU No. 15/2004) memberi klarifikasi lebih lanjut atas peran auditor eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan inspeksi atas keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Audit BPK atas pelaksanaan APBD sekarang menjadi suatu kewajiban, dan harus selesai sebelum kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Masih perlu dilihat apakah BPK akan mampu mengaudit anggaran 434 kabupaten/kota dan 33 propinsi dalam enam bulan terakhir tahun fiskal. Tahun 2002, BPK hanya berhasil mengaudit kurang dari sepertiga APBD kabupaten/kota yang ada. Terlihat bahwa kapasitas yang ada saat ini sangat terbatas dan harus ditingkatkan secara signifikan untuk memungkinkan BPK melakukan tugasnya di tahun-tahun mendatang secara tepat waktu.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Negara melakukan beberapa penelitian tentang Analisis Surplus Defisit APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Pendekatan Dasar dan Pendekatan Lanjutan secara deskriptif (<http://www.depkeu.go.id>). Analisis Surplus Defisit APBD menggunakan dua pendekatan dalam penentuan surplus defisit yaitu pendekatan dasar sesuai dengan PP Nomor 58/2005 yaitu surplus defisit adalah selisih Pendapatan dan Belanja daerah dan pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK Nomor 72/2006 yaitu surplus defisit adalah selisih pendapatan dan belanja daerah setelah ditambah dengan Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan (SiLPA) dan pencairan Dana Cadangan. Hasil analisis akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional pada tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan analisis difokuskan pada ketaatan dan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta komposisi penyebaran dalam skala defisit yang diperbolehkan dan surplus pada masing-masing pemerintah daerah.

Kedua pendekatan tersebut akan disajikan dalam analisis ini sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Pada dasarnya, kriteria analisis yang digunakan adalah batas maksimal surplus defisit sesuai dengan PMK Nomor 72/2006 pasal 4 yaitu sebesar 5% dari total pendapatan sehingga pemerintah daerah akan memenuhi kriteria apabila APBDnya surplus atau apabila defisit tidak melebihi 5% dari total pendapatan. Kategori melanggar peraturan apabila pemerintah daerah mengalami defisit melebihi 5% dari total pendapatan.

Menurut PP Nomor 58/2005 pada Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 ayat (28) surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sedang ayat (29) defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Menurut PMK Nomor 72/2006 pada Bab III (Batas Maksimal Defisit APBD Masing-Masing Daerah) disebutkan bahwa: Pasal 4 ayat (1) Batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007; ayat (2) Batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Defisit yang dibiayai dari SiLPA dan Defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan; ayat (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2006; dan ayat (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dana cadangan yang akan dicairkan pada Tahun Anggaran 2007. Pasal 5 batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan untuk menetapkan defisit APBD untuk Tahun Anggaran 2007. Pasal 6 ayat (1) Defisit APBD suatu Daerah dalam kondisi tertentu dapat melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sepanjang jumlah kumulatif defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak terlampaui dan ayat (2) Penetapan Defisit APBD suatu Daerah yang melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

2.2 Pengembangan Hipotesa

Hasil penelitian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Negara tentang Analisis Surplus Defisit APBD untuk APBD 33 Propinsi disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1
Propinsi yang Mengalami Surplus/Defisit APBD Tahun 2007
Berdasarkan PP 58/2005

Nomor	Kondisi APBD	Jumlah Propinsi	
1	Surplus	5	15.15%
2	Berimbang	1	3.03%
3	Defisit < 5%	7	21.21%
4	Defisit ≥ 5%	20	60.61%

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat sebagian besar (81,82%) propinsi di Indonesia mengalami defisit APBD. Sebanyak 5 (15,15%) propinsi mengalami surplus APBD yaitu Propinsi Jawa Tengah (6,63%), Propinsi Sulawesi Tenggara (1,68%), Propinsi Kalimantan Selatan (0,80%), Propinsi Sulawesi Tengah (0,45%), dan Propinsi Gorontalo (0,27%). Sedangkan 1 (3,03%) propinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Barat menerapkan kebijakan anggaran berimbang. Sebanyak 20 (60,61%) propinsi mengalami defisit lebih besar dari 5%, 7 propinsi di antaranya mengalami defisit lebih dari 20% yaitu Propinsi NTT (21%), Propinsi Lampung (23,25%), Propinsi NAD (27,86%), Propinsi Kaltim (32,76%), Propinsi Jambi (35,11%), Propinsi Kep. Riau (37,78%), dan Propinsi Bangka (45,9%)

Tabel 2
Propinsi yang Mengalami Surplus/Defisit APBD Tahun 2007
Berdasarkan PMK 72/2006

Nomor	Kondisi APBD	Jumlah Propinsi	
1	Surplus	28	84.85%
2	Berimbang	2	6.06%
3	Defisit < 5%	3	9.09%
4	Defisit ≥ 5%	0	0.00%

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>.

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur mempunyai defisit terbesar yaitu 5% walaupun masih dalam batas yang diperbolehkan. Sedangkan untuk daerah yang mengalami surplus tertinggi yaitu Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yaitu 32,64%. Tiga daerah yang mengalami surplus di atas 6% yaitu Propinsi NAD, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Riau. Mayoritas propinsi di Indonesia mengalami surplus yang besarnya berkisar antara 1%–2,5%. Namun demikian, masih terdapat tiga daerah propinsi yang mengalami defisit yaitu Propinsi Banten, Propinsi Bengkulu, dan Propinsi Kalimantan Timur dimana besaran defisitnya masih dalam batas yang diperbolehkan. Dua propinsi menerapkan kebijakan anggaran berimbang, yaitu Propinsi Maluku Utara dan Propinsi Kalimantan Barat.

Analisis surplus defisit APBD juga diteliti oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Negara. Penelitian tersebut menganalisis surplus defisit APBD Kabupaten/Kota di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua dengan menggunakan pendekatan dasar dan lanjutan, serta analisis deskriptif (<http://www.depkeu.go.id>). Berdasarkan PP Nomor 58/2005 sebagian besar kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumatra dan Jawa (257 kabupaten/kota), mayoritas mengalami Defisit, defisit di atas 5% sebanyak 155 kabupaten/kota (60%) dan defisit di bawah 5% sejumlah 82 kabupaten/kota (32%). Berdasarkan PP Nomor 58/2005, sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menetapkan APBD-nya defisit yaitu 58 dari 79 kabupaten/kota

(73,4%). Daerah dengan APBD defisit dikelompokkan sebagai berikut: daerah yang APBD-nya defisit di bawah 5% sebanyak 27 kabupaten/kota dan yang APBD-nya defisit di atas 5% sebanyak 31 kabupaten/kota. Sementara itu, 15 kabupaten/kota (19%) menetapkan anggaran surplus dan 6 kabupaten/kota (7,6%) menetapkan anggaran berimbang.

Berdasarkan PMK Nomor 72/2006, mayoritas APBD kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa mengalami Surplus, yaitu sebanyak 226 dari 257 kabupaten/kota (88%). Sisanya terdiri dari APBD kabupaten/kota yang mengalami defisit di bawah 5% sebanyak 19 kabupaten/kota (7%), APBD kabupaten/kota berimbang sebanyak kabupaten/kota (3%), dan APBD kabupaten/kota yang defisitnya di atas 5% sebanyak 5 kabupaten/kota (2%). Lima kabupaten/kota yang APBD-nya defisit di atas 5% berdasarkan PMK Nomor 72/2006 dan dianggap melanggar batas defisit yang telah ditetapkan yaitu (a) APBD Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu) sebesar 75,40%; (b) APBD Kota Dumai (Riau) sebesar 14,15%; (c) APBD Kabupaten Sumenep (Jawa Timur) sebesar 12,10%; (d) APBD Kota Cilegon (Banten) sebesar 7,44%; dan (e) APBD Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur) sebesar 5,30%. APBD Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu) mengalami defisit sangat besar (75,40%) karena Kabupaten tersebut adalah kabupaten yang baru dibentuk hasil pemekaran sehingga tidak mempunyai SiLPA dan Dana Cadangan.

Berdasarkan PMK Nomor 72/2006, sebagian besar daerah kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua mengalami surplus anggaran yaitu 71 kabupaten/kota dari 79 kabupaten/kota (90%), 6 kabupaten/kota (7,6%) menerapkan kebijakan anggaran berimbang, sedangkan dua kabupaten/kota menetapkan anggaran defisit yaitu Kota Ambon (Propinsi Maluku) yang mengalami defisit sebesar 4,02% dan Kabupaten Biak Numfor (Propinsi Papua) yang menetapkan anggaran defisit sebesar 11,72%. Anggaran defisit kedua daerah tersebut ditutupi dengan penerimaan pinjaman daerah. Dengan demikian, dari wilayah ini hanya Kabupaten Biak Numfor yang defisitnya melebihi batas maksimal 5% dari pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam PMK ini.

Apabila dilihat surplus/defisit kabupaten/kota setiap propinsi maka kabupaten/kota di Propinsi Bali, Propinsi NTB, dan Propinsi Irian Jaya Barat semuanya mengalami surplus. Daerah di Propinsi Bali yang memiliki APBD surplus tertinggi adalah Kabupaten Badung yaitu 13,45% karena adanya SiLPA tahun 2006 dan pencairan dana cadangan yang cukup besar, di Propinsi NTB surplus terbesar adalah Kota Bima yaitu 7,86% karena adanya SiLPA tahun 2006 yang cukup besar dan pendapatan yang lebih besar dari belanja daerah. Daerah di Propinsi Irian Jaya Barat yang APBD-nya mengalami surplus terbesar adalah Kabupaten Teluk Bintuni yaitu 21,01% karena adanya kelebihan SiLPA tahun 2006 yang cukup besar sedangkan pendapatan dan belanja daerah berimbang.

Berdasarkan pendekatan dasar (PP Nomor 58/2005) sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menetapkan anggaran defisit yaitu 58 dari 79 kabupaten/kota (73,4%), 15 kabupaten/kota menetapkan anggaran surplus, dan 6 kabupaten/kota menetapkan anggaran berimbang. Sebagian besar defisit APBD ini ditutup dengan SiLPA dan pencairan dana cadangan sehingga defisitnya tidak melebihi batas maksimal. Berdasarkan pendekatan PMK No. 72/2006 sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua menetapkan anggaran surplus yaitu 71 dari 76 kabupaten/kota (90%), 6 kabupaten/kota menetapkan anggaran berimbang, 1 daerah defisitnya melebihi batas maksimal, dan 1 daerah defisitnya kurang dari batas maksimal. Hanya ada 2 kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang menggunakan pendekatan PMK No. 72/2006 yang menetapkan anggaran defisit yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Biak Numfor. Namun defisit ini dapat ditutupi dengan penerimaan pinjaman daerah.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini tidak hanya menganalisis surplus defisit APBD kabupaten/kota menggunakan dua pendekatan dengan analisis deskriptif tetapi juga dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis penelitian yang diajukan (statistik inferens). Berdasarkan materi dan metode penelitian, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ada perbedaan pengertian surplus APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006.

H2 : Ada perbedaan pengertian berimbang APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006.

H3 : Ada perbedaan pengertian defisit kurang daripada 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006.

H4 : Ada perbedaan pengertian defisit lebih besar atau sama dengan 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006.

3. METODA PENELITIAN

3.1 Sampel Data

Hasil penelitian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota wilayah Sumatra dan Jawa berdasarkan PP 58/2005 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3
Kabupaten/Kota per Propinsi Wilayah Sumatra dan Jawa
yang Mengalami Surplus/Defisit APBD Tahun 2007
Berdasarkan PP 58/2005

Nomor	Propinsi	Surplus	Berimbang	Defisit < 5%	Defisit ≥ 5%
1	NAD	4 21.05%	0 0.00%	3 3.66%	15 9.68%
2	Sumatra Utara	2 10.53%	0 0.00%	12 14.63%	12 7.74%
3	Sumatra Barat	0 0.00%	0 0.00%	6 7.32%	14 9.03%
4	Riau	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	12 7.74%
5	Jambi	0 0.00%	1 100.00%	1 1.22%	9 5.81%
6	Sumatra Selatan	2 10.53%	0 0.00%	4 4.88%	9 5.81%
7	Bengkulu	0 0.00%	0 0.00%	3 3.66%	7 4.52%
8	Lampung	0 0.00%	0 0.00%	2 2.44%	9 5.81%
9	Bangka Belitung	0 0.00%	0 0.00%	1 1.22%	7 4.52%
10	Riau Kepulauan	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7 4.52%
11	DKI Jakarta	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1 0.65%
12	Jawa Barat	1 5.26%	0 0.00%	15 18.29%	10 6.45%
13	Jawa Tengah	5 26.32%	0 0.00%	14 17.07%	17 10.97%
14	DIY	1 5.26%	0 0.00%	3 3.66%	2 1.29%
15	Jawa Timur	2 10.53%	0 0.00%	17 20.73%	20 12.90%
16	Banten	2 10.53%	0 0.00%	1 1.22%	4 2.58%
	JUMLAH PEMDA	19 100.00%	1 100.00%	82 100.00%	155 100.00%

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 3, terlihat Propinsi Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten/kota APBD surplus terbanyak, yaitu 5 kabupaten/kota (26,32%); Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit <5% terbanyak, yaitu 17 kabupaten/kota (20,73%); dan Propinsi Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten/kota

APBD defisit $\geq 5\%$ terbanyak, yaitu 17 kabupaten/kota (10,97%). Untuk kondisi APBD berimbang terbanyak hanya 1 kabupaten/kota (100%) di Propinsi Jambi.

Hasil penelitian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berdasarkan PP 58/2005 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4
Kabupaten/Kota per Propinsi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
yang Mengalami Surplus/Defisit APBD Tahun 2007
Berdasarkan PP 58/2005

Nomor	Propinsi	Surplus		Berimbang		Defisit < 5%		Defisit $\geq 5\%$	
1	Bali	0	0.00%	0	0.00%	3	11.11%	6	19.35%
2	NTB	1	6.67%	1	16.67%	3	11.11%	4	12.90%
3	NTT	4	26.67%	2	33.33%	5	18.52%	5	16.13%
4	Maluku	0	0.00%	0	0.00%	3	11.11%	5	16.13%
5	Papua	6	40.00%	2	33.33%	5	18.52%	7	22.58%
6	Maluku Utara	1	6.67%	0	0.00%	6	22.22%	1	3.23%
7	Irian Jaya Barat	3	20.00%	1	16.67%	2	7.41%	3	9.68%
	JUMLAH PEMDA	15	100.00%	6	100.00%	27	100.00%	31	100.00%

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4, terlihat Propinsi Papua memiliki jumlah kabupaten/kota APBD surplus terbanyak, yaitu 6 kabupaten/kota (40%); Propinsi Maluku Utara memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit <5% terbanyak, yaitu 6 kabupaten/kota (22,22%); dan Propinsi Papua memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit $\geq 5\%$ terbanyak, yaitu 7 kabupaten/kota (22,58%). Untuk kondisi APBD berimbang terbanyak hanya 2 kabupaten/kota (33,33%) masing-masing di Propinsi NTT dan Papua.

Hasil penelitian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota wilayah Sumatra dan Jawa berdasarkan PMK 72/2006 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5
Kabupaten/Kota per Propinsi Wilayah Sumatra dan Jawa
yang Mengalami Surplus/Defisit APBD Tahun 2007 Berdasarkan PMK 72/ 2006

Nomor	Propinsi	Surplus		Berimbang		Defisit < 5%		Defisit $\geq 5\%$	
1	NAD	20	8.85%	1	14.29%	1	5.26%	0	0.00%
2	Sumatra Utara	24	10.62%	0	0.00%	2	10.53%	0	0.00%
3	Sumatra Barat	17	7.52%	0	0.00%	3	15.79%	0	0.00%
4	Riau	10	4.42%	0	0.00%	1	5.26%	1	20.00%
5	Jambi	10	4.42%	0	0.00%	1	5.26%	0	0.00%
6	Sumatra Selatan	14	6.19%	1	14.29%	0	0.00%	0	0.00%
7	Bengkulu	8	3.54%	0	0.00%	1	5.26%	1	20.00%
8	Lampung	11	4.87%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Analisis Surplus Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota di Indonesia
(Rudy Badrudin)

9	Bangka Belitung	8	3.54%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	Riau Kepulauan	5	2.21%	2	28.57%	0	0.00%	0	0.00%
11	DKI Jakarta	1	0.44%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
12	Jawa Barat	23	10.18%	0	0.00%	3	15.79%	0	0.00%
13	Jawa Tengah	32	14.16%	1	14.29%	3	15.79%	0	0.00%
14	DIY	5	2.21%	0	0.00%	1	5.26%	0	0.00%
15	Jawa Timur	33	14.60%	2	28.57%	2	10.53%	2	40.00%
16	Banten	5	2.21%	0	0.00%	1	5.26%	1	20.00%
	JUMLAH PEMDA	226	100.00%	7	100.00%	19	100.00%	5	100.00%

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota APBD surplus terbanyak, yaitu 33 kabupaten/kota (14,60%); Propinsi Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masing-masing memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit <5% terbanyak, yaitu 3 kabupaten/kota (15,79%); dan Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit ≥5% terbanyak, yaitu 2 kabupaten/kota (40%). Untuk kondisi APBD berimbang terbanyak hanya 2 kabupaten/kota (28,75%) masing-masing di Propinsi Riau Kepulauan dan Jawa Timur.

Hasil penelitian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berdasarkan PMK 72/2006 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 6
Kabupaten/Kota per Propinsi Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
yang Mengalami Surplus/Defisit APBD Tahun 2007
Berdasarkan PMK 72/2006

Nomor	Propinsi	Surplus	Berimbang	Defisit < 5%	Defisit ≥ 5%
1	Bali	9	12.68%	0	0.00%
2	NTB	9	12.68%	0	0.00%
3	NTT	14	19.72%	2	33.33%
4	Maluku	7	9.86%	0	0.00%
5	Papua	17	23.94%	2	33.33%
6	Maluku Utara	6	8.45%	2	33.33%
7	Irian Jaya Barat	9	12.68%	0	0.00%
	JUMLAH PEMDA	71	100.00%	6	100.00%

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 6, terlihat Propinsi Papua memiliki jumlah kabupaten/kota APBD surplus terbanyak, yaitu 17 kabupaten/kota (23,94%); Propinsi Maluku memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit <5% terbanyak, yaitu 1 kabupaten/kota (100%); dan Propinsi Papua memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit ≥5% terbanyak, yaitu 1 kabupaten/kota (100%). Untuk kondisi APBD berimbang terbanyak hanya 3 kabupaten/kota (33,33%) masing-masing di Propinsi NTT, Papua, dan Maluku Utara.

Hasil penelitian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berdasarkan PP 58/2005 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 7
Kabupaten/Kota per Propinsi Wilayah Sumatra, Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang Mengalami
Surplus/Defisit APBD Tahun 2007 Berdasarkan PP 58/2005

Nomor	Propinsi	Surplus	Berimbang	Defisit < 5%	Defisit ≥ 5%
1	NAD	4	0	3	15
2	Sumatra Utara	2	0	12	12
3	Sumatra Barat	0	0	6	14
4	Riau	0	0	0	12
5	Jambi	0	1	1	9
6	Sumatra Selatan	2	0	4	9
7	Bengkulu	0	0	3	7
8	Lampung	0	0	2	9
9	Bangka Belitung	0	0	1	7
10	Riau Kepulauan	0	0	0	7
11	DKI Jakarta	0	0	0	1
12	Jawa Barat	1	0	15	10
13	Jawa Tengah	5	0	14	17

Sambungan dari hal. sebelumnya

Nomor	Propinsi	Surplus	Berimbang	Defisit < 5%	Defisit ≥ 5%
14	DIY	1	0	3	2
15	Jawa Timur	2	0	17	20
16	Banten	2	0	1	4
17	Bali	0	0	3	6
18	NTB	1	1	3	4
19	NTT	4	2	5	5
20	Maluku	0	0	3	5
21	Papua	6	2	5	7
22	Maluku Utara	1	0	6	1
23	Irian Jaya Barat	3	1	2	3
JUMLAH PEMDA		34	7	109	186

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 7, terlihat Propinsi Papua memiliki jumlah kabupaten/kota APBD surplus terbanyak, yaitu 6 kabupaten/kota; Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit <5% terbanyak, yaitu 17 kabupaten/kota dan memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit ≥5% terbanyak, yaitu 20 kabupaten/kota. Untuk kondisi APBD berimbang terbanyak hanya 2 kabupaten/kota masing-masing di Propinsi NTT dan Papua.

Hasil penelitian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berdasarkan PMK 72/2006 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 8
Kabupaten/Kota per Propinsi Wilayah Sumatra, Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang Mengalami
Surplus/Defisit APBD Tahun 2007 Berdasarkan PMK 72 Tahun 2006

Bersambung ke hal. berikutnya

Nomor	Propinsi	Surplus	Berimbang	Defisit < 5%	Defisit ≥ 5%
1	NAD	20	1	1	0
2	Sumatra Utara	24	0	2	0
3	Sumatra Barat	17	0	3	0
4	Riau	10	0	1	1
5	Jambi	10	0	1	0
6	Sumatra Selatan	14	1	0	0
7	Bengkulu	8	0	1	1
8	Lampung	11	0	0	0
9	Bangka Belitung	8	0	0	0
10	Riau Kepulauan	5	2	0	0
11	DKI Jakarta	1	0	0	0
12	Jawa Barat	23	0	3	0
13	Jawa Tengah	32	1	3	0
14	DIY	5	0	1	0
15	Jawa Timur	33	2	2	2
16	Banten	5	0	1	1

Sambungan dari hal. sebelumnya

Nomor	Propinsi	Surplus	Berimbang	Defisit < 5%	Defisit ≥ 5%
17	Bali	9	0	0	0
18	NTB	9	0	0	0
19	NTT	14	2	0	0
20	Maluku	7	0	1	0
21	Papua	17	2	0	1
22	Maluku Utara	6	2	0	0
23	Irian Jaya Barat	9	0	0	0
JUMLAH PEMDA		297	13	20	6

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 8, terlihat Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota APBD surplus terbanyak, yaitu 33 kabupaten/kota; Propinsi Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit <5% terbanyak, yaitu masing-masing 3 kabupaten/kota; dan Propinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota APBD defisit ≥5% terbanyak, yaitu 2 kabupaten/ kota. Untuk kondisi APBD berimbang terbanyak hanya 5 kabupaten/kota masing-masing di Propinsi Riau Kepulauan, Jawa Timur, NTT, Papua, dan Maluku Utara.

3.2 Alat Analisis Data

Untuk menguji H1 sampai H4 digunakan t-test sebagai alat untuk menguji beda dua kelompok. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji beda dua rata-rata (Subiyakto, 2001: 89-116) dengan penelitian nilai α ditetapkan sebesar 5%.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Berdasarkan Tabel 7 dan Tabel 8, dapat dilakukan pengujian statistik menggunakan uji beda dua rata-rata (Subiyakto, 2001: 89-116) dengan nilai α ditetapkan sebesar 5%. Pengujian tersebut untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini. Hasil uji beda dua rata-rata ditunjukkan pada Tabel 9 berikut ini:

Bersambung ke hal. berikutnya

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Uji Beda Dua Rata-Rata

Hipotesis	T test	P value	Pengujian
H1	-7,0914	0,000000411	signifikan
H2	-1,4475	0,161859623	tidak signifikan
H3	4,3489	0,000257305	signifikan
H4	7,6519	0,000000123	signifikan

Sumber: Tabel 7 dan 8. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 9 nampak nilai t test H1 adalah -7,0914 dengan nilai P value = 0,000000411, signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian surplus APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 diterima. Nilai t test H2 adalah -1,4475 dengan nilai P value = 0,161859623, tidak signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian berimbang APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 ditolak. Nilai t test H3 adalah 4,3489 dengan nilai P value = 0,000257305, signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian defisit kurang daripada 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 diterima. Nilai t test H4 adalah 7,6519 dengan nilai P value = 0,000000123, signifikan pada $\alpha = 0,05$. Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ada perbedaan pengertian defisit lebih besar atau sama dengan 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 diterima.

4.2 Pembahasan

Menurut penjelasan PP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/retribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai dan (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan

berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Menurut PP Nomor 58/2005 pada Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 surplus/defisit anggaran daerah adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Menurut PMK Nomor 72/2006 Pasal 4 surplus/defisit anggaran daerah adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah ditambah SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan Tabel 9, nampak uji beda dua rata-rata terhadap Hipotesis Penelitian H1, H3, dan H4 signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti, pemerintah Kabupaten/Kota membedakan antara pengertian surplus, defisit $< 5\%$, dan defisit $\geq 5\%$ berdasarkan PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 karena dalam kedua peraturan perundangan tersebut memang membedakan pengertian surplus defisit APBD Kabupaten/Kota, yaitu adanya komponen penghitungan SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan pada PMK Nomor 72/2006 namun tidak ada dalam pada PP Nomor 58/2005 untuk menghitung surplus/defisit APBD.

Pemahaman yang berbeda tentang surplus/defisit APBD Kabupaten/Kota menurut kedua peraturan perundangan tersebut penting karena Menteri Keuangan secara berkala melakukan pemantauan perkembangan defisit APBD masing-masing Daerah. Berdasarkan pemantauan tersebut Menteri Keuangan akan melakukan evaluasi untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk tahun anggaran berikutnya setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dilakukan untuk pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD. Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan (1) sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya; (2) pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman; dan/atau (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Surplus APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Dengan demikian, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan fiskal daerah (Kabupaten/Kota).

Berdasarkan Tabel 9, nampak uji beda dua rata-rata terhadap Hipotesis Penelitian H2 tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti, pemerintah Kabupaten/Kota tidak membedakan antara pengertian berimbang berdasarkan PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006 sekalipun dalam kedua peraturan perundangan tersebut membedakan pengertian berimbang APBD Kabupaten/Kota, yaitu adanya komponen penghitungan SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan pada PMK Nomor 72/2006 namun tidak ada dalam pada PP Nomor 58/2005 untuk menghitung surplus/defisit APBD. Berdasarkan APBD Kabupaten/Kota yang menyusun APBD dengan konsep berimbang diperoleh data bahwa anggaran Pendapatan Daerah sama dengan anggaran Belanja Daerah (PP Nomor 58/2005) dan anggaran Pendapatan Daerah sama dengan Anggaran Belanja Daerah dengan nilai SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan sama dengan nol (0) karena kabupaten-kabupaten tersebut merupakan kabupaten hasil pemekaran sehingga belum mempunyai nilai SiLPA dan Pencairan Dana Cadangan. APBD berimbang ini terjadi di tiga (3) kabupaten/kota di Propinsi Jambi, NTT, dan Papua (berdasarkan PP Nomor 58/2005) dan di tujuh (7) kabupaten/kota di Propinsi Riau Kepulauan, Jawa Timur, NTT, Papua, dan Maluku Utara (berdasarkan PMK Nomor 72/2006).

5. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)

Ada perbedaan pengertian surplus APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; (2) Tidak ada perbedaan pengertian berimbang APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; (3) Ada perbedaan pengertian defisit kurang daripada 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006; dan (4) Ada perbedaan pengertian defisit lebih besar atau sama dengan 5% APBD antar Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 58/2005 dan PMK Nomor 72/2006.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang APBDnya memiliki nilai surplus atau defisit melebihi ketentuan PP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMK Nomor 72/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah harus mampu menyesuaikan dengan kedua peraturan perundangan tersebut. Hal ini dilakukan agar kabupaten/kota yang melanggar ketentuan dalam kedua peraturan perundangan tidak mengalami penundaan penyaluran Dana Perimbangan dari pemerintah pusat seperti yang disebutkan dalam PP Nomor 58/2005 Pasal 106 ayat (4). Agar kabupaten/kota mampu menyesuaikan dengan kedua peraturan perundangan tersebut maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus memperkuat kemampuan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Asmara, JA., (2007), "[Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik](#)", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 10 (1), pp.19-31.
- Badrudin, Rudy., (2000), "Pengembangan Wilayah Propinsi DIY (Pendekatan Teoritis)", Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Vol. 4 (2), pp.121-135.
- Bank Dunia (2005), "Analisis Pengeluaran Publik Papua: Sebuah Tinjauan Umum Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Wilayah Tertinggal di Indonesia". Download dari www.papua.go.id tanggal 28 Pebruari 2009.
- Boediono, (2002), "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Azas Desentralisasi Fiskal", Makalah Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002. (tidak dipublikasikan).
- Dwiyanto, Agus., dkk., (2003), "Dua Tahun setelah Otonomi Daerah: Pengamatan Kritis terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia", Makalah Seminar Rutin Studi Kependudukan dan Kebijakan. (tidak dipublikasikan).
- Sekretariat Negara, (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____, (2006), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sidik, Machfud., (2002), "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia)", Makalah Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. (tidak dipublikasikan).
- Subiyanto, Ibnu., (2004). Annual Report Kabupaten Sleman Tahun 2003.
- _____, (2005), "Kemampuan Keuangan Daerah yang Terbatas, Strategi Pengembangan Kapasitas, dan Program Prioritas", Makalah Lokakarya On Good Governance Best Practices in Kabupaten/Kota oleh

Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) dan United Nation Development Programme (UNDP). (tidak dipublikasikan).

Suhab, Sultan., (2004), "Kebijaksanaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Desentralisasi Dan Otonomi Daerah", Analisis, Vol. 1 (2), pp.106-114.

Syahrudin dan Taifur, Werry Darti, (2002), "Peranan DPRD untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah tentang Pelaksanaan Desentralisasi", Makalah Pusat Studi Kependudukan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. (tidak dipublikasikan).

Waluyo, Joko., (2007), "Fiscal Decentralization: Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia", Makalah Pusat Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (tidak dipublikasikan).